



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA

NUMBER 1 YEAR 2025

ABOUT

PLANNED ACTION FOR CONTROLLING POLLUTION AND/OR DAMAGE
IN THE CILAMAYA RIVER BASIN AREA

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan daerah aliran sungai;

b. bahwa Daerah Aliran Sungai Cilamaya teridentifikasi adanya pencemaran dan kerusakan, sehingga perlu dilakukan penanganan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron, dan bersinergi antar pemangku kepentingan;

c. bahwa untuk mengakselerasi penanganan Daerah Aliran Sungai Cilamaya, diperlukan dokumen rencana aksi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya oleh pemangku kepentingan termasuk kelompok kerja-kelompok kerja yang telah dibentuk melalui Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA.



E1D1F80BD4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. DAS Cilamaya adalah DAS yang meliputi wilayah administrasi Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
8. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA

Pasal 2

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya merupakan dokumen yang menjadi acuan untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya.



Pasal 3

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA

Pasal 4

Sistematika Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup;
- b. BAB II Permasalahan DAS Cilamaya, berisi permasalahan pencemaran dan kerusakan;
- c. BAB III Strategi, Kebijakan Dan Indikator Keberhasilan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya, berisi strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya, serta indikator keberhasilan;
- d. BAB IV Strategi Implementasi Program, berisi rencana pelaksanaan program dan indikasi kegiatan pada wilayah kerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya;
- e. BAB V Rencana Aksi, berisi penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, penegakan hukum, edukasi dan hubungan masyarakat, data dan informasi, dan rekapitulasi pendanaan;
- f. BAB VI sistem monitoring dan evaluasi, berisi skema pemantauan terhadap rencana aksi yang dilakukan serta skema evaluasi keberhasilan program; dan
- g. BAB VII Penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya sesuai kriteria dipulihkan dan dipertahankan daya dukung DAS.



E1D1F80BD4

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2025

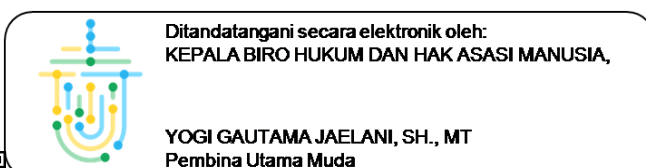
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
CILAMAYA

RENCANA AKSI PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI CILAMAYA



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

RENCANA AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN (PPK) DAS CILAMAYA



Disusun oleh:

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

Daftar Isi

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	III
Daftar Gambar	IV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	2
1.3 RUANG LINGKUP	3
1.3.1 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Aksi.....	3
1.3.2 Ruang Lingkup Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya.....	3
1.3.3 Ruang Lingkup Wilayah	3
BAB II. PERMASALAHAN DAS CILAMAYA	10
2.1 GAMBARAN UMUM	10
2.1.1 Lokasi Kajian	10
2.1.2 Iklim	12
2.1.3 Kependudukan.....	13
2.1.4 Pertanian	14
2.1.5 Lahan Kritis	16
2.1.6 Peternakan.....	17
2.1.7 Industri.....	19
2.1.8 Usaha Skala Kecil	20
2.2 SEGMENTASI DAS CILAMAYA	20
2.3 PERMASALAHAN DARI SUMBER PENCEMAR	22
2.3.1 Sumber Pencemar Domestik	22
2.3.2 Sumber Pencemar Industri.....	23
2.3.3 Sumber Pencemar Peternakan.....	23
2.3.4 Sumber Pencemar Perikanan	24
2.3.5 Sumber Pencemar Non Point Source (NPS)	24
2.4 POTENSI BEBAN PENCEMARAN	25
2.5 PERMASALAHAN	29
2.5.1 Sektor Peternakan.....	33
2.5.2 Sektor Industri.....	35
2.5.3 Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	37
BAB III. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PPK DAS CILAMAYA	42
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAS CILAMAYA	42
3.2 TUJUAN, SASARAN, DAN ULTIMATE GOAL	43
3.3 INDIKATOR KEBERHASILAN	50



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB IV. STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM	53
4.1 KELEMBAGAAN	53
4.2 WILAYAH KERJA	73
BAB V. RENCANA AKSI.....	75
5.1 INTERVENSI PENANGANAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN	75
5.2 INTERVENSI PENANGANAN LAHAN KRITIS.....	76
5.3 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	77
5.4 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH DOMESTIK.....	79
5.5 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN PERSAMPAHAN	86
5.6 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI.....	92
5.7 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN	93
5.8 INTERVENSI PROGRAM PENEGAKAN HUKUM.....	95
5.9 INTERVENSI PROGRAM EDUKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	98
5.10 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI	99
BAB VI. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, BERISI SKEMA PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN SERTA SKEMA EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM.....	125
6.1 MONITORING	125
6.2 EVALUASI.....	126
BAB VII. PENUTUP.....	129



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Batas Administrasi DAS Cilamaya	4
Tabel 2.1 Luasan Lahan Kritis DAS Cilamaya Tahun 2021	16
Tabel 2.2 Luas Lahan Kritis di DAS Cilamaya	17
Tabel 2.3 Jumlah Populasi Ternak di DAS Cilamaya	19
Tabel 2.4 Faktor emisi (<i>generation load</i>) domestik rumah tangga.....	22
Tabel 2.5 Faktor emisi (FE) industri tahu.....	23
Tabel 2.6 Faktor emisi ternak (<i>generation load</i>)	24
Tabel 2.7 Faktor emisi pertanian (<i>generation load</i>)	25
Tabel 2.8 Faktor emisi <i>Non Point source</i> dari penggunaan lahan (<i>generation load</i>).....	25
Tabel 2.9 Potensi Beban Pencemar Berdasarkan Sumbernya	26
Tabel 2.10 Kontribusi Beban Pencemar BOD pada Beberapa Sektor di DAS Cilamaya	28
Tabel 2.11 Permasalahan DAS Cilamaya.....	30
Tabel 2.12 Data sebaran Peternakan di DAS Cilamaya.....	34
Tabel 2.13 Data Industri di DAS Cilamaya	36
Tabel 2.14 Data Penegakan Hukum yang telah dilakukan di DAS Cilamaya...	37
Tabel 2.15 Hasil survei lapangan di sektor UMKM	38
Tabel 3.1 IKA DAS Cilamaya Tahun 2023	47
Tabel 3.2 Data Kualitas Air Sungai Cilamaya	48
Tabel 3.3 Indikator Program	50
Tabel 4.1 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Tim PPK DAS Cilamaya	56
Tabel 5.1 Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya	76
Tabel 5.2 Target Program Penanganan Lahan Kritis	76
Tabel 5.3 Indikasi Kegiatan pada Program Penanganan Lahan Kritis	77
Tabel 5.4 Kondisi Bahaya Banjir DAS Cilamaya Tahun 2018	78
Tabel 5.5 Target Program Pengelolaan Sumber Daya Air	79
Tabel 5.6 Rencana Target Outcome dan Output Pembangunan Sarana Sanitasi di Tiga Kabupaten Wilayah DAS Cilamaya.....	85
Tabel 5.7 Target Program Penanganan Limbah Domestik.....	86
Tabel 5.8 Cakupan Pelayanan Persampahan di Kabupaten/Kota DAS Cilamaya	88
Tabel 5.9 Target Program Penanganan Persampahan	91
Tabel 5.10 Target Program Penanganan Limbah Industri	93
Tabel 5.11 Persebaran ternak di tiga kabupaten di DAS Cilamaya.....	95
Tabel 5.12 Target Program Penanganan Limbah Peternakan	95
Tabel 5.13 Bentuk Penegakan Hukum yang telah dilakukan di DAS Cilamaya	97
Tabel 5.14 Rencana Target Outcome Program Penegakan Hukum DAS Cilamaya	98
Tabel 5.15 Target outcome Program Edukasi dan Hubungan Masyarakat	99
Tabel 5.16 Target outcome Program Data, Informasi, dan Publikasi	101
Tabel 5.17 Rincian <i>Overall Work Plan</i> (OWP) 2025-2029	102



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi DAS Cilamaya	8
Gambar 2.1 Peta Batas DAS Cilamaya	10
Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan di DAS Cilamaya	12
Gambar 2.3 Grafik Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Tahun 2007-2019 di Kabupaten Karawang	13
Gambar 2.4 Perbandingan Populasi Kabupaten Total dengan Populasi Kabupaten dalam DAS	14
Gambar 2.5 Perbandingan Luasan Lahan Pertanian pada DAS Cilamaya di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang	15
Gambar 2.6 Perubahan Lahan kritis DAS Cilamaya Tahun 2022	17
Gambar 2.7 Peta Sebaran Populasi Ternak dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya	18
Gambar 2.8 Peta Persebaran Titik Industri pada DAS Cilamaya	20
Gambar 2.9 Skema Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya	21
Gambar 2.10 Peta Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya	22
Gambar 2.11 Sektor Potensi Beban Pencemaran di DAS Cilamaya	26
Gambar 3.1 Skema Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya	43
Gambar 3.2 Peta Segmentasi DAS Cilamaya	44
Gambar 3.3 Pembagian Segmen DAS Cilamaya beserta targetan baku mutu	45
Gambar 3.4 Tren Mutu Air DAS Cilamaya	46
Gambar 3.5 Tren Kualitas Air DAS Cilamaya	46
Gambar 3.6 Target <i>Ultimate Goal</i> IKA DAS Cilamaya 2025-2029	49
Gambar 4.1 Susunan Kelembagaan PPK DAS Cilamaya	55
Gambar 5.1 Peta Desa/Kelurahan ODF di Wilayah Das Cilamaya 2023	80
Gambar 5.2 Peta Tipologi Akses Sanitasi Wilayah Das Cilamaya	81
Gambar 5.3 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Akses Sanitasi Layak	82
Gambar 5.4 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Intervensi Pembangunan Sanitasi Layak	83
Gambar 5.5 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Tingkat Intensitas Intervensi Pembangunan Sanitasi Layak yang Diperlukan	83
Gambar 5.6 Pelayanan Sampah di Wilayah DAS Cilamaya	87
Gambar 5.7 Peta Persebaran Titik Industri pada DAS Cilamaya	92
Gambar 5.8 Peta Persebaran Peternakan pada DAS Cilamaya	94
Gambar 6.1 Skema Pemantauan Capaian Kegiatan	125
Gambar 6.2 Skema Evaluasi Keberhasilan Program	127



BAB I

PENDAHULUAN



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya pencemaran maka kualitas air dapat menurun sehingga air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab terjadinya pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia yang umumnya disebut sebagai limbah. Pada umumnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan dilakukan melalui 3(tiga) kegiatan yaitu Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan. Pada upaya pencegahan, salah satunya adalah pencegahan pada sumber pencemar. Sumber pencemar berdasarkan penyebarannya terdiri dari sumber pencemar tersebar tertentu (*point source*) atau sumber pencemar tersebar tak tentu (*non point source*). Pencemar *point source* umumnya bersifat lokal dengan volume relatif tetap misalnya: industri, domestik, hotel, rumah sakit, laboratorium klinik, pusat perdagangan dan gedung-gedung komersial. Sumber pencemar tersebut sering juga dinamakan dengan sumber pencemar institusi. Sementara itu sumber pencemaran non institusi adalah sumber pencemar tersebar (*diffuse*) atau bukan titik (*non point source*) yang dibawa oleh air larian (*runoff*) pada saat atau setelah terjadinya hujan. Sumber pencemar tersebut meliputi air larian di perkotaan, pertanian, hutan dan pertambangan. Di samping itu, pencemaran yang berasal dari limbah usaha skala kecil dan limbah rumah tangga juga dikategorikan sebagai sumber pencemar non institusi.

Salah satu upaya untuk memantau pencemaran air yang berakibat pada penurunan kualitas air adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sehingga dapat dilakukan upaya-upaya lanjutan untuk menanggulangi masalah pencemaran pada sumber air. Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air adalah data dan informasi dari jenis pencemar yang berpotensi mencemari lingkungan termasuk informasi mengenai sifat-sifat dan besaran beban pencemar tersebut yang terlepas ke lingkungan.

Saat ini DAS Cilamaya mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tingginya aktivitas domestik dan industri di pinggiran sungai menjadi penyebab utama tercemarnya sungai ini. Pencemaran dan kerusakan Sungai Cilamaya meliputi



pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah domestik baik air limbah domestik maupun sampah domestik. Dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Cilamaya. Saat ini DAS Cilamaya dinilai kondisinya sudah sangat kritis dan membutuhkan suatu pengelolaan dan penanganan segera melalui kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS yang terintegrasi.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi. Berdasarkan mandat tersebut, Gubernur membentuk Kelompok Kerja (Pokja) melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.443-DLH/2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya. Satgas bertugas melakukan percepatan dan keberlanjutan PPK DAS Cilamaya melalui operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi. Sesuai dengan tugasnya, Satgas PPK DAS Cilamaya menyusun Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya 2025-2029 sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan. Melalui mandat tersebut, Kelompok Kerja PPK DAS Cilamaya, difasilitasi oleh Pokja Perencanaan yang diketuai oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, menyusun Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya yang dapat menjadi acuan dalam integrasi kebijakan dan program penanganan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya adalah seluruh pemangku kepentingan mempunyai referensi dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya. Tujuannya adalah agar membuat pedoman Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya.

Sasaran dari Penyusunan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya adalah:

1. Terumuskannya strategi dan indikator keberhasilan;
2. Terumuskannya rencana program dan kegiatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
3. Terumuskannya kerangka monitoring dan evaluasi keberhasilan program.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Dokumen Rencana Aksi

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya secara umum meliputi Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan; Permasalahan di DAS Cilamaya; Strategi PPK DAS Cilamaya, yang mencakup strategi penanganan dan indikator keberhasilan; Rencana Aksi setiap penanganan; Monitoring dan Evaluasi; serta Penutup.

1.3.2 Ruang Lingkup Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya

Rencana Aksi Pengendalian pencemaran dan kerusakan (PPK) DAS Cilamaya ini difokuskan pada:

1. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, yaitu kegiatan perencanaan terpadu dan menyeluruh dalam pola pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan DAS melalui aktifitas fisik dan/atau non fisik yang tertuang dalam program pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum.
2. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, yaitu cara atau proses untuk mengatasi pencemaran DAS dan atau kerusakan DAS yang terdiri dari program penanganan limbah industri, pertanian dan peternakan, penanganan air limbah domestik dan persampahan serta edukasi dan hubungan masyarakat.
3. Pemulihan Fungsi DAS, yaitu serangkaian kegiatan penanganan lahan yang mengalami kerusakan untuk memulihkan fungsi DAS yang disebabkan oleh pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS, yang meliputi penanganan lahan kritis dan pengelolaan sumber daya air.

1.3.3 Ruang Lingkup Wilayah

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan sebuah kawasan daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS dibatasi oleh pemisah topografis, seperti punggung bukit atau pegunungan, dan berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke sungai, danau, atau laut. DAS lebih luas daripada sungai itu sendiri, dan sungai merupakan salah satu bagian dari DAS. Ruang lingkup wilayah adalah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas area 60.747,37 Ha. DAS Cilamaya mencakup 3 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Subang 11.543,33 Ha, Kabupaten Purwakarta 25.294,01 Ha, dan Kabupaten Karawang 23.910,04 Ha. DAS Cilamaya mencakup total 22 Kecamatan dan 141 Desa, dimana area di Kabupaten Subang terdiri dari 8 Kecamatan dan 23 Desa, di Kabupaten Purwakarta terdiri dari 8 Kecamatan dan 59 Desa, serta di Kabupaten Karawang terdiri dari 6 Kecamatan dan 59 Desa.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Tabel 1.1 Batas Administrasi DAS Cilamaya

LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
705.19	Cipancar	Serangpanjang	Subang
6.36	Cijengkol	Serangpanjang	Subang
0.40	Cintamekar	Serangpanjang	Subang
1,935.14	Talagasari	Serangpanjang	Subang
1,906.88	Ponggang	Serangpanjang	Subang
79.18	Jambelaer	Dawuan	Subang
714.15	Banggalamulya	Kalijati	Subang
542.66	Jalupang	Kalijati	Subang
1,896.54	Cimayasari	Cipeundeuy	Subang
56.08	Lengkong	Cipeundeuy	Subang
444.57	Cipeundeuy	Cipeundeuy	Subang
199.34	Karangmukti	Cipeundeuy	Subang
296.82	Balebandung Jaya	Pabuaran	Subang
13.32	Cihambulu	Pabuaran	Subang
260.85	Tanjungrasa Kidul	Patokbeusi	Subang
378.35	Tanjungrasa	Patokbeusi	Subang
450.14	Jatiragas Hilir	Patokbeusi	Subang
202.49	Tambakjati	Patokbeusi	Subang
139.95	Sukahaji	Ciasem	Subang
401.13	Pinangsari	Ciasem	Subang
353.31	Cilamayahilir	Blanakan	Subang
37.95	Rawameneng	Blanakan	Subang
522.53	Cilamayagirang	Blanakan	Subang
90.99	Bungursari	Bungursari	Purwakarta
183.23	Cibening	Bungursari	Purwakarta
396.39	Cibodas	Bungursari	Purwakarta
694.63	Cikopo	Bungursari	Purwakarta
115.47	Ciwangi	Bungursari	Purwakarta
346.84	Karangmukti	Bungursari	Purwakarta
230.59	Cibungur	Bungursari	Purwakarta
31.13	Wanayasa	Wanayasa	Purwakarta
106.39	Wanasari	Wanayasa	Purwakarta
330.23	Babakan	Wanayasa	Purwakarta
133.53	Legok Huni	Wanayasa	Purwakarta
70.24	Sukadami	Wanayasa	Purwakarta
8.17	Salem	Pondoksalam	Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
570.66	Taringgul Tonggoh	Wanayasa	Purwakarta
449.61	Salammulya	Pondoksalam	Purwakarta
64.22	Pasawahankidul	Pasawahan	Purwakarta
934.11	Taringgul Tengah	Wanayasa	Purwakarta
488.04	Parakansalam	Pondoksalam	Purwakarta
415.47	Gurudug	Pondoksalam	Purwakarta
357.36	Pasawahan	Pasawahan	Purwakarta
11.77	Cihuni	Pasawahan	Purwakarta
562.19	Margasari	Pasawahan	Purwakarta
75.53	Warungkadu	Pasawahan	Purwakarta
606.94	Selaawi	Pasawahan	Purwakarta
276.96	Munjuljaya	Purwakarta	Purwakarta
3.32	Tegalmunjul	Purwakarta	Purwakarta
198.90	Ciseureuh	Purwakarta	Purwakarta
62.59	Situ	Pondoksalam	Purwakarta
266.82	Citalang	Purwakarta	Purwakarta
446.37	Benteng	Campaka	Purwakarta
397.19	Cipancur	Cibatu	Purwakarta
222.57	Campakasari	Campaka	Purwakarta
846.74	Cirende	Campaka	Purwakarta
766.94	Cikadu	Cibatu	Purwakarta
617.29	Cirangkong	Cibatu	Purwakarta
1,102.38	Mekarjaya	Kiarapedes	Purwakarta
1,295.55	Wanawali	Cibatu	Purwakarta
991.08	Cibukamanah	Cibatu	Purwakarta
371.40	Cibatu	Cibatu	Purwakarta
573.11	Pusakamulya	Kiarapedes	Purwakarta
300.90	Cibeber	Kiarapedes	Purwakarta
242.99	Sumbersari	Kiarapedes	Purwakarta
364.88	Parakangarokgek	Kiarapedes	Purwakarta
320.77	Ciracas	Kiarapedes	Purwakarta
379.75	Kiarapedes	Kiarapedes	Purwakarta
305.23	Gardu	Kiarapedes	Purwakarta
282.71	Taringgul Landeuh	Kiarapedes	Purwakarta
1,803.18	Margaluyu	Kiarapedes	Purwakarta
262.75	Cipinang	Cibatu	Purwakarta
267.56	Campaka	Campaka	Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
466.83	Cilandak	Cibatu	Purwakarta
354.19	Cijaya	Campaka	Purwakarta
431.85	Karyamekar	Cibatu	Purwakarta
348.07	Ciparungsari	Cibatu	Purwakarta
612.27	Kertamukti	Campaka	Purwakarta
882.71	Cikumpay	Campaka	Purwakarta
865.48	Cimahi	Campaka	Purwakarta
541.69	Cisaat	Campaka	Purwakarta
547.26	Cijunti	Campaka	Purwakarta
138.97	Pucung	Kota Baru	Karawang
5.70	Jomin Barat	Kota Baru	Karawang
151.36	Jomin Timur	Kota Baru	Karawang
627.13	Pangulah Selatan	Kota Baru	Karawang
443.32	Pangulah Utara	Kota Baru	Karawang
223.80	Wancimekar	Kota Baru	Karawang
415.25	Pangulah Baru	Kota Baru	Karawang
263.40	Talunjaya	Banyusari	Karawang
463.95	Jatibaru	Jatisari	Karawang
430.05	Cicinde Selatan	Banyusari	Karawang
591.38	Pamekaran	Banyusari	Karawang
236.43	Tegalsari	Cilamaya Wetan	Karawang
420.35	Tegalwaru	Cilamaya Wetan	Karawang
108.29	Pasirjaya	Cilamaya Kulon	Karawang
293.39	Barugbug	Jatisari	Karawang
491.16	Situdam	Jatisari	Karawang
327.91	Cirejag	Jatisari	Karawang
258.88	Balonggandu	Jatisari	Karawang
273.37	Jatisari	Jatisari	Karawang
202.61	Cikalongsari	Jatisari	Karawang
149.20	Parakanmulya	Tirtamulya	Karawang
302.10	Mekarsari	Jatisari	Karawang
370.53	Jatiragas	Jatisari	Karawang
319.62	Jatiwangi	Jatisari	Karawang
338.67	Telarsari	Jatisari	Karawang
551.86	Kalijati	Jatisari	Karawang
677.57	Pacing	Jatisari	Karawang
5.54	Bojongsari	Tirtamulya	Karawang
477.44	Cicinde Utara	Banyusari	Karawang
1.05	Cipondoh	Tirtamulya	Karawang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
383.30	Kamurang	Tirtamulya	Karawang
597.26	Sukamekar	Jatisari	Karawang
441.46	Jayamukti	Banyusari	Karawang
40.91	Kertawaluya	Tirtamulya	Karawang
251.60	Gempol Kolot	Banyusari	Karawang
319.70	Gempol	Banyusari	Karawang
483.01	Gembongan	Banyusari	Karawang
364.60	Kertaraharja	Banyusari	Karawang
689.14	Mekarasih	Banyusari	Karawang
585.43	Tanjung	Banyusari	Karawang
586.27	Banyuasih	Banyusari	Karawang
345.44	Bayur Kidul	Cilamaya Kulon	Karawang
128.02	Kiara	Cilamaya Kulon	Karawang
387.76	Cikarang	Cilamaya Wetan	Karawang
365.50	Cikalong	Cilamaya Wetan	Karawang
398.91	Mekarmaya	Cilamaya Wetan	Karawang
347.92	Bayur Lor	Cilamaya Kulon	Karawang
235.72	Langensari	Cilamaya Kulon	Karawang
458.86	Cilamaya	Cilamaya Wetan	Karawang
470.73	Sukamulya	Cilamaya Kulon	Karawang
794.41	Sukatani	Cilamaya Wetan	Karawang
523.86	Rawagempol Wetan	Cilamaya Wetan	Karawang
439.11	Pasirukem	Cilamaya Kulon	Karawang
89.62	Muktijaya	Cilamaya Kulon	Karawang
1,866.91	Muara	Cilamaya Wetan	Karawang
1,075.48	Muarabaru	Cilamaya Wetan	Karawang
626.96	Rawagempol Kulon	Cilamaya Wetan	Karawang
630.12	Sukakerta	Cilamaya Wetan	Karawang
421.75	Sukajaya	Cilamaya Kulon	Karawang

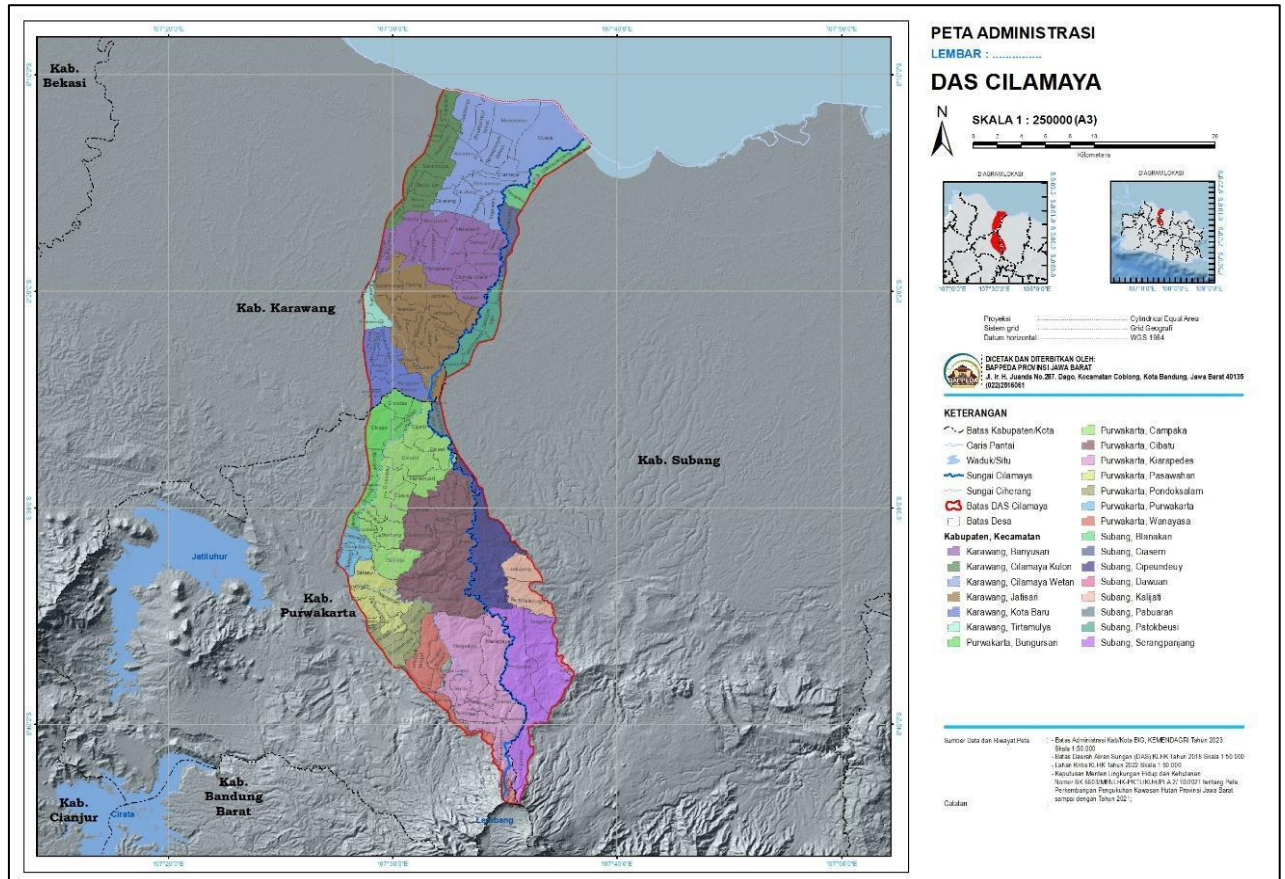
Sumber : Batas DAS KLHK 2018, Batas Administrasi BIG, KEMENDAGRI,
diolah Bappeda 2024



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Batas Wilayah Administrasi DAS Cilamaya mencakup 3 (tiga) wilayah administrasi yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang yang dapat digambarkan dalam peta berikut.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi DAS Cilamaya



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB II

PERMASALAHAN DAS CILAMAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

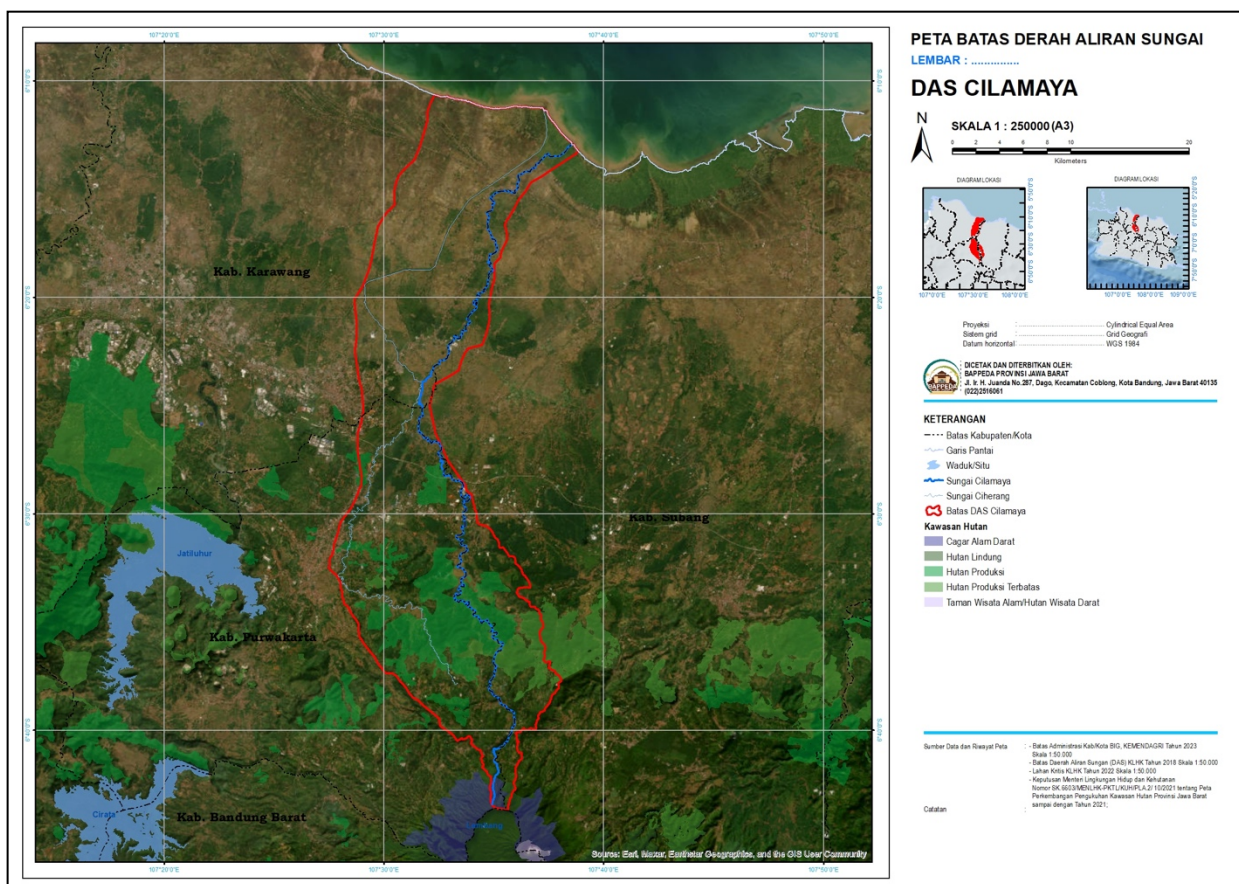
E1D1F80BD4

BAB II. PERMASALAHAN DAS CILAMAYA

2.1 GAMBARAN UMUM

2.1.1 Lokasi Kajian

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya secara geografis terletak pada $107^{\circ}31' - 107^{\circ}41'$ BT dan $06^{\circ}12' - 06^{\circ}44'$ LS. Sub DAS Cilamaya mengalir dan bermuara ke Laut Jawa. DAS Cilamaya termasuk ke dalam Wilayah Sungai Citarum. DAS Cilamaya secara umum mencakup wilayah administrasi Kabupaten Purwakarta di bagian hulu dan Kabupaten Karawang serta Kabupaten Subang di bagian hilir. DAS Cilamaya memiliki satu saluran utama, yaitu sungai Cilamaya dan memiliki stasiun pengukuran debit yang terletak di Cipeundeuy. Peta DAS Cilamaya disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Batas DAS Cilamaya

DAS Cilamaya memiliki luas wilayah sekitar 814.875,57 Ha dengan jumlah penduduk di dalamnya sebanyak 574.585 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang cukup tinggi tentunya akan berpengaruh terhadap beban pencemaran domestik yang besar. Tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

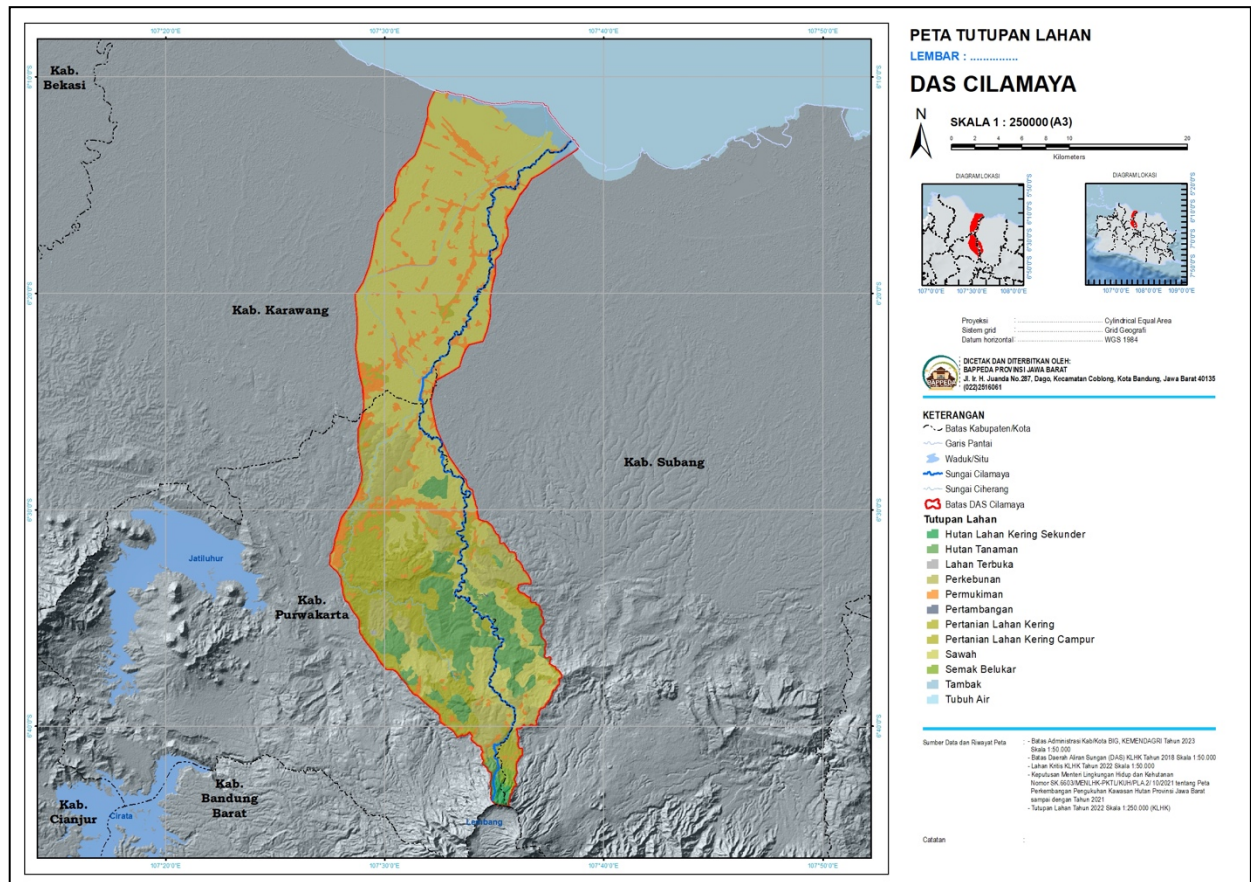
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta sebesar 1,19%, Kabupaten Subang sebesar 1,06%, dan Kabupaten Karawang sebesar 0,84%. Sumber beban pencemar pada DAS Cilamaya selain dari limbah domestik, juga dari limbah industri, pertanian, perikanan, dan peternakan.

Sungai Cilamaya merupakan sungai yang alirannya melalui tiga kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sebagian Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari hulu DAS Cilamaya beserta sebagian Kabupaten Subang, sedangkan Kabupaten Karawang dan sebagian Kabupaten Subang menjadi bagian dari hilir DAS Cilamaya. Sungai Cilamaya yang melewati ketiga kabupaten tersebut menjadi terdampak sebagai badan penerima air limbah industri maupun non industri seperti domestik, pertanian, perikanan, dan peternakan yang berperan besar terhadap beban pencemaran air Sungai Cilamaya.

DAS Cilamaya secara keseluruhan memiliki topografi yang beragam, yaitu dimulai dari kawasan pegunungan di bagian hulu hingga dataran rendah di bagian hilirnya. Keberagaman kondisi topografi juga turut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam sempadan DAS Cilamaya. Data sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang yang kemudian diolah menunjukkan jika kepadatan penduduk tergolong rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa/Ha. Adapun kondisi sosial mata pencaharian cukup beragam, yaitu petani, peternak, wirausaha, PNS, hingga karyawan. Kondisi sosial mata pencaharian juga dapat diasosiasikan dengan penggunaan lahan di dalam DAS Cilamaya.

Penduduk pada sektor agraris di DAS Cilamaya memiliki pola atau kecenderungan yang berbeda di bagian hulu maupun di bagian hilir. Penduduk di bagian hulu DAS Cilamaya lebih banyak bekerja sebagai peternak dan sebagian merupakan petani kebun. Kondisi tersebut dapat terlihat dari banyaknya populasi ternak dan luas perkebunan yang cukup besar di Kabupaten Purwakarta dan Subang di bagian hulu DAS Cilamaya. Penduduk di bagian hilir, yaitu di Kabupaten Karawang dan sebagian Subang lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian seperti petani sawah tadah hujan maupun sawah irigasi. Luasnya sawah irigasi dimungkinkan karena terdapatnya sistem pengairan irigasi sepanjang tahun. Visualisasi sebaran penggunaan lahan ditunjukkan oleh Gambar 2.2.





Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan di DAS Cilamaya

Bagian hulu DAS Cilamaya didominasi oleh kawasan hutan lahan kering sekunder dan perkebunan. Kondisi tersebut turut didukung oleh kondisi topografi yang berupa pegunungan di bagian selatan atau di bagian hulu DAS Cilamaya. Bagian tengah DAS Cilamaya banyak ditemukan lokasi industri serta permukiman penduduk dengan asosiasi berupa jalan. Bagian hilir DAS Cilamaya didominasi oleh lahan sawah baik sawah tadah hujan maupun sawah irigasi serta permukiman. Sumber pengairan bagi sawah irigasi berasal dari aliran sungai Cilamaya yang dibendung.

2.1.2 Iklim

Iklim adalah rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu (seperti temperatur, curah hujan, atau angin) pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan, tahunan, atau jutaan tahun (Ditjen PPI-KLHK).

Kondisi iklim di wilayah kajian sesuai dengan bentuk morfologi wilayah Kabupaten Karawang yang merupakan dataran rendah memperlihatkan data dengan temperatur udara rata-rata 27,0°C, tekanan udara rata-rata

0,01 milibar, penyinaran matahari 66 % serta kelembaban nisbi 80%. Arah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

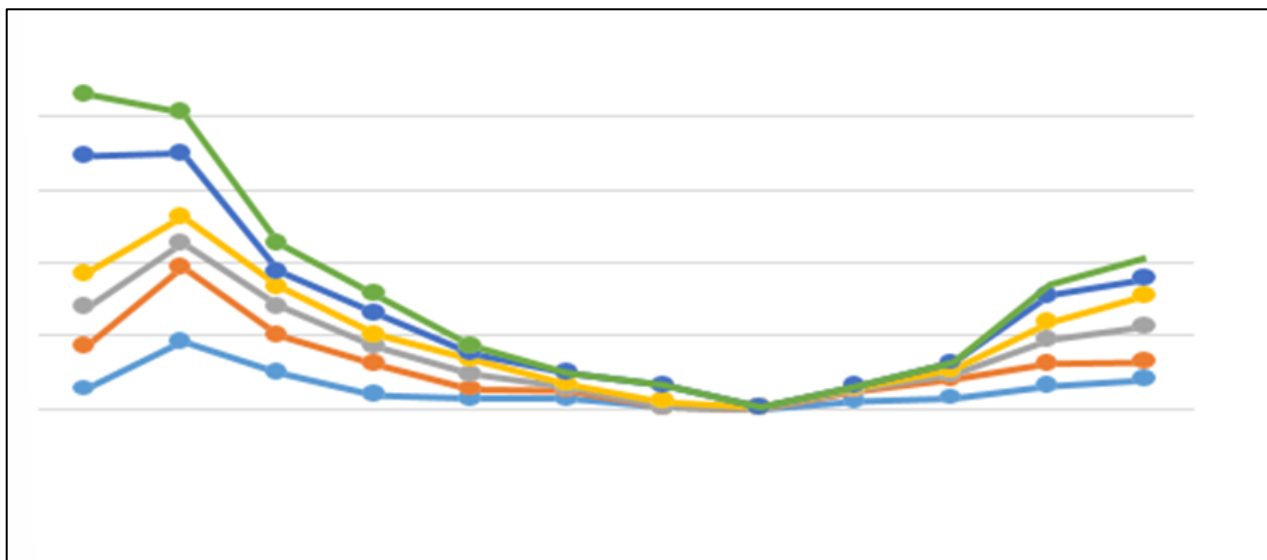
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

angin pada bulan Januari hingga April berupa angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100-3.200 mm/tahun. Kondisi iklim di Kabupaten Subang memiliki data temperatur rata-rata sebesar 27,90C serta kelembapan udara sebesar 74,67%. Adapun curah hujan rerata bulanan sebesar 251 mm/bulan.

Data mengenai curah hujan di sekitar lokasi kajian dihimpun dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang antara tahun 2007 hingga tahun 2019. Hasil olah data menunjukkan jika kecenderungan musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April. Musim kemarau terjadi di antara bulan Juli sampai bulan September. Kondisi curah hujan bulanan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dapat ditunjukkan dalam grafik pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Grafik Rata-Rata Curah Hujan Bulanan Tahun 2007-2019 di Kabupaten Karawang

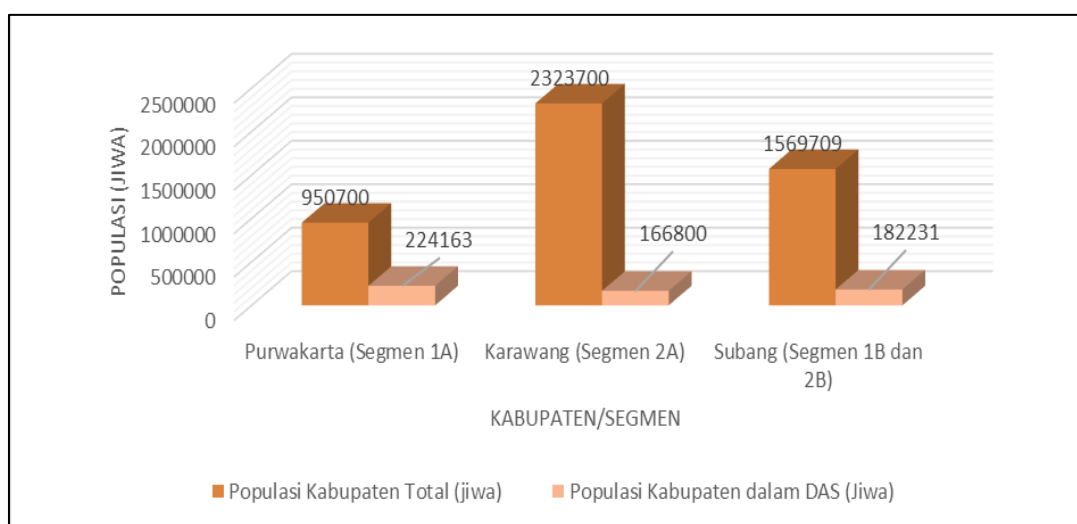
2.1.3 Kependudukan

DAS Cilamaya merupakan salah satu DAS yang terletak di Provinsi Jawa Barat. DAS Cilamaya secara administratif membentang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Jumlah penduduk dalam DAS Cilamaya apabila dilihat dari proporsi luasan DAS pada ketiga kabupaten tersebut setelah dilakukan rerata tertimbang dengan pengolahan spasial mendapatkan hasil jumlah penduduk sebesar 573.193 jiwa. Banyaknya penduduk masing-masing kabupaten yang wilayahnya termasuk ke dalam DAS Cilamaya yaitu Kabupaten Purwakarta sebanyak 224.162 jiwa, Kabupaten Subang sebanyak 182.234 jiwa, dan Kabupaten Karawang sebanyak 166.797 jiwa. Perbandingan populasi



kabupaten total dengan populasi kabupaten dalam DAS Cilamaya setelah dihitung dengan rerata tertimbang disajikan dalam Gambar 2.4.

Pengolahan data spasial juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di dalam DAS Cilamaya, yaitu dengan melakukan pengolahan data pada tingkatan administrasi yang paling kecil yaitu tingkat kelurahan/desa. Hasil pengolahan data menunjukkan jika kepadatan penduduk dalam DAS pada desa di dalam DAS Cilamaya dengan nilai maksimal sebesar 78 jiwa/Ha. Nilai tersebut menunjukkan jika kepadatan penduduk di dalam desa di DAS Cilamaya termasuk ke dalam kepadatan rendah menurut Permen PU No. 2 Tahun 2016, yaitu kurang dari 150 jiwa/Ha.



Gambar 2.4 Perbandingan Populasi Kabupaten Total dengan Populasi Kabupaten dalam DAS

2.1.4 Pertanian

DAS Cilamaya secara letak geografis membentang dari kaki Gunung Tangkuban Parahu di bagian hulu dan berakhir di pesisir utara Pulau Jawa. Kondisi geomorfologi yang beragam dimulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian di dalam lingkup DAS Cilamaya berdasarkan data BPS dan data peta penggunaan lahan milik BIG menunjukkan jika adanya diversifikasi kegiatan pertanian meliputi perkebunan, ladang (palawija) dan pertanian sawah.

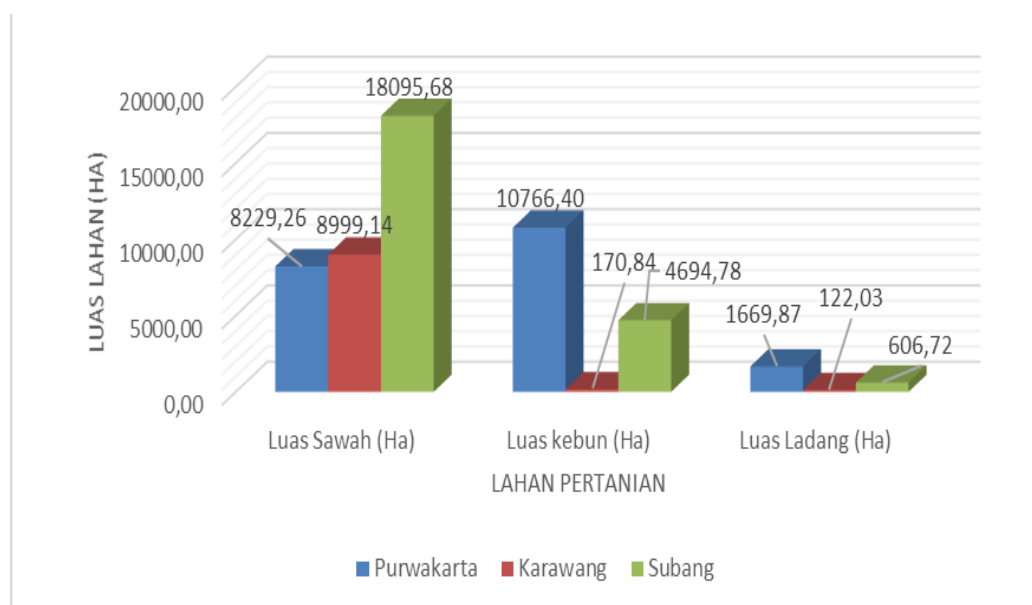
Sebaran kegiatan pertanian berupa perkebunan banyak tersebar di bagian hulu DAS Cilamaya, yaitu berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Hasil komoditas perkebunan di bagian hulu DAS Cilamaya berupa kopi dan teh. Kegiatan pertanian berupa perkebunan



banyak ditemukan di Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Serangpanjang, dan Kecamatan Kiarapedes. Tersebar nya kegiatan perkebunan di beberapa kecamatan tersebut karena kondisi topografinya yang berupa dataran tinggi sehingga cocok untuk dibudidayakan komoditas kopi dan teh. Luas keseluruhan lahan perkebunan di dalam DAS Cilamaya adalah 15.632,01 Ha.

Sebaran kegiatan pertanian berupa ladang di dalam DAS Cilamaya terkonsentrasi di bagian tengah DAS Cilamaya, yaitu berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Luas lahan ladang di dalam DAS Cilamaya sebesar 2.398,61 Ha. Lahan ladang di dalam DAS Cilamaya tersebar pada Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Cipeundeuy.

Kegiatan pertanian berupa persawahan di dalam DAS Cilamaya tersebar di bagian hilir DAS Cilamaya, yaitu dengan topografi berupa dataran rendah. Lahan persawahan dalam DAS Cilamaya terbagi menjadi dua, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi dengan total luas mencapai 35.324,08 Ha. Lahan persawahan banyak ditemukan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Tersebar nya lahan persawahan di bagian hilir disebabkan karena melimpahnya sumber air yang kemudian digunakan untuk irigasi sawah yang berasal dari Bendungan Barugbug. Perbandingan luas lahan pertanian dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya disajikan dalam Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Perbandingan Luasan Lahan Pertanian pada DAS Cilamaya di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang



E1D1F80BD4

2.1.5 Lahan Kritis

Pada Wilayah DAS Cilamaya, khususnya di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang terdapat lahan kritis dan sangat kritis yang cukup luas, yaitu 8.893,08 Ha lahan kritis dan 781,20 Ha lahan sangat kritis atau sebesar 10,64% dan 0,93% dari total luas lahan di DAS Cilamaya. Luas lahan kritis di DAS Cilamaya disajikan Tabel 2.1.

Kemudian Tahun 2022 berdasarkan Penetapan Peta Dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022 (SK. 49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022) luas lahan kritis telah membaik, dimana terjadi pengurangan luas lahan kritis, dari semula Tahun 2021 seluas 9.674,28 ha menjadi 7.691,83 Ha, berkurang 1.982,45 Ha sebagaimana Gambar 2.6.

Tabel 2.1 Luasan Lahan Kritis DAS Cilamaya Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					Total Luas (Ha)
			Tidak Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Kabupaten Karawang	Banyusari	5.393,50	5.410,53	0,00	0,00	0,00	10.804,03
		Cilamaya Kulon	2.673,88	2.673,85	0,00	0,00	0,00	5.347,73
		Cilamaya Wetan	7.639,38	7.146,52	0,00	0,00	0,00	14.785,89
		Jatisari	5.346,71	5.512,75	0,00	0,00	0,00	10.859,46
		Kota Baru	1.694,35	1.958,41	0,00	0,00	0,00	3.652,75
		Tirtamulya	520,22	520,22	0,00	0,00	0,00	1.040,45
		Sub Total	23.268,04	23.222,28	0,00	0,00	0,00	46.490,32
2	Kabupaten Purwakarta	Bungursari	1.300,50	747,11	75,25	5,93	0,00	2.128,78
		Campaka	894,12	2.017,53	1.542,75	1.013,84	0,00	5.468,24
		Cibatu	1.444,30	2.512,79	664,99	1.515,87	0,00	6.137,94
		Kiarapedes	7,24	3.426,43	194,26	2.019,50	39,41	5.686,83
		Pasawahan	19,22	904,08	14,69	878,19	67,70	1.883,88
		Pondoksalam	5,76	569,14	12,11	462,71	255,04	1.304,76
		Purwakarta	247,21	93,27	18,84	394,20	0,00	753,52
		Wanayasa	0,00	1.205,39	87,96	703,48	34,19	2.031,02
		Sub Total	3.918,35	11.475,72	2.610,85	6.993,71	396,35	25.394,98
3	Kabupaten Subang	Blanakan	886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	886,04
		Ciasem	550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	550,38
		Cipeundeuy	472,81	1.238,80	453,44	387,10	31,97	2.584,12
		Dawuan	0,00	40,15	0,00	0,00	38,89	79,04
		Kalijati	68,57	726,59	104,35	358,76	0,03	1.258,30
		Pabuaran	149,11	177,56	0,00	0,00	0,00	326,66
		Patokbeusi	1.266,90	25,27	0,00	0,00	0,00	1.292,17
		Serangpanjang	125,16	2.865,67	141,06	1.108,39	312,40	4.552,69
		Sub Total	3.518,97	5.074,04	698,86	1.854,26	383,29	11.529,42
4	-	Tidak diketahui	47,68	80,87	0,00	45,12	1,55	175,22
Total (Ha)			30.753,04	39.852,91	3.309,72	8.893,08	781,20	83.589,94
Persentase Luas			36,79%	47,68%	3,96%	10,64%	0,93%	100%

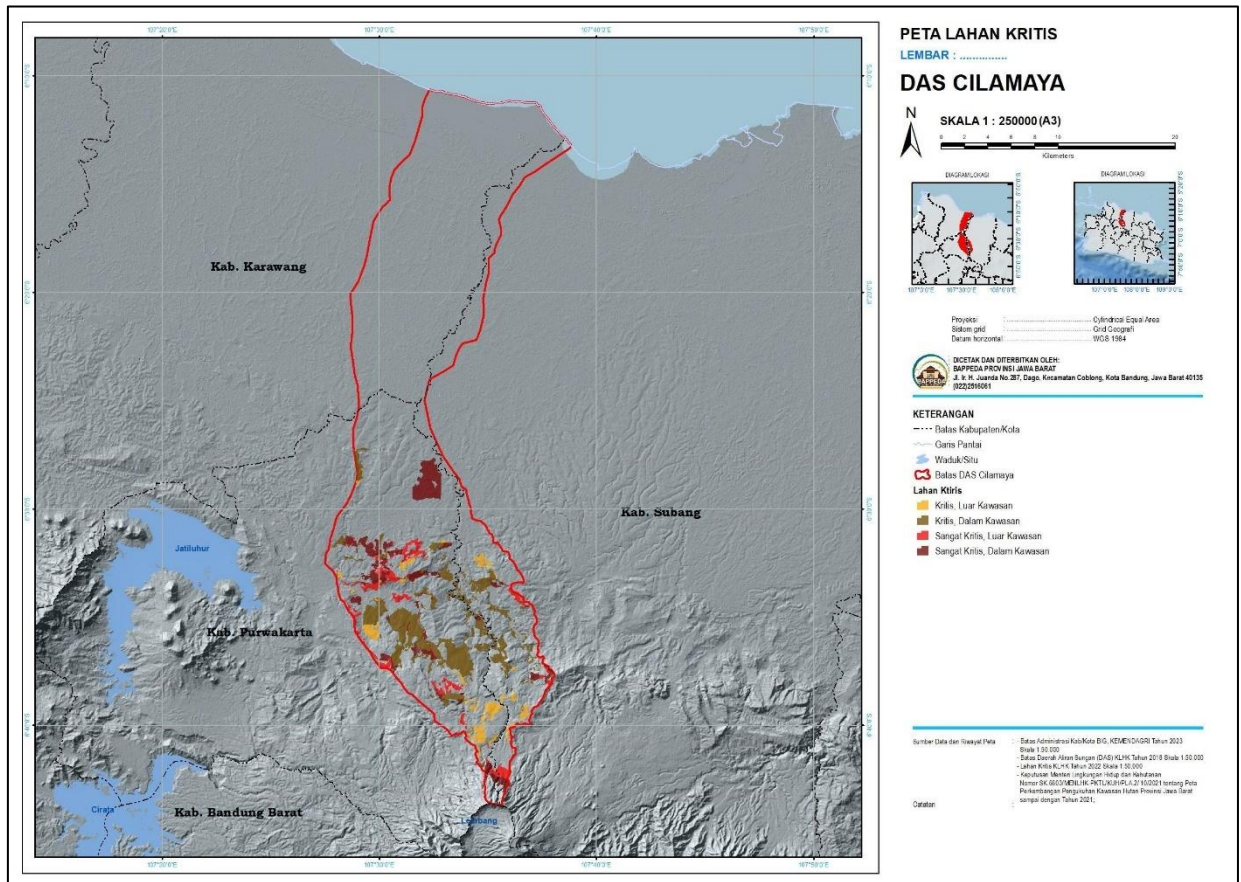
Sumber : Olahan data Bappeda, 2021



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



Gambar 2.6 Perubahan Lahan kritis DAS Cilamaya Tahun 2022

Lahan Kritis DAS Cilamaya sebesar 12,41% dari total luasan DAS, dengan total lahan kritis DAS DAS Cilamaya 7.559,25 Ha. Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan 5.567,69 Ha. Lahan Kritis Luar Kawasan Hutan 1.991,56. Dari perubahan lahan kritis tahun 2021 ke tahun 2022 tersebut, diperoleh besaran pengurangan lahan kritis sebesar 21,52% dari kondisi semula di tahun 2021. Berikut tabel luas lahan kritis di DAS Cilamaya.

Tabel 2.2 Luas Lahan Kritis di DAS Cilamaya

Keritisan	Luas per Kabupaten/Kota (ha)		Total
	Purwakarta	Subang	
Sangat Kritis	2.567,62	383,64	2.951,25
Kritis	3.489,90	1.118,09	4.607,99
Total	6.021,85	1.501,72	7.559,25
Total Luas DAS	60.922,30		

2.1.6 Peternakan

Kegiatan usaha peternakan di dalam DAS Cilamaya menurut data BPS yaitu Kecamatan dalam Angka Tahun 2019, terdiversifikasi atas tiga jenis hewan ternak, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Hewan ternak besar terdiri atas sapi, kerbau, dan kuda, yaitu masing-masing sebanyak 8.284 ekor, 2.330 ekor, dan 843 ekor. Hewan ternak kecil meliputi

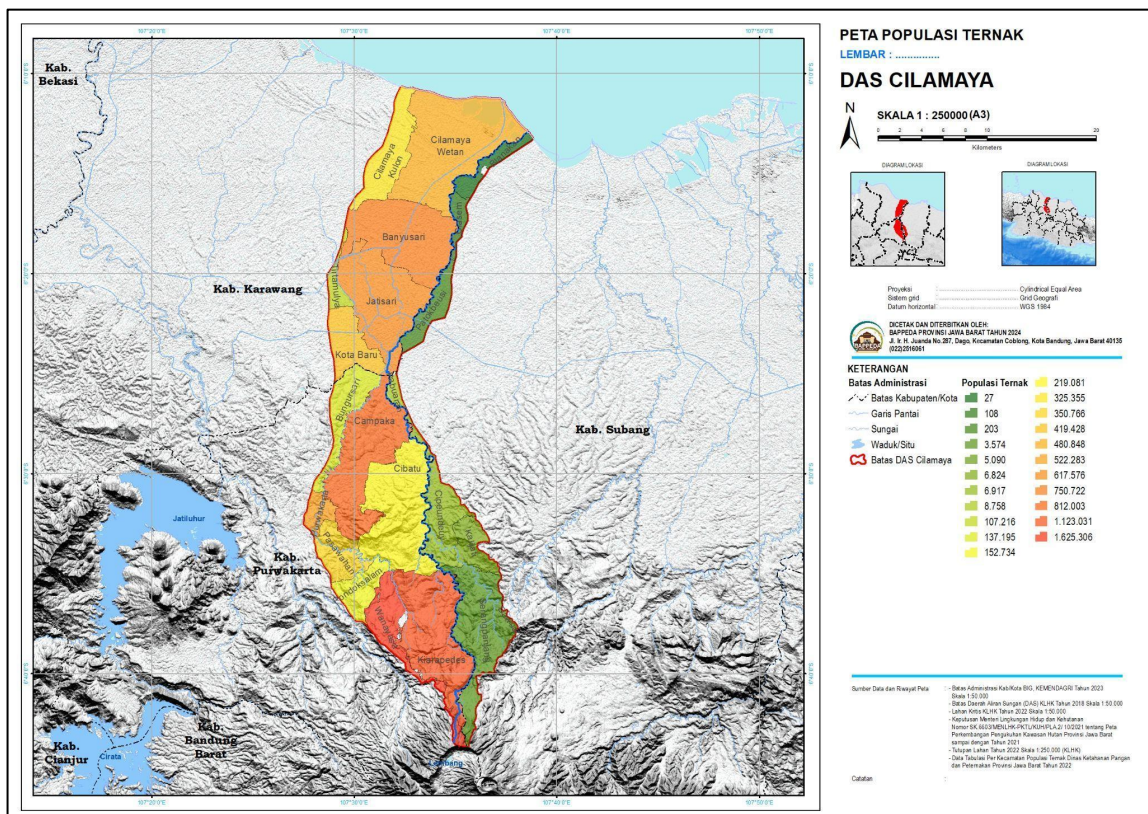
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

kambing dan domba dengan estimasi masing-masing populasi sebesar 100.129 ekor dan 529.139 ekor. Nilai estimasi didapatkan dari hasil perkalian antara data BPS dengan faktor pengali sebesar 0,33 yang berupa asumsi hilangnya sebagian populasi pertahun karena faktor konsumsi. Hewan ternak unggas meliputi ayam dan itik dengan masing-masing populasi sebanyak 4.509.404 ekor dan 382.073 ekor. Sebaran Populasi Ternak dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Peta Sebaran Populasi Ternak dalam Kabupaten pada DAS Cilamaya

Kegiatan peternakan di dalam DAS Cilamaya banyak terdapat di Kabupaten Purwakarta, yaitu di Kecamatan Bungursari, Campaka, Pondoksalam, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Purwakarta, dan Wanasaya, sedangkan di Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Ciasem, dan Pabuaran. Adapun di Kabupaten Karawang penyebaran ternak terdapat di Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan dan Jatisari. Kegiatan peternakan berdasarkan data BPS lebih banyak didominasi oleh hewan ternak berupa kambing, domba dan ayam. Banyaknya populasi hewan ternak di dalam DAS Cilamaya tentunya dapat berdampak pada potensi beban pencemaran. Perbandingan jumlah hewan ternak pada DAS Cilamaya ditunjukkan pada Tabel 2.3



Tabel 2.3 Jumlah Populasi Ternak di DAS Cilamaya

Kabupaten	Kecamatan	Sapi_Potong	Sapi_Perah	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Ayam_Buras	ayam_Ras_Petel	Ayam_Ras_Petelur	Itik	Babi	Jumlah	Luas_Wilayah
Jumlah													2,701,145	
Karawang	Banyusari	26	0	0	0	276	5,307	3,657	0	616,320	125,136	0	750,722	5,483
Karawang	Cilamaya Kulon	16	0	0	0	982	6,607	6,674	0	200,781	110,295	0	325,355	2,587
Karawang	Cilamaya Wetan	57	0	0	0	50	5,065	29,859	0	295,279	150,538	0	480,848	7,786
Karawang	Jatisari	43	0	0	0	503	4,352	9,322	0	428,413	174,943	0	617,576	5,469
Karawang	Kota Baru	152	0	9	0	872	7,989	5,668	0	367,385	37,353	0	419,428	2,006
Karawang	Tirtamulya	114	0	6	0	337	5,137	10,685	0	40,509	50,428	0	107,216	580
Jumlah													4,942,399	
Purwakarta	Bungursari	604	0	161	0	11,765	55,269	69,396	0	0	0	0	137,195	2,058
Purwakarta	Campaka	973	0	138	0	10,243	92,512	82,390	295,755	316,952	13,040	0	812,003	5,587
Purwakarta	Cibatu	814	0	704	0	19,800	118,452	75,536	0	0	3,775	0	219,081	5,949
Purwakarta	Kiarapedes	337	0	831	0	24,027	98,731	84,677	372,914	540,409	1,105	0	1,123,031	5,676
Purwakarta	Pasawahan	765	0	762	0	13,430	145,415	69,739	46,369	0	74,286	0	350,766	1,678
Purwakarta	Pondoksalam	178	0	905	0	12,302	68,299	59,012	0	0	12,038	0	152,734	1,424
Purwakarta	Purwakarta	352	0	235	22	9,773	80,045	53,499	0	338,090	40,267	0	522,283	746
Purwakarta	Wanayasa	386	0	820	11	15,813	150,823	96,637	0	1,351,293	9,523	0	1,625,306	2,176
Jumlah													31,501	
Subang	Blanakan	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	914
Subang	Ciasem	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	541
Subang	Cipeundeuy	5,867	0	50	0	50	50	100	150	250	400	0	6,917	2,597
Subang	Dawuan	1,393	2,920	37	0	37	37	74	111	185	296	0	5,090	79
Subang	Kalijati	4,802	48	94	0	94	94	188	282	470	752	0	6,824	1,257
Subang	Pabuaran	4,432	0	206	0	206	206	412	618	1,030	1,648	0	8,758	310
Subang	Patokbeusi	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	1,292
Subang	Serangpanjang	109	0	165	0	165	165	330	495	825	1,320	0	3,574	4,554
Total		21,758	2,968	5,123	33	120,725	844,555	657,855	716,694	4,498,191	807,143	0	7,675,045	

2.1.7 Industri

Kegiatan industri di dalam DAS Cilamaya berdasarkan data Survey dan Pemetaan Identifikasi Sumber Pencemar Air di Sungai Cilamaya Tahun 2019 menunjukkan jika konsentrasi lokasi industri banyak tersebar di Kabupaten Purwakarta, yaitu di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, dan Kiarapedes. Sebaran lokasi industri lainnya tersebar di Kabupaten Karawang, yaitu Kecamatan Banyusari, Cilamaya Wetan, dan Jatisari, serta di Kabupaten Subang, yaitu di Kecamatan Cipeundeuy. Jenis-jenis industri yang diusahakan berupa industri manufaktur, pakan ternak, dan kimia.

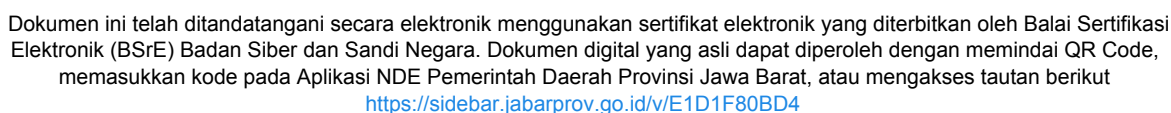
Titik lokasi industri yang berada di dalam DAS Cilamaya terletak di sekitar sempadan anak sungai Cilamaya. Data persebaran industri tersebut menunjukkan jika limbah yang dihasilkan oleh industri berpotensi sebagai beban pencemar sungai Cilamaya. Lokasi industri juga terletak mengelompok membentuk suatu kawasan industri yang ditunjukkan dalam Gambar 2.8.



2.1.8 Usaha Skala Kecil

2.2 SEGMENTASI DAS CILAMAYA

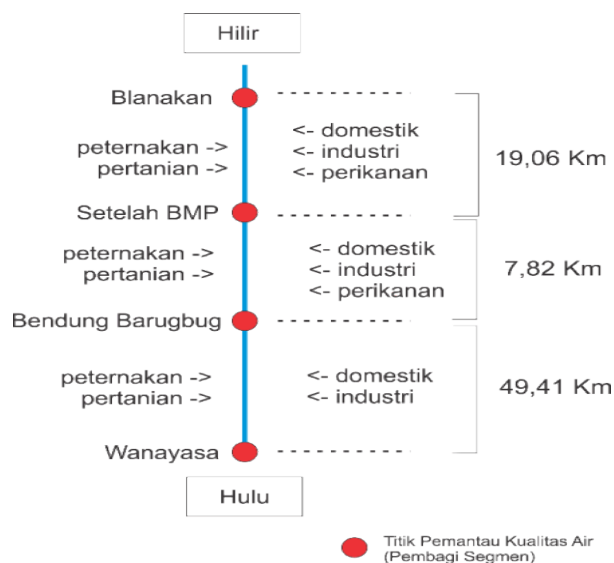
Panjang segmen sungai Cilamaya secara keseluruhan terbagi menjadi empat bagian. Pembagian panjang segmen didasarkan atas titik-titik pemantauan kualitas air di sepanjang aliran sungai Cilamaya. Panjang sungai Cilamaya secara keseluruhan sebesar 83,77 Km, yang kemudian terbagi menjadi empat ruas segmen, yaitu:



1. Ruas segmen 1 : Cilamaya – Wanayasa (49,41 Km)
2. Ruas segmen 2 : Bendung Barugbug (7,82 Km)
3. Ruas segmen 3 : Setelah BMP (19,06 Km)
4. Ruas segmen 4 : Blanakan (7,46 Km)

Ruas segmen 1 membentang di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang meliputi beberapa kecamatan di dalamnya. Ruas segmen 1 sungai Cilamaya terdapat beberapa sumber pencemar yang dominan, yaitu domestik, peternakan, dan industri. Sumber pencemar industri terpusat di Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Cipeundeuy, sedangkan sumber pencemar domestik dan peternakan tersebar di semua kecamatan. Ruas segmen 2 sungai Cilamaya terdapat Bendungan Barugbug yang mengalirkan sebagian air sungai Cilamaya menuju banjir kanal. Panjang ruas segmen 2 sungai Cilamaya sebesar 7,82 Km.

Sumber pencemar sungai Cilamaya di ruas segmen 2 berasal dari dua kabupaten, yaitu sebagian Kabupaten Karawang dan sebagian Kabupaten Subang yang didominasi oleh sumber pencemar berupa limbah domestik dan limbah *non point source* seperti pertanian. Ruas segmen 3 sungai Cilamaya terbentang sepanjang 19,06 Km yang dimulai dari setelah BMP. Ruas segmen 3 sungai Cilamaya memiliki sumber pencemar yang serupa dengan ruas segmen 2, yaitu didominasi oleh limbah domestik dan limbah *non point source* seperti pertanian. Ruas segmen 4 merupakan ruas segmen terakhir yang diawali dari Kecamatan Blanakan dengan panjang ruas 7,46 Km. Ruas segmen 4 banyak mendapatkan beban pencemar yang berasal dari limbah domestik, limbah *non point source* seperti pertanian serta perikanan. Skema segmentasi sungai Cilamaya secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.9, sedangkan Peta segmentasi ruas sungai Cilamaya disajikan pada Gambar 2.10.



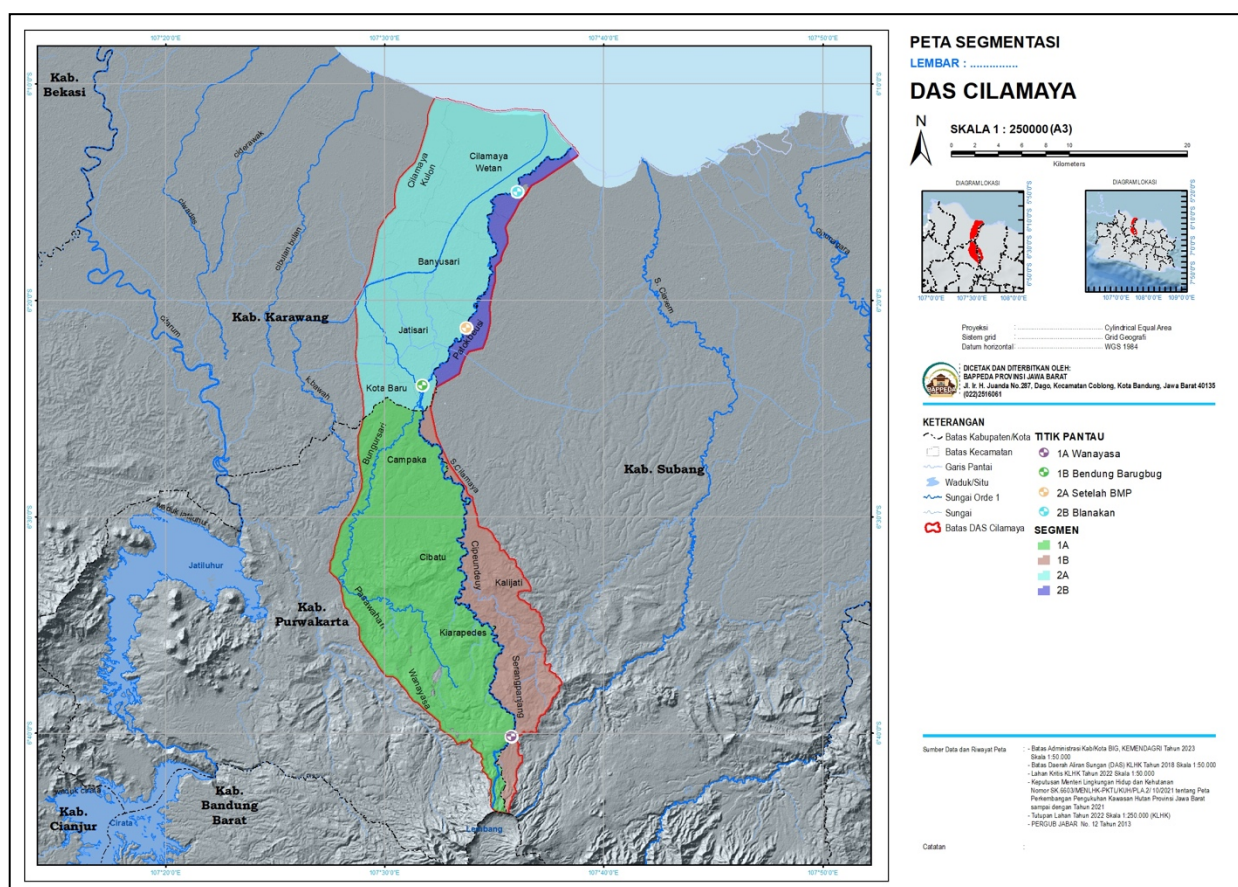
Gambar 2.9 Skema Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



Gambar 2.10 Peta Segmentasi Ruas Sungai Cilamaya

2.3 PERMASALAHAN DARI SUMBER PENCEMAR

2.3.1 Sumber Pencemar Domestik

Sumber pencemar domestik terdiri dari 2 hal yaitu dari limbah domestik yang dihasilkan maupun dari beban pencemar persampahan. Potensi beban pencemar domestik ini mempertimbangkan luasan wilayah permukiman yang menjadi lokasi penduduk bertempat tinggal dan menghasilkan limbah domestik. Adapun potensi beban pencemaran dari limbah domestik memperhitungkan jumlah penduduk, faktor emisi domestik rumah tangga (Tabel 2.4), rasio ekivalen untuk suatu wilayah (kota, pinggiran kota, dan pedalaman), serta jarak lokasi terhadap sungai.

Tabel 2.4 Faktor emisi (*generation load*) domestik rumah tangga

No.	Parameter Pencemar	Faktor Emisi (gr/hr)
1	TSS	38
2	BOD	40
3	COD	55
4	Minyak&lemak	1,22



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Parameter Pencemar	Faktor Emisi (gr/hr)
5	Detergen	0,189
-	E-coli	3.00E+14

Sumber : Puslitbang SDA, Irianto dan Iskandar, 2007

Sedangkan potensi beban pencemar dari sumber persampahan memperhitungkan besarnya sampah yang masuk ke sungai dengan asumsi bahwa kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah tersebut terbatas atau belum/tidak tertangani. Sehingga dari sampah yang tidak tertangani tersebut dapat diperkirakan besaran BOD yang mencemari sungai.

2.3.2 Sumber Pencemar Industri

Sumber pencemar dari industri memperhitungkan konsentrasi jenis pencemar industri dalam buangan air limbah berdasarkan data pemantauan di lapangan, laju aliran buangan air limbah setiap jam nya, jumlah jam operasional per tahun. Hal ini akan dapat diminimalisir dengan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah yang akan memfilter hasil dari air limbah industri yang dihasilkan, sehingga dapat meminimalisir potensi beban pencemar industri ke air sungai, terkhusus adalah industri besar.

Selain beban pencemar dari industri besar, juga termasuk beban pencemar dari industri usaha kecil dan menengah. Beban pencemaran dari usaha skala kecil, termasuk di wilayah ini umumnya memperhitungkan kapasitas produksi dan faktor emisi dari usaha kegiatan pabrik tahu dan tempe yang menggunakan bahan baku kedelai yang disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Faktor emisi (FE) industri tahu

Parameter	Beban pencemaran (gr) per kg bahan baku kedelai
BOD	50
COD	110
TSS	80

2.3.3 Sumber Pencemar Peternakan

Sumber pencemar peternakan memperhitungkan jenis dan jumlah populasi hewan ternak dalam satuan wilayah desa/kelurahan karena setiap



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

jenis ternak akan menghasilkan faktor emisi tertentu pada parameter BOD; COD; Total N; dan Total P sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Faktor emisi ternak (*generation load*)

Parameter	Jenis Ternak (gr)								
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Domba	Kambing	Ayam	Angsa	Bebek
BOD	292	207	226	128	55.7	34.1	2.36	2.46	0.88
COD	717	530	558	362	136	92.9	5.59	6.67	2.22
Total N	0.933	2.6	38.083	4.622	0.278	1.624	0.002	0.061	0.001
Total P	0.153	0.39	0.306	0.276	0.063	0.115	0.003	0.006	0.005

Sumber : BLK-PSDA, 2013 dalam KLHK 2017

Berdasarkan hasil penelitian BLK-PSDA (2004), di Indonesia rata-rata beban pencemar yang masuk ke badan air dari kegiatan peternakan sekitar 20%. Sehingga potensi beban pencemarnya dihitung berdasarkan pengalihan jumlah ternak, faktor emisi yang kemudian dikalikan 20% tadi.

2.3.4 Sumber Pencemar Perikanan

Sumber pencemar dari perikanan ini mempertimbangkan tingkat produksi ikan air tawar dalam suatu kecamatan. Hal tersebut pastinya diikuti oleh jumlah pakan ternak yang menghasilkan beban pencemar air sungai.

2.3.5 Sumber Pencemar *Non Point Source* (NPS)

Sumber pencemar *Non Point Source* (NPS) terdiri atas potensi beban pencemar yang berasal dari kegiatan pertanian, serta berasal dari wilayah terbangun. Perhitungan beban pencemaran pertanian terdiversifikasi menjadi tiga jenis, yaitu sawah, kebun, dan ladang. Perhitungan beban pencemaran pertanian dilakukan dengan mengalikan luasan penggunaan lahan pertanian setiap desa dengan faktor emisi masing-masing kegiatan pertanian. Rata-rata beban pencemar pertanian yang masuk ke badan air (*delivery load*) di Indonesia sekitar 10% dari sawah dan 1% dari palawija dan perkebunan lainnya. Adapun faktor emisi dari pertanian disajikan dalam Tabel 2.7. Sedangkan perhitungan beban pencemaran dari wilayah terbangun adalah dengan mengalikan luasan lahan terbangun pada setiap desa yang didasarkan atas lahan permukiman dan bangunan, artinya dilihat terhadap



lahan yang masih bersifat hutan dan yang memang sudah terbangun sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2.7 Faktor emisi pertanian (*generation load*)

Parameter	Sawah	Palawija	Perkebunan Lain / Tegalan / Kebun Campuran
BOD	225	125	32,5
TN	20	10	3
T-P	10	5	1,5
TSS	0,46	2,4	1,6
Pestisida	0,16	0,08	0,025

Sumber : BLK-PSDA, 2004

Tabel 2.8 Faktor emisi *Non Point source* dari penggunaan lahan (*generation load*)

Parameter	Hutan (kg/ha/hr)	Lahan terbangun (kg/ha/hr)
BOD	9,32	15,34
T-N	21,92	18,90
T-P	1,37	0,55

Sumber: ICWRMIP (2015)

2.4 POTENSI BEBAN PENCEMARAN

Pada inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar di beberapa segmen DAS Cilamaya dibatasi dengan menghitung beberapa parameter dari beban pencemar yang utama, yaitu BOD, COD, dan TSS. Ketiga parameter ini digunakan dengan mempertimbangkan jika parameter tersebut dapat mewakili karakteristik dari berbagai sumber pencemar yang ada.

Berdasarkan sumber pencemar yang telah dijelaskan sebelumnya dan kondisi gambaran umum DAS Cilamaya, maka potensi beban pencemar pada laporan ini terdiri atas 5 sektor, yaitu sektor poin berupa industri, serta sektor non poin yang terdiri atas domestik, peternakan, pertanian, dan perikanan. Kelima sumber pencemar tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi karena

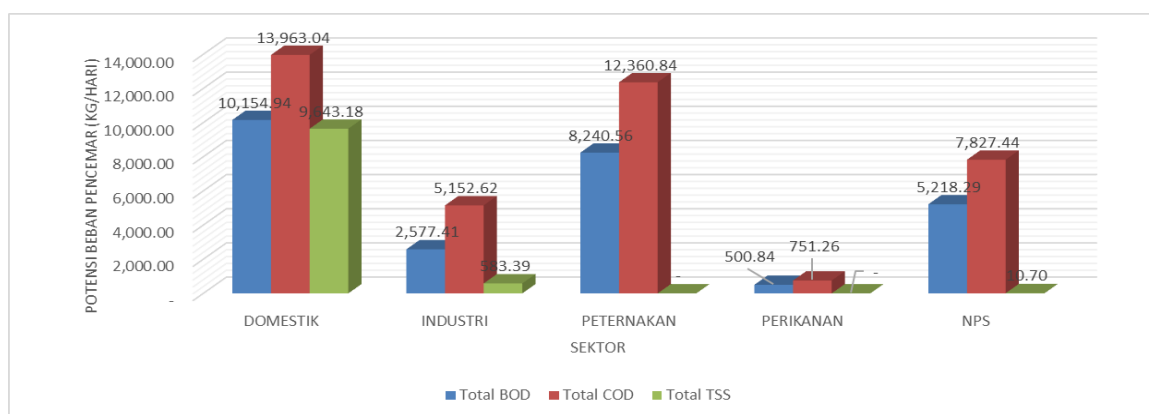


E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

berpotensi terhadap beban pencemar yang terjadi di sungai Cilamaya.

Hasil perhitungan potensi beban pencemaran di DAS Cilamaya secara keseluruhan untuk parameter BOD adalah sebesar 26.692,04 Kg/hari, sedangkan potensi beban pencemaran untuk parameter COD adalah sebesar 40.055,2 Kg/hari. Adapun potensi beban pencemaran dalam parameter TSS adalah sebesar 10.237,26 Kg/hari yang disajikan dalam gambar profil beban pencemar BOD, COD, dan TSS menurut sektor sumber pencemarnya pada DAS Cilamaya (Gambar 2.11).



Gambar 2.11 Sektor Potensi Beban Pencemaran di DAS Cilamaya

Terlihat pada Gambar 2.10 bahwa sektor yang paling dominan sebagai beban pencemar pada DAS Cilamaya berasal dari kegiatan domestik, kemudian disusul oleh sektor peternakan, sektor pertanian (NPS), sektor industri, dan sektor perikanan. Kegiatan industri yang beroperasi dalam membuang limbahnya ke sungai Cilamaya menjadi penyumbang kecil, yaitu berupa usaha besar hingga usaha lain seperti hotel, rumah sakit, serta USK tahu-tempe. Rekapitulasi hasil perhitungan potensi beban pencemar BOD, COD, dan TSS menurut sumber pencemarnya dalam DAS Cilamaya disajikan dalam tabel 2.9.

Tabel 2.9 Potensi Beban Pencemar Berdasarkan Sumbernya

No.	Segmen	Kabupaten	Sumber / Sektor	Potensi Beban Pencemaran BOD		Potensi Beban Pencemaran COD		Potensi Beban pencemaran TSS	
				Beban Pencemar BOD (Kg/hari)	Kontribusi Beban BOD (%)	Beban Pencemar COD (Kg/hari)	Kontribusi Beban COD (%)	Beban Pencemar TSS (Kg/hari)	Kontribusi Beban TSS (%)
1	1A	Purwakarta	Domestik ¹	4896,39	35,61%	6732,54	32,18%	4650,45	99,93%
			Industri ²	1942,53	14,13%	3820,70	18,26%	0,00	0,00%
			Peternakan	5530,16	40,22%	8295,24	39,65%	0,00	0,00%
			Perikanan ³	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Segmen	Kabupaten	Sumber / Sektor	Potensi Beban Pencemaran BOD		Potensi Beban Pencemaran COD		Potensi Beban pencemaran TSS	
				Beban Pencemar BOD (Kg/hari)	Kontribusi Beban BOD (%)	Beban Pencemar COD (Kg/hari)	Kontribusi Beban COD (%)	Beban Pencemar TSS (Kg/hari)	Kontribusi Beban TSS (%)
			NPS ⁴	1380,24	10,04%	2070,36	9,90%	3,28	0,07%
			Total	13749,32	100,00%	20918,84	100,00%	4653,73	100,00%
2	2A	Karawang	Domestik ¹	2636,29	48,76%	3624,90	46,03%	2502,43	92,72%
			Industri ²	137,87	2,55%	301,02	3,82%	194,23	7,20%
			Peternakan	839,79	15,53%	2321,86	29,48%	0,00	0,00%
			Perikanan ³	494,97	9,15%	742,46	9,43%	0,00	0,00%
			NPS ⁴	1298,15	24,01%	1947,22	24,73%	2,29	0,08%
			Total	5407,07	100,00%	7875,28	100,00%	2698,95	100,00%
3	1B dan 2B	Subang	Domestik ¹	2622,25	34,80%	3605,60	32,02%	2490,30	99,79%
			Industri ²	497,01	6,60%	1030,90	9,15%	0,00	0,00%
			Peternakan	1870,61	24,82%	2805,91	24,92%	0,00	0,00%
			Perikanan ³	5,87	0,08%	8,81	0,08%	0,00	0,00%
			NPS ⁴	2539,91	33,71%	3809,86	33,83%	5,12	0,21%
			Total	7535,65	100,00%	11261,08	100,00%	2495,42	100,00%

Dari tabel diatas apabila dilihat lebih rinci terkait profil beban pencemaran BOD, maka diketahui total potensi beban pencemar BOD pada DAS Cilamaya adalah sebesar 26.692,04 Kg/hari. Besaran potensi beban pencemar tersebut disumbang dari sumber domestik kegiatan rumah tangga dari permukiman penduduk (termasuk beban sampah) sebesar 10.154,94 Kg/hari, dari sumber poin (industri, rumah sakit, hotel, dan Usaha Skala Kecil) sebesar 2.577,41 Kg/hari, dari sumber kegiatan peternakan sebesar 8.240,56 Kg/hari, dari *non point source* (NPS) sebesar 5.218,29 Kg/hari, dan sumber dari usaha perikanan sebesar 500,84 Kg/hari.

Hasil perhitungan potensi beban pencemar BOD pada DAS Cilamaya, teridentifikasi kontribusi beban pencemar BOD yang berasal dari sektor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

domestik sebesar 38,04%, sektor peternakan sebesar 30,87%, sektor NPS sebesar 19,55%, sektor industri sebesar 9,66%, dan sektor perikanan sebesar 1,88%. Sektor industri merupakan gabungan dari beberapa jenis usaha seperti industri, Usaha Skala Kecil, rumah sakit, dan hotel. Hasil perhitungan beban pencemar BOD di segmen wilayah DAS Cilamaya dapat dilihat dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Kontribusi Beban Pencemar BOD pada Beberapa Sektor di DAS Cilamaya

Segmen	Kabupaten	Kecamatan	Potensi Beban Pencemaran BOD di DAS Cilamaya (Kg/Hr)					
			Domestik	Industri	Peternakan	Perikanan	NPS	Total
1A	Purwakarta	Bungursari	7427,21	-	393,91	-	95,11	916,24
		Campaka	862,83	230,09	1.203,84	-	308,97	2.605,73
		Cibatu	879,63	1.556,03	1.109,36	-	323,69	3.868,70
		Kiarapedes	623,88	156,41	1.337,81	-	267,44	2.385,54
		Pasawahan	602,13	-	564,27	-	160,13	1.326,53
		Pondok Salam	127,91	-	150,92	-	52,09	330,92
		Purwakarta	1.210,25	-	433,94	-	80,85	1.725,05
		Wanayasa	162,55	-	336,11	-	91,96	590,61
Purwakarta Total			4.896,39	1.942,53	5.530,16	-	1.380,24	13.749,32
1A Total			4.896,39	1.942,53	5.530,16	-	1.380,24	13.749,32
1B	Subang	Cipeundeuy	289,00	496,95	615,60	1,69	144,06	1.547,30
		Dawuan	0,41	-	-	0,02	0,44	0,86
		Kalijati	49,48	-	276,18	0,50	37,79	363,95
		Pabuaran	171,78	-	229,33	0,02	184,11	585,23
		Serangpanja ng	175,54	-	426,80	-	186,84	789,18
Subang Total			686,21	496,95	1.547,91	2,23	553,24	3.286,53
1B Total			686,21	496,95	1.547,91	2,23	553,24	3.286,53
2A	Karawang	Banyusari	530,89	6,68	24,16	18,19	359,60	939,52
		Cilamaya Wetan	464,72	34,27	71,77	435,35	140,85	1.146,96



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Segmen	Kabupaten	Kecamatan	Potensi Beban Pencemaran BOD di DAS Cilamaya (Kg/Hr)					
			Domestik	Industri	Peternakan	Perikanan	NPS	Total
		Jatisari	1.301,90	96,92	570,90	33,49	640,63	2.643,84
		Kotabaru	338,78	-	172,97	7,45	157,06	676,26
Karawang Total			2.636,29	137,87	839,79	494,97	1.298,15	5.407,07
2A Total			2.636,29	137,87	839,79	494,97	1.298,15	5.407,07
2B	Subang	Blanakan	644,93	-	23,69	0,73	540,10	1.209,45
		Ciasem	583,60	-	113,98	1,14	654,89	1.353,60
		Patokbeusi	707,52	0,06	185,04	1,77	791,68	1.686,06
Subang Total			1.936,05	0,06	322,70	3,64	1.986,67	4.249,12
2B Total			1.936,05	0,06	322,70	3,64	1.986,67	4.249,12
Grand Total			10.154,94	2.577,41	8.240,56	500,84	5.218,29	26.692,04
%			38,04%	9,66%	30,87%	1,88%	19,55%	100,00%

2.5 PERMASALAHAN

DLH Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah melakukan kajian identifikasi permasalahan DAS Cilamaya. Berdasarkan hasil inventarisasi sumber pencemar, dan hasil kajian identifikasi permasalahan DAS Cilamaya tersebut didapatkan potensi sumber pencemar di DAS Cilamaya adalah sebagai berikut :

1. Segmen Kabupaten Karawang

Di Kabupaten Karawang ada beberapa potensi sumber pencemar diantaranya adalah :

- Industri : Sungai Cilamaya sebagai badan air penerima polusi pencemaran air
- Permukiman : Permukiman sebagai penghasil pencemaran air limbah domestik di badan air Sungai Cilamaya
- Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida
- Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan langsung digunakan sebagai pupuk
- Usaha Kecil Mikro : beberapa industri menghasilkan limbah diatas baku mutu lingkungan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

2. Segmen Kabupaten Purwakarta

Di Kabupaten Purwakarta ada beberapa potensi sumber pencemar diantaranya adalah :

- a) Industri : beberapa industri di Kabupaten Purwakarta air limbahnya masih melebihi baku mutu lingkungan dan Sungai Cilamaya sebagai badan air penerima polusi pencemaran air
- b) Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida
- c) Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan langsung digunakan sebagai pupuk

3. Segmen Kabupaten Subang

Di Kabupaten Subang ada beberapa potensi sumber pencemar diantaranya adalah :

- a) Pertanian : Pencemaran Limbah Pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida
- b) Peternakan : Pencemaran kotoran limbah ternak yang tidak diolah dan langsung digunakan sebagai pupuk
- c) Usaha Kecil Mikro : Jenis UMKM di Kabupaten Subang meliputi UMKM sofa, UMKM tahu tempe yang dapat memberikan beban organik ke sungai Cilamaya.

Secara garis besar permasalahan DAS Cilamaya dilihat dari perspektif daya dukung air dan lahan, serta tata kelola kelembagaan dan penegakan hukum disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Permasalahan DAS Cilamaya

No	Aspek	Permasalahan Utama	Akar Permasalahan
I	Daya Dukung Air		
1	Pendayagunaan Sumber Daya Air	Degradasi kuantitas sumber daya air	1. Penurunan luas kawasan resapan air (catchment area) akibat meningkatnya kerusakan lahan 2. Berkurangnya fungsi sungai sebagai penyedia air baku akibat erosi dan sedimentasi, pencemaran oleh limbah pertanian dan peternakan, serta penggunaan lahan di sempadan sungai.
		Degradasi kualitas sumber daya air	1. Pencemaran air akibat pembuangan air limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, sampah domestik/B3 ke sungai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No	Aspek	Permasalahan Utama	Akar Permasalahan
			2. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi air limbah domestik yang layak 3. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat rendah akibat meningkatnya permukiman kumuh di sekitar sungai dan pembinaan masyarakat yang tidak optimal 4. Penerapan produksi bersih untuk industri tidak optimal, lemahnya ketaatan industri besar untuk memiliki dan mengoperasikan IPAL, kurangnya pengawasan perizinan dan dukungan pemerintah terhadap industri kecil yang tidak mampu memiliki dan mengoperasikan IPAL 5. Penerapan sistem pertanian ramah lingkungan yang tidak optimal akibat kurang efektifnya pembinaan masyarakat 6. Tidak terkelolanya limbah peternakan akibat belum adanya IPAL terpadu, belum optimalnya pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk, serta kawasan peternakan yang tidak tertata dan sisa pakan ikan pada budidaya perikanan 7. Sampah domestik dan B3 kurang terkelola akibat keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, serta kurangnya upaya pengurangan sampah dan penerapan 3R/komposting 8. Limbah B3 dibuang bersama sampah domestik akibat belum adanya kelembagaan, sarana dan prasarana limbah B3 dari aktivitas domestik, industri kecil dan rumah sakit
2	Daya Rusak Air	Peningkatan frekuensi dan risiko bencana banjir dan longsor	1. Peningkatan luas lahan kritis akibat alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman liar 2. Penurunan luas kawasan resapan air (catchment area) akibat kerusakan lahan 3. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat degradasi luasan hutan yang disebabkan kebakaran dan gangguan



No	Aspek	Permasalahan Utama	Akar Permasalahan
			keamanan hutan, serta peningkatan aktivitas dan penggunaan lahan di sempadan sungai 4. Berkurangnya fungsi sungai sebagai penampung air akibat erosi dan sedimentasi 5. Peningkatan erosi dan sedimentasi di sungai akibat berkurangnya tutupan vegetasi 6. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pengendalian banjir 7. Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor
II	Daya Dukung Lahan	Kerusakan lahan dan penurunan produktivitas lahan	1. Peningkatan luas lahan kritis yang disebabkan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman liar. 2. Ketidaksesuaian tata guna lahan dengan rencana tata ruang serta lemahnya upaya pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang
III	Tata Kelola Kelembagaan	Tata kelola kelembagaan dari sisi perencanaan, riset, kolaborasi multipihak, edukasi dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	1. Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan/masterplan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk penyediaan lahan 2. Masih lemahnya tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah, penanganan limbah industri kecil, peternakan dan perikanan, serta penanganan lahan kritis di lahan milik masyarakat 3. Tumpang tindih peran stakeholder dan belum optimalnya upaya kolaborasi multipihak, termasuk kolaborasi sumber pendanaan 4. Belum optimalnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa 5. Belum optimalnya upaya pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan melalui forum dan komunitas 6. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No	Aspek	Permasalahan Utama	Akar Permasalahan
			efektif, serta mekanisme insentif dan disinsentif 7. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi berbasis teknologi untuk masyarakat, serta kehumasan 8. Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
IV	Penegakan Hukum	Penegakan hukum lingkungan belum optimal	1. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam menindaklanjuti kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Belum optimalnya pengawasan melalui peran dan fungsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Kurangnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

2.5.1 Sektor Peternakan

Data survei lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan di DAS Cilamaya di sektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.12. Sebagian besar peternakan di wilayah tersebut masih berskala kecil hingga menengah, dengan dominasi ternak ayam dan domba. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas pengolahan limbah, yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan peternakan berkelanjutan. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa permasalahan dari sektor peternakan adalah limbah kotoran hewan dari peternakan sebagian besar tidak diolah terlebih dahulu dan langsung dibuang ke lingkungan. Sebagian warga memanfaatkan kotoran hewan menjadi pupuk kandang namun tidak diolah terlebih dahulu karena kurangnya pengetahuan mengenai cara mengolah limbah ternak. Pada saat musim hujan yang terjadi adalah terjadinya luapan air di kolam di sekitar peternakan ke area pertanian. Hal ini menjadi beban organik yang tinggi di Sungai Cilamaya.



Tabel 2.12 Data sebaran Peternakan di DAS Cilamaya

KECAMATAN	DESA	Alamat (RT/RW)	JENIS TERNAK	JUMLAH	KETERSEDIAAN UNIT PENGOLAHAN LIMBAH
Cipendeuy	Cimayasari	Cihuni RT.13	Ayam Pedaging	25000	ada
		Ciranji RT.9	Ayam petelur	25000	ada
		Cihuni RT.16	Domba Kuda	50 3	ada
Cipendeuy	Cipendeuy	RW.06	Domba	20	Tidak ada
Cipendeuy	Karangmukti	Sukatani	Ayam kampung Domba	300	Tidak ada
Cipendeuy		Ciomas Kidul	Ayam Buras Domba	1500	Tidak ada
Cipendeuy		Ciomas Kaler	Domba	500	Tidak ada
Cipendeuy		Sukamukti	Sapi	75	Tidak ada
Pabuaran	Balebandung Jaya	bojong sari kidul	ayam	5 ekor	Tidak ada
		bojong sari tengah	kambing	2 ekor	Tidak ada
Jatisari	Barugbug	Dusun 1	Ayam	100.000 ekor	Ada
Campaka	Kertamukti	RT 10 RW 03	Domba dan kambing	±400 ekor	Tidak ada
Campaka	Cijunti	Tersebar di 5 RW	Sapi	±22 ekor	Tidak ada
			Domba	±18 ekor	Tidak ada
			Ikan	±12 bioflok	Tidak ada
Campaka	Cisaat	Tersebar di 5 RW	Ayam, bebek, kambing, sapi	ND	Tidak ada
Patokbeusi	Tanjungrasa Kidul	Dsn Bakan Asem 1	ayam	10.000 ekor	Tidak ada
	Tanjung rasa	Dsn. Tanjung	Ayam	40.000 ekor	Tidak ada
		Dsn.Kondang	Ayam	80.000 ekor	Tidak ada



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

KECAMATAN	DESA	Alamat (RT/RW)	JENIS TERNAK	JUMLAH	KETERSEDIAAN UNIT PENGOLAHAN LIMBAH
Patok besi	Jatiragas hilir	RT 29 RW 11	Ayam	13.000 ekor	Ada
Cilamaya Wetan	Tegalwaru	Dsn Tegalwaru	Domba	40 Ekor	Tidak ada
		Dsn Cipancuh	Sapi	1 Ekor	Tidak ada
		Dsn Ondang 2	Bebek	1000 Ekor	Tidak ada
Cilamaya Wetan	Cilamaya	Dsn Ketimpal	Kambing	100 Ekor	Tidak ada
		Dsn Pasar 2	sapi	3 Ekor	Tidak ada
Ciasem	Sukahaji	Dsn Krajan	Domba	28 ekor	Tidak ada
		Dsn Rawajolang	Domba	39 ekor	Tidak ada
			Sapi	3 ekor sapi	Tidak ada
Ciasem	Pinangsari	Cibatu Hilir	Domba	35 ekor	Tidak ada
		Wanasari	Domba	45 ekor	Tidak ada
		Cibatu Girang	Domba	56 ekor	Tidak ada
Blanakan	Cilamaya Hilir	Balok	Ayam	1-10	Tidak ada
		Wanakersa	Ayam	1-10	Tidak ada
		Kemurang	Ayam	1-10	Tidak ada
Blanakan	Cilamaya Girang	Dsn Bojong	Ayam	15-20 Ekor	Tidak ada
		Dsn Krajan	Ayam	15-20 Ekor	Tidak ada
		Dsn Mekarwangi	Ayam	15-20 Ekor	Tidak ada
		Dsn Muara Baru	Ayam	15-20 Ekor	Tidak ada

2.5.2 Sektor Industri

Data survei lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi permasalahan di DAS Cilamaya di sektor industri dapat dilihat pada Tabel 2.13. Permasalahan di sektor industri antara lain ada beberapa industri yang masih membuang limbah melebihi baku mutu dan ada yang membuat bypass untuk membuang limbahnya. Beberapa industri masuk dalam data penegakan hukum lingkungan oleh Pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat. Adapun data jumlah penegakan hukum yang telah dilakukan di industri DAS Cilamaya pada tahun 2020- 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Tabel 2.13 Data Industri di DAS Cilamaya

Kecamatan	Desa	Alamat (RT/RW)	Industri	Kegiatan
Cipendeuy	Cipendeuy	Dusun Tarikolot	PT Papertech Indonesia	Kertas
			PT Cottonindo Ariesta	Kapas
		Dusun Cibeunying	PT Aipraya Beton	Beton
			PT Tiga Kyung Seung	Garmen
			PT Kondobo	Benang
			PT Lintas	Penggulung Benang
		RW.04	PT Crevis	Garmen
Cipendeuy	Karangmukti	Dusun Sukamukti	PT Wika Beton	Beton
			PT Trimulya	Textile
			PT Texmaco	Manufacture
			PT Nishogiken Indonesia	Spare part Motor
		Dusun Ciomas Kaler	PT Yung Won Indonesia	Garmen
		Dusun Sukatani	PT Supreme Paper Solution	Kertas
			PT Mohgatech	Baja Tempa
		Dusun Ciomas	PT Texpia International	Garmen
		Dusun Ciomas Kidul	PT Solve It	Garmen
Jatisari	Situdam	Dusun 1	CV	pembersihan beras
Jatisari	Cikalong	Dusun 3	PT.ABB	Produksi gula
Campaka	Kertamukti	RT 04 RW 02	PT. Standard Biosensor Healthcare	Alat-alat kesehatan
			PT. Ongpin Jaya Indonesia	Pabrik alat <i>camping</i>
			PT. Velasto Indonesia (anak perusahaan Astra Otoparts Tbk.)	manufaktur komponen otomotif berbahan dasar karet
			PT. Sinar Agro Tjipta	
Campaka	Kertamukti	RT 06 RW 03	PT. H Anugrah Nusantara	Jasa pengangkutan LB3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

Kecamatan	Desa	Alamat (RT/RW)	Industri	Kegiatan
Campaka	Cijunti	Tersebar di 5 RW	PT. SH Garment	Pabrik kain (garment)
			PT. Sweet Greens Indonesia	Produksi Melon
			PT. Koin World Metal	Manufactur
Campaka	Cisaat	Tidak Ada Industri (Zona Hijau)		
Patokbeusi	Tanjung rasa		BMP	Produksi tepung beras,minyak sayur
Banyu sari	Gempol Kolot		Pabrik Pupuk Kompos	Produksi Pupuk Kompops
Cilamaya Wetan	Cilamaya		PLTGU	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
			PERTAMINA	Minyak dan Gas

Tabel 2.14 Data Penegakan Hukum yang telah dilakukan di DAS Cilamaya

Kabupaten	Jumlah Penegakan Hukum	Keterangan
Purwakarta	20 Perusahaan	6 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Jabar dan 1 perusahaan saluran <i>bypass</i>
		4 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Purwakarta (3 Rekomendasi SA dari DLH Jabar)
		1 Sanksi Administrasi Teguran Tertulis oleh DLH Kab. Purwakarta
		9 Perusahaan dalam progress penegakan hukum
Subang	5 Perusahaan	1 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Jabar dan 1 perusahaan saluran <i>bypass</i>
		4 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Subang (3 Rekomendasi SA dari DLH Jabar)
Karawang	1 Perusahaan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Karawang (Rekomendasi SA dari DLH Jabar)

2.5.3 Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Data survei lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi permasalahan di Sektor UMKM dilihat dari kepemilikan alat pengolahan limbahnya sebagaimana Tabel 2.15. dari Tabel tersebut terlihat permasalahan di sektor UMKM adalah minimnya pembinaan dari pemerintah setempat mengenai pengolahan limbah dan masih sedikit yang memiliki unit pengolahan air limbah. Limbah cair domestik yang dihasilkan di sektor UMKM belum dapat diinventarisasi jumlahnya namun apabila di masa depan ada penambahan sektor UMKM yang signifikan di DAS Cilamaya perlu dilakukan pembinaan yang terstruktur



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

dan terintegrasi agar beban pencemar dan daya tampung Sungai Cilamaya masih memenuhi syarat.

Tabel 2.15 Hasil survei lapangan di sektor UMKM

KECAMATAN	DESA	Alamat (RT/RW)	JENIS UMKM	JENIS DAN JUMLAH BAHAN BAKU(KG/BLN)	MEMILIKI UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Cipendeuy	Cimayasari	Dusun Ciistal	Produksi Keripik	Piang 50 KG Singkong 50 KG	Ada
			Produksi Tahu	Kedelai 100 KG	Ada
Pabuaran	Balebandung Jaya	bojong sari kidul RT02 RW01	Percetakan Bata dan genteng	tanah liat	Tidak ada
Jatisari	Barugbug	Dusun 1	Penggilingan padi	padi	Ada
		Dusun 1	pengolahan limbah kain	limbah kain	Ada
Jatisari	Situdam	Dusun 1	Penggilingan padi	padi	Ada
		Dusun 2	Penggilingan padi	padi	Ada
		Dusun 3	penggilingan padi	paadi	Ada
jatisari	Cirejag	Dusun 1	pembuatan Tahu	kedelai 50 kg /hari	Ada
		Dusun 3	budi daya jamur merang	jerami	Ada
Jatisari	Jatiwagi		warung/toko	sembako	Tidak ada
Campaka	Kertamukti	RT 07 RW 03	Produksi makanan ringan (<i>home industry</i>) dengan produk keripik pisang, keripik singkong, keripik kelapa	Bahan makanan (pisang, singkong, kelapa)	Tidak ada
			Pengepul barang-barang bekas (sampah plastik)	Sampah plastik dari limbah domestik	Tidak ada
Campaka	Cijunti	Tersebar di 5 RW	Produksi topi	Sisa kain dari pabrik garment	Tidak ada
			Produksi bantal dan guling	Ada supplier	Tidak ada



KECAMATAN	DESA	Alamat (RT/RW)	JENIS UMKM	JENIS DAN JUMLAH BAHAN BAKU(KG/BLN)	MEMILIKI UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH
			Produksi makanan ringan (home industry) dengan opak singkong	Bahan makanan (singkong)	Tidak ada
Campaka	Cisaat	Tersebar di 5 RW	Keripik Pisang	Bahan Makanan (pisang)	Tidak ada
			Keripik Singkong	Bahan makanan (singkong)	Tidak ada
			Kue Basah	Bahan pembuatan kue	Tidak ada
			Topi	Benang, kain (punya supplier)	Tidak ada
Patok besi	Jatiragas hilir	Dsn. Cibanteng	Budi daya ikan lele	ikan 20 ton perminggu	Tidak ada
Banyu sari	Cicinde Selatan	Dsn. Cicinde 1	ikan pindang	ikan	Tidak ada
		Dsn. Cicinde 2	ikan pindang	ikan	Tidak ada
Banyusari	Cicinde Utara		Ikan pindang	Ikan	Tidak ada
Banyusari	Jayamukti	Dsn Sukamulya	Ikan Pidang	Ikan	Tidak ada
Banyusari	Gempol kolot		Makan Ringan	Tepung	Tidak ada
			Jamur	Jerami	Tidak ada
			Gilingan Padi		Tidak ada
Cilamaya Wetan	Tegalwaru	Dsn Cipancuh	Ikan Pidang	Ikan	Tidak ada
cilamaya Wetan	Cilamaya	Dusun 2	Kerupuk Kulit Ikan	Ikan	Tidak ada
		Ketimpal	Dendeng	Daging Sapi	Tidak ada
		Barahan	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada
		Eretan Utara	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada
Ciasem	Sukahaji		Jamur	Jerami	Tidak ada
Ciasem	Pinangsari	Cibatu Hilir	Jamur	Jerami	Tidak ada



KECAMATAN	DESA	Alamat (RT/RW)	JENIS UMKM	JENIS DAN JUMLAH BAHAN BAKU(KG/BLN)	MEMILIKI UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH
		Cibatu Girang	Jamur	Jerami	Tidak ada
Blanakan	Cilamaya Hilir	Wanakersa	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada
		Balok	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada
Blanakan	Cilamaya Girang	Mekarjaya	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada
		Bojong	Tahu Tempe	Kedelai	Tidak ada



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB III

STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PPK DAS CILAMAYA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

BAB III. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM PPK DAS CILAMAYA

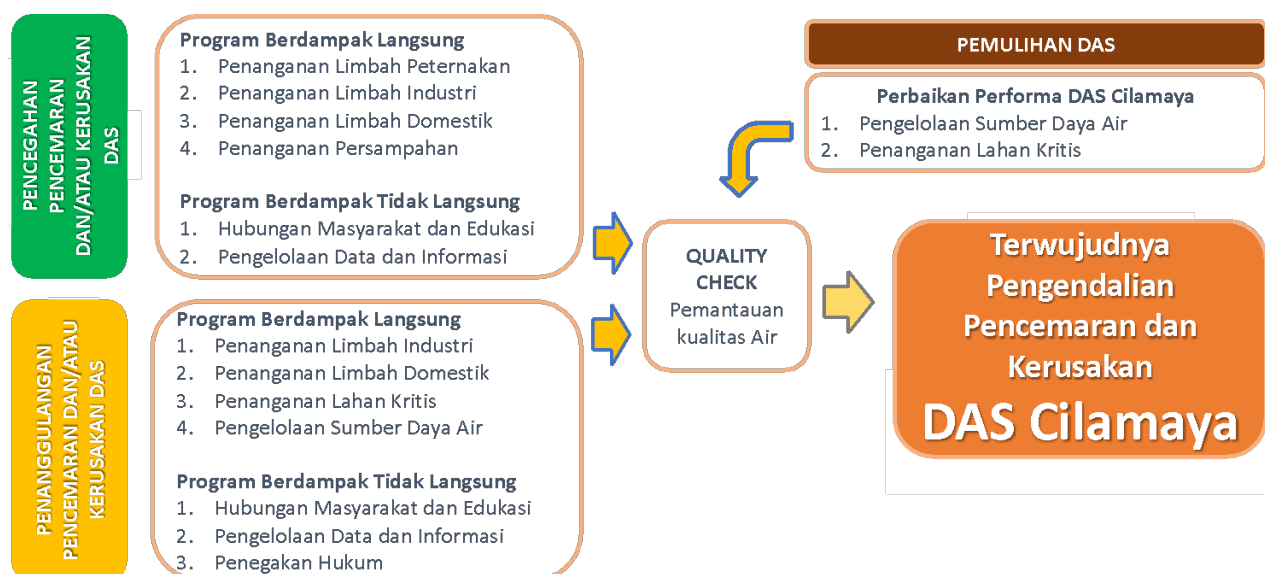
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAS CILAMAYA

Arah kebijakan pada penanganan DAS Cilamaya merujuk pada arahan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya dan DAS Kali Bekasi, yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS, serta Pemulihan Fungsi DAS. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi yang merupakan penanggulangan permasalahan pencemaran dan kerusakan. Pencemaran di DAS Cilamaya perlu dikendalikan dari sumber pencemarnya baik dari limbah industri, peternakan, perikanan maupun air limbah domestik dan persampahan. Kerusakan di DAS Cilamaya dikendalikan melalui upaya pengurangan erosi dan pengendalian sumber daya air. Strategi untuk mengendalikan sumber pencemaran dan kerusakan antara lain:

1. Menurunkan sedimentasi di DAS Cilamaya dengan pengurangan erosi melalui penanganan lahan kritis;
2. Mengelola limbah yang terdiri dari limbah industri, limbah peternakan, limbah domestik serta persampahan;
3. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada industri, insitusi pendidikan, dan masyarakat di DAS Cilamaya.

Dalam menjalankan strategi, diperlukan goal/tujuan yang jelas dan milestone capaian yang rasional, analisis ekosistem kompleks, dan integrasi dalam program, monitoring dan evaluasi serta kesepakatan para pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi yang kemudian diturunkan menjadi program nyata dan ditaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (Tabel 3.1). Program tersebut dapat diklasifikasi menjadi program berdampak langsung terhadap pengurangan dan pencemaran lingkungan dan program yang dampaknya tidak secara langsung menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan di DAS Cilamaya. Secara umum skema program ditampilkan pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1 Skema Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya

3.2 TUJUAN, SASARAN, DAN ULTIMATE GOAL

Tujuan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas air menuju klasifikasi mutu air kelas II
2. Meningkatkan kondisi daerah aliran sungai yang bebas limbah dan sampah, produktif untuk aktivitas prasarana/sarana rekreasi air/pariwisata, serta aktivitas perekonomian lainnya yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan kondisi daerah aliran sungai yang berketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Sasaran dari Revisi Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya sebagai berikut :

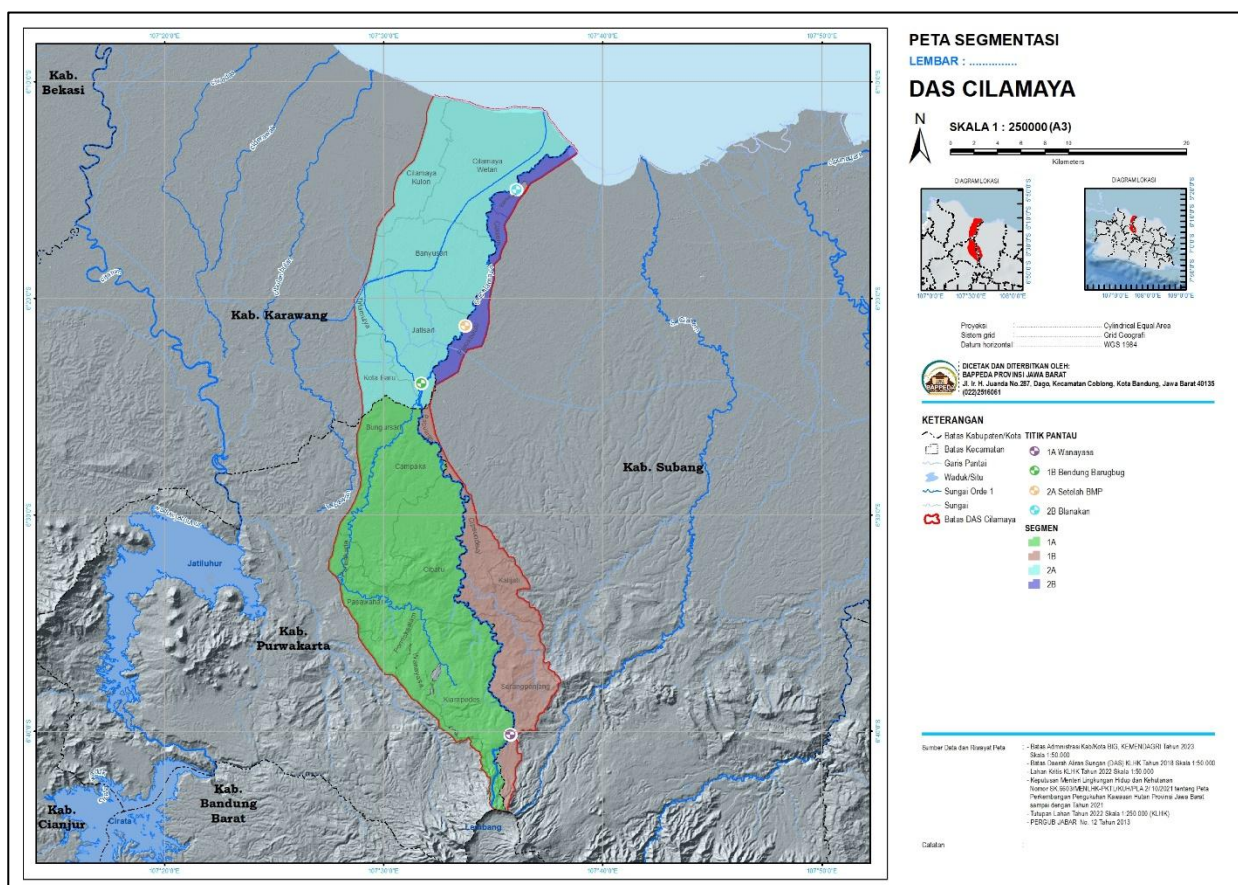
1. Meningkatnya pengelolaan kondisi tata air dan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung lingkungan DAS
2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air
3. Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan dan penurunan risiko bencana
4. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air baku dan prasarana/sarana rekreasi air
5. Meningkatnya pelibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kualitas DAS Cilamaya, khususnya memperbaiki kualitas air Sungai Cilamaya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



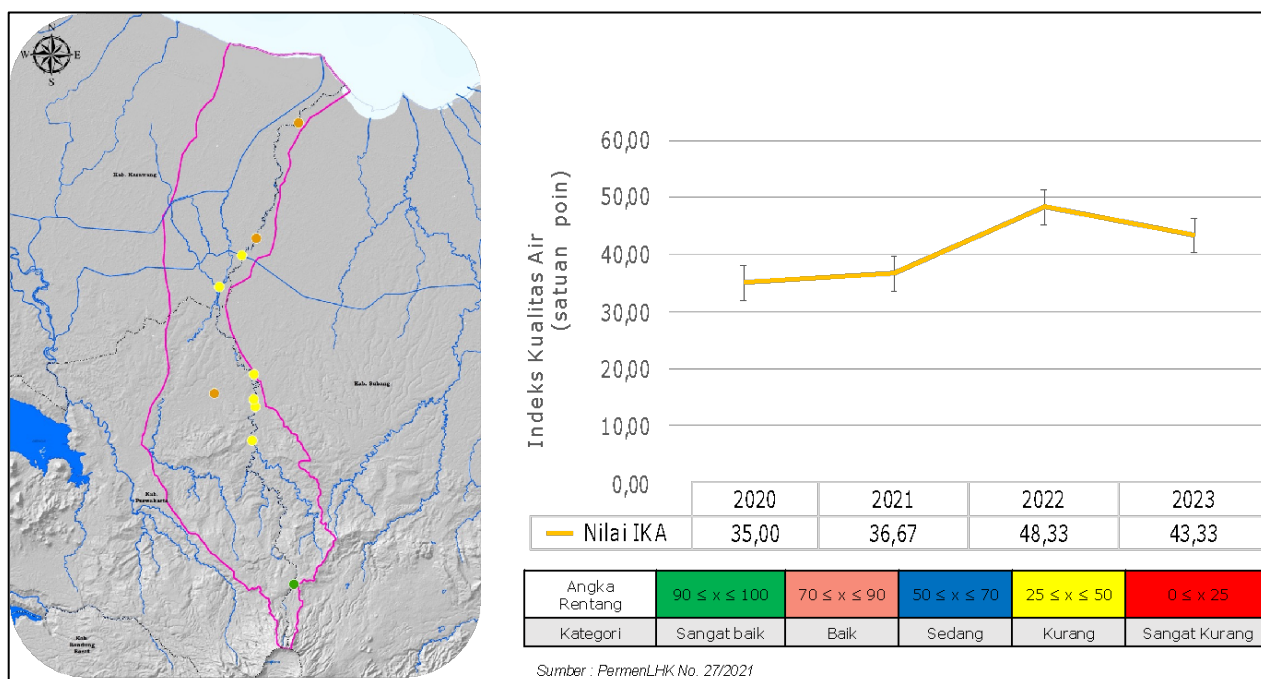
Baku Mutu dalam PerGub 12/2013		
	Tahap I (5 Tahun pertama)	Tahap II (5 Tahun kedua)
1. Segmen 1A , merupakan Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Purwakarta;	kelas III	kelas II
2. Segmen 1B , merupakan Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, meliputi Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Pabuaran	kelas III	kelas II
3. Segmen 2A , merupakan Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, dan Kecamatan Cilamaya Wetan	kelas III	kelas III
4. Segmen 2B , merupakan Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang, meliputi Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.	kelas III	kelas III

Gambar 3.3 Pembagian Segmen DAS Cilamaya beserta targetan baku mutu

Dari 24 data pemantauan kualitas air tahun 2022 di DAS Cilamaya, sebaran status mutu yaitu 4% Memenuhi, 67% Cemar Ringan, dan 29% Cemar Sedang. Berdasarkan trend indeks kualitas air tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dan menurun kembali di 2023 dikarenakan musim kemarau yang cukup Panjang menyebabkan debit air alamiahnya menurun.



E1D1F80BD4



Gambar 3.4 Tren Mutu Air DAS Cilamaya



Gambar 3.5 Tren Kualitas Air DAS Cilamaya

Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air di DAS Cilamaya tahun 2018 – 2023 sebagaimana Gambar 14 terdapat 8 parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA. Dari 8 parameter yang di pantau terdapat 4 parameter yang mengalami kenaikan di tahun 2023, yaitu BOD, COD, Total Fosfat, Koli Tinja. Parameter yang mengalami penurunan tertinggi (memburuk) yaitu parameter koli tinja. Adapun hasil pengujian kualitas air di tahun 2023 pada 3 kali pengujian ditampilkan dalam Tabel 3.1 berikut.



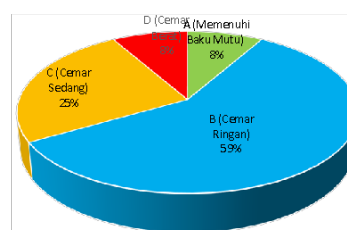
E1D1F80BD4

Tabel 3.1 IKA DAS Cilamaya Tahun 2023

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Segmen	BMA	Periode/ Tanggal	Konsentrasi								(C/L) Rata-rata	(C/L) Max	(C/L) Rata-rata Kuadrat	(C/L) Max Kuadrat	Nilai IP	Status Mutu Air
						TSS	DO	BOD	COD	pH	Nitrat	Fosfat	Fecal Coli	(C/Lij)R	(C/Lij)M	(C/Lij)R2	(C/Lij)M2	Pij	
1	Cilamaya	Wanayasa	Hulu	PP.22/2021	21-Feb-23	2	7.8	1	6	7.3	0.9	0.1	790	0.26	0.79	0.07	0.62	0.59	memenuhi
2	Cilamaya	Wanayasa	Hulu	PP.22/2021	14-Jun-23	2	7.3	4	11	6.9	0.9	0.2	330	0.49	1.62	0.24	2.64	1.20	ringan
3	Cilamaya	Wanayasa	Hulu	PP.22/2021	10-Okt-23	3	4.7	60	159	6.8	0.9	0.02	3500	2.28	7.51	5.22	56.33	5.55	sedang
4	Cilamaya	Bendung Barugbug	Tengah	PP.22/2021	21-Feb-23	27	1.3	9	31	7.4	0.9	0.13	5400	0.85	3.16	0.72	9.97	2.31	ringan
5	Cilamaya	Bendung Barugbug	Tengah	PP.22/2021	14-Jun-23	13	0.65	6.8	38	7.1	0.9	0.2	24393	1.23	6.43	1.51	41.36	4.63	ringan
6	Cilamaya	Bendung Barugbug	Tengah	PP.22/2021	10-Okt-23	22	0	83	166	7.7	0.9	0.5	4900	1.88	6.70	3.52	44.95	4.92	ringan
7	Cilamaya	Setelah BMP	Tengah	PP.22/2021	21-Feb-23	36	0.4	19	42	7.2	0.9	0.2	4000	1.06	3.50	1.12	12.27	2.59	ringan
8	Cilamaya	Setelah BMP	Tengah	PP.22/2021	14-Jun-23	59	0	50	157	6.7	0.9	0.7	79000	2.63	8.98	6.90	80.69	6.62	sedang
9	Cilamaya	Setelah BMP	Tengah	PP.22/2021	10-Okt-23	39	0	159	278	7.3	0.9	2.7	5400000	4.42	18.16	19.51	329.67	13.21	berat
10	Cilamaya	Blanakan	Hilir	PP.22/2021	21-Feb-23	71	1.4	7	50	7.3	0.9	0.2	24000	1.35	6.40	1.81	40.91	4.62	ringan
11	Cilamaya	Blanakan	Hilir	PP.22/2021	14-Jun-23	150	1.3	22	45	7.3	0.9	0.8	4500	1.35	3.82	1.82	14.60	2.87	ringan
12	Cilamaya	Blanakan	Hilir	PP.22/2021	10-okt-23	45	0	111	167	7.5	0.9	2	240000	3.24	11.40	10.49	129.87	8.38	sedang

Keterangan : Periode 2023, 3 kali pemantauan

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	8.33%	70	5.83
Ringan	7	58.33%	50	29.17
Sedang	3	25.00%	30	7.50
Berat	1	8.33%	10	0.83
Nilai Indeks Kualitas Air	12			43.33



Acuhan BMA PP 22/2021
Lamp. VI Kelas 2 dan 3

Sumber : DLH, 2023

Ultimate Goal sebagai indikator keberhasilan utama dari pelaksanaan Renaksi PPK DAS Cilamaya adalah Mutu Air Kelas III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan, yaitu setara dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55 poin, yang ditargetkan tercapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2029. Untuk berikutnya pada tahap kedua rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya ini diharapkan dapat memenuhi mutu cemar ringan atau sebesar minimal 60,00 poin (dengan kebijakan perhitungan IKA yang lama).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, mutu air dianalisis berdasarkan 47 parameter yang terdiri dari parameter fisika, kimia organik, mikrobiologi, radioaktivitas dan kimia organik. Kondisi Eksisting di tahun 2022 adalah sebesar 48,33 poin atau dikategorikan cemar ringan. Di tahun 2023 sempat turun di angka 43,33 sebagaimana pada tabel 3.1 pada saat kondisi kemarau atau sekitar bulan September 2023, namun diakhir tahun 2023 terdapat peningkatan kembali menjadi sebesar 54,93 poin.

Selanjutnya sebagai kondisi awal (*baseline*) pada tahun 2024, IKA DAS Cilamaya mengalami peningkatan kembali dengan adanya intervensi dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait sebesar 0,2 poin menjadi sebesar 55,13 poin. Namun sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pendekatan perhitungan Indeks Kualitas Air yang baru, maka dilakukan kembali



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E1D1F80BD4>

perhitungan Indeks Kualitas Air dengan skenario perhitungan yang baru dan didapatkan hasil dari perhitungan tersebut sebesar 65,94 untuk IKA di DAS Cilamaya tahun 2024 dengan kategori sedang sebagaimana tabel 3.2. Metode perhitungan tersebut mempertimbangkan adanya kebijakan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari *National Sanitation Foundation - Water Quality Indeks* (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode *Delphi*. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau.

Tabel 3.2 Data Kualitas Air Sungai Cilamaya

	Kebijakan Perhitungan Lama						Kebijakan Perhitungan Baru					
	Baseline	Target					Baseline	Target				
	2024	2025	2026	2024	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKA DAS Cilamaya	55,13	55,33	55,53	55,73	55,93	56,13	65,94	66,14	66,34	65,94	66,74	66,94
IKA DAS Cilamaya di Kabupaten Purwakarta	50,31	50,51	50,71	50,91	51,11	51,31	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	71,3
IKA DAS Cilamaya di Kabupaten Subang	55,09	55,29	55,49	55,69	55,89	56,09	61,83	62,03	62,23	62,43	62,63	61,83
IKA DAS Cilamaya di Kabupaten Karawang	60	60,2	60,4	60,6	60,8	61	65,27	65,47	65,67	65,87	66,07	65,27

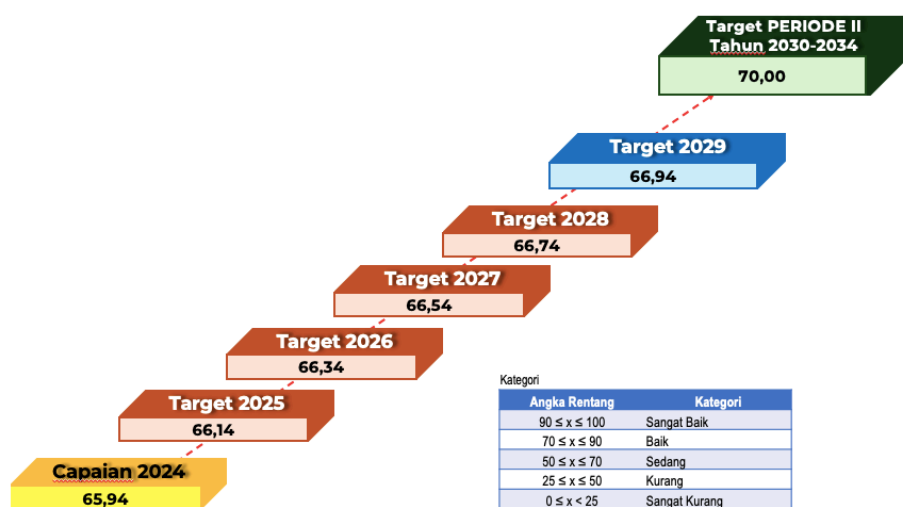
Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan parameter penting dalam mengukur kondisi kualitas lingkungan perairan, khususnya untuk menilai sejauh mana suatu badan air masih memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan aman untuk berbagai keperluan, seperti air baku, perikanan, dan ekosistem. Pengukuran IKA mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya air serta efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, DAS Cilamaya sebagai DAS prioritas provinsi diharapkan dapat mengalami peningkatan kualitas air dengan adanya Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya melalui upaya-upaya yang dilakukan pada kelompok kerja yang telah ditetapkan. Dengan kondisi IKA sebesar 65,94 poin di tahun 2024, pada tabel 3.2 disimulasikan proyeksi kenaikan IKA dalam periode 5 tahun pertama renaksi mencapai 66,94 poin. Target ini disusun berdasarkan proyeksi tren historis, kapasitas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

pengendalian lingkungan, serta rencana aksi pengelolaan kualitas air yang telah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan perhitungan Indeks Kualitas Air yang baru dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya 0,2 poin. Target tersebut mencerminkan upaya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain itu dengan IKA tersebut menunjukkan bahwa kualitas air secara umum masih berada dalam kategori yang sesuai dengan ambang batas yang dapat diterima untuk fungsi lingkungan dan sosial.



Gambar 3.6 Target *Ultimate Goal* IKA DAS Cilamaya 2025-2029

Target IKA DAS Cilamaya Tahun 2025-2029 seperti ditunjukkan pada gambar 3.6 ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa pada 5 tahun pertama masih dimungkinkan terjadinya refocusing atau realokasi anggaran sehingga mempengaruhi pencapaian target kegiatan dan program yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas air sungai. Target 5 tahun pertama ini juga diselaraskan dengan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai fondasi: penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Selain itu juga mempertimbangkan bahwa masih diperlukan upaya dan waktu untuk membangun kesadaran masyarakat dan industri dalam pengelolaan lingkungan. Adapun pencapaian IKA pada 5 tahun berikutnya menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi selama 5 Tahun pertama, sehingga dimungkinkan untuk disimulasikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 5 tahun kedua. Hal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan-kegiatan sudah dapat berjalan optimal disertai dengan sudah terbangunnya kesadaran masyarakat dan industri dalam pengelolaan lingkungan sampai dengan tahun 2029 sehingga percepatan dapat dilakukan dan pada akhir periode perencanaan jangka panjang tahun 2034 diharapkan dapat mencapai kondisi IKA dengan kategori baik yaitu minimal 70 poin.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

3.3 INDIKATOR KEBERHASILAN

Selain indikator utama (indikator dampak), keberhasilan program diukur melalui pencapaian indikator outcome (program) yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas Sungai Cilamaya. Penjabaran indikator output, outcome dan impact dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Program

Program	Indikator Output	Indikator Outcome	Indikator Impact
Penanganan Lahan Kritis	Terselenggaranya penanganan lahan kritis	Tertanganinya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga non hutan di DAS Cilamaya	Menurunnya erosi pada wilayah DAS Cilamaya
Penanganan Limbah Industri	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kepada industri	Presentase industri terbina dan memenuhi baku mutu	Effluent/limbah dari industri memenuhi baku mutu
Penanganan Limbah Peternakan	- Tersedianya unit pengolahan limbah ternak - Terselenggaranya bimbingan teknis dan sosialisasi kepada peternak	Presentase Jumlah Ternak yang Limbahnya Terolah	Kandungan faecal coliform menurun, serta Berkurangnya jumlah limbah peternakan yang masuk badan air
Penanganan Air Limbah Domestik	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penambahan KK terakses ke Infrastruktur Sanitasi Layak	Kandungan faecal coliform menurun, serta menurunnya jumlah KK BABS
Pengelolaan Sampah	Tersedianya unit pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan Tonase Sampah belum terlayani	Seluruh sampah dikelola dan terlayani diunit pengelolaan Persampahan sehingga mengurangi potensi masuk ke badan air
Pengelolaan Sumber Daya Air	- Terbangunnya tanggul pengendalian banjir - Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan kapasitas tampung sungai - Terselenggaranya pengerukan	Persentase sisa genangan banjir	Berkurangnya kejadian banjir di sekitar DAS Cilamaya Hilir, serta meningkatkan factor pengencer untuk peningkatan nilai IKA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Program	Indikator Output	Indikator Outcome	Indikator Impact
	sedimen Bendung Barugbug		
Penegakan Hukum	• Terlaksananya kegiatan pengawasan • Terlaksananya penanganan pengaduan kasus	Presentase Pengawasan terhadap pelaku usaha	Berkurangnya pelanggaran pada DAS Cilamaya
Edukasi dan Hubungan Masyarakat	• Terselenggaranya bimbingan teknis penyuluhan kesehatan lingkungan • Terselenggaranya sosialisasi kepada institusi pendidikan • Terselenggaranya pelibatan masyarakat untuk pemeliharaan sungai Cilamaya	Persentase Peningkatan Masyarakat yang teredukasi dan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan	• Berkurangnya limbah yang dibuang ke sungai • Tertanamkannya kepedulian lingkungan dari sejak dini di lingkungan sekolah • Bertambahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya lingkungan
Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi	• Terselenggaranya pelayanan data dan informasi terkait DAS Cilamaya • Termanfaatkannya Command Center Citarum sebagai bagian pemantauan Aktivitas atau kondisi DAS Cilamaya • Pemantauan Kualitas Air	Presentase Pelayanan data dan informasi yang dapat diakses	• Terpantaunya kualitas air DAS Cilamaya • Terpublikasinya kondisi DAS Cilamaya dan Aksi/kegiatan Penanganan yang telah dilaksanakan



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidehar.jabarprov.go.id/vaE1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

BAB IV. STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM

4.1 KELEMBAGAAN

Tata kelola dan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, meliputi:

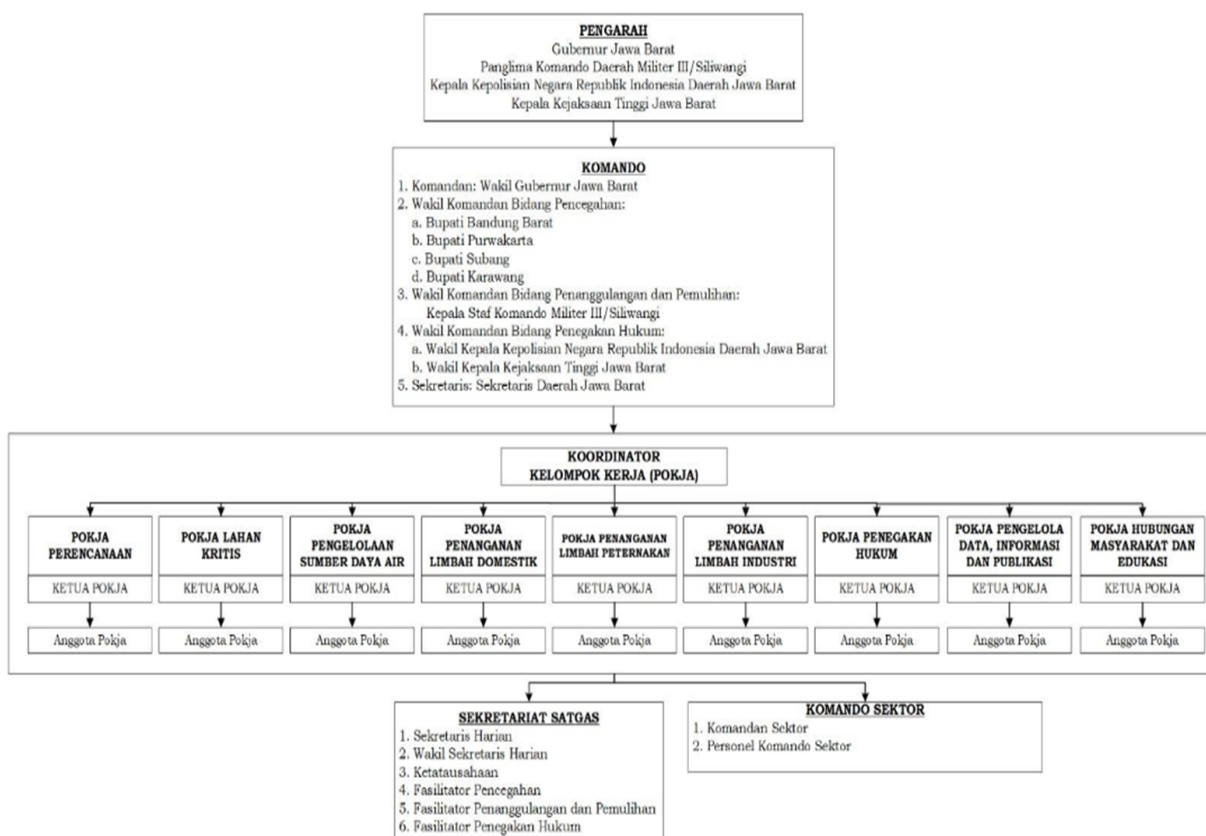
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5292);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya Dan Kali Bekasi Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya dan Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.443-DLH/2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya.

Susunan organisasi dalam tata kelola kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS Cilamaya menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.3/Kep.443-DLH/2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya sebagai berikut.





Gambar 4.1 Susunan Kelembagaan PPK DAS Cilamaya

Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai Cilamaya, dibentuk Tim DAS Citarum yang terdiri dari Pengarah dan Satuan Tugas (Satgas).

Pengarah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Daerah Aliran Sungai (PPK DAS Cilamaya) terdiri dari Gubernur Jawa Barat, Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Satgas dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas yang berkoordinasi dan bersinergi dengan Wakil Komandan yang terdiri dari Wakil Komandan Bidang Pencegahan, Wakil Komandan Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, dan Wakil Komandan Bidang Penegakkan Hukum. Komandan Satgas dan Wakil Komandan Satgas melibatkan secara aktif Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sekretariat Satgas dipimpin oleh Sekretaris Harian yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan dukungan koordinasi perencanaan, pelayanan teknis operasional, monitoring, dan administratif, serta mendukung kelancaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

pelaksanaan tugas Satgas dengan memfasilitasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas, terutama pelayanan administrasi dan pelaporan.

Komando Sektor dipimpin oleh Perwira Komando Daerah Militer III/Siliwangi, dengan personel Unsur Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Unsur Aparatur Sipil Negara, Unsur masyarakat di DAS Cilamaya. Komandan Sektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas. Adapun Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang Tim PPK DAS Cilamaya mengacu pada peraturan tersebut dan turunannya, disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Tim PPK DAS Cilamaya

No.		Personalia	Uraian
A.	Pengarah	1. Gubernur Jawa Barat; 2. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.	Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; Menerima laporan dari Komando dan memantau pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; dan Mengevaluasi laporan kegiatan Kelompok Kerja.
B.	Komando	Komandan Wakil Gubernur Wakil Komandan Bidang Pencegahan 1. Bupati Purwakarta; 2. Bupati Subang; 3. Bupati Karawang. Wakil Komandan Bidang Penanggulangan dan Pemulihan	Menunjuk Ketua Kelompok Kerja untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; dan Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja pada pengarah. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam membantu Satgas PPK DAS Cilamaya dalam lingkup bidang pencegahan; dan Mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai rencana aksi dalam lingkup Bidang Pencegahan. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam membantu Satgas PPK DAS



No.	Personalia	Uraian
	Kepala Staf Komando Militer III/ Siliwangi	Cilamaya dalam lingkup Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan Mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai rencana aksi dalam lingkup Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
	Wakil Komandan Bidang Penegakan Hukum 1. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.	- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam membantu Satgas PPK DAS Cilamaya dalam lingkup Bidang Penegakan Hukum; dan - Mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai rencana aksi dalam lingkup bidang penegakan hukum.
	Sekretaris Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat	
C. Kelompok Kerja	Koordinator 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Unsur Komando Daerah Militer III/Siliwangi. 3. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. 4. Unsur Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.	- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar Kelompok Kerja serta menentukan target kerja tahunan pada rencana aksi; - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan seluruh Kelompok Kerja sesuai dengan rencana aksi; dan - Melaporkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai rencana aksi kepada Komando.
	Kelompok Kerja Perencanaan Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Anggota:	- Mengkompilasi, memberikan asistensi dan menyusun rencana aksi yang diusulkan seluruh Kelompok Kerja; - Merumuskan indikator capaian seluruh Kelompok Kerja dalam rencana aksi; - Mengusulkan rencana aksi kepada Koordinator;



No.	Personalia	Uraian
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	Mensosialisasikan rencana aksi kepada seluruh Kelompok Kerja;
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi;
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kepada koordinator; dan Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung percepatan PPK DAS Cilamaya kepada Ketua Kelompok Kerja.

Kelompok Kerja Lahan Kritis

Ketua:

Kepala Dinas Kehutanan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat

Anggota:

1. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Personalia	Uraian
-----	------------	--------

7. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung.
9. Kepala Perusahaan Umum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
10. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VIII.

**Kelompok Kerja
Pengelolaan Sumber Daya
Air**

Ketua:

Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota:

1. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan;
- Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan;
- Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan
- Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.



No.	Personalia	Uraian
	Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
10.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.	
11.	Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta II.	
Kelompok Kerja Penanganan Limbah Domestik Ketua: Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Anggota:		Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan; Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan; Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	



No.	Personalia	Uraian
	4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat.	
	5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
	6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Tingkat Regional Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	
	7. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
	8. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
	9. Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
	Kelompok Kerja Penanganan Limbah Peternakan Ketua: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan; Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan; Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan
	Anggota: 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	



E1D1F80BD4

No.	Personalia	Uraian
	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.
2.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
3.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
4.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	
	Kelompok Kerja Penanganan Limbah Industri	
	Ketua: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan; Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan;
	Anggota:	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah	



No.	Personalia	Uraian
		Kabupaten Bandung Barat.
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.	
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	



No.	Personalia	Uraian
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
17.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
18.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	

Kelompok Kerja Penegakkan Hukum

Ketua:

Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota:

1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Kepala Bidang Teknik pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan; Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan; Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Personalia	Uraian
	Pamong	Praja
	Pemerintah	Daerah
		Provinsi Jawa Barat.
4.	Kepala Bidang	
	Penegakan Perundang	
	Undangan Daerah pada	
	Satuan Polisi Pamong	
	Praja Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Purwakarta.	
5.	Kepala Bidang	
	Penegakan Peraturan	
	Daerah pada Satuan	
	Polisi Pamong Praja	
	Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Subang.	
6.	Kepala Bidang	
	Penegakan Perundang	
	Undangan Daerah pada	
	Satuan Polisi Pamong	
	Praja Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Karawang.	
7.	Kepala Bidang Penataan	
	dan Peningkatan	
	Kapasitas Lingkungan	
	pada Dinas Lingkungan	
	Hidup Pemerintah	
	Daerah Kabupaten	
	Purwakarta.	
8.	Kepala Bidang	
	Pengawasan dan	
	Penaatan Hukum pada	
	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Subang.	
9.	Kepala Bidang Penataan	
	Peraturan Lingkungan	
	pada Dinas Lingkungan	
	Hidup Pemerintah	
	Daerah Kabupaten	
	Karawang.	
10.	Unsur Kepolisian Negara	
	Republik Indonesia	
	Daerah Jawa Barat.	
11.	Unsur Kejaksaan Tinggi	
	Provinsi Jawa Barat.	
12.	Jabatan Fungsional pada	
	Biro Hukum dan Hak	
	Asasi Manusia	



No.	Personalia	Uraian
	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.	
	Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Edukasi Ketua: Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Anggota: 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Kepala Bidang Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 5. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh anggota Kelompok Kerja untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan; Mengusulkan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja kepada Kelompok Kerja Perencanaan; Melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja dalam rencana aksi; dan Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja Perencanaan.



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Personalia	Uraian
6.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
8.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
10.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
11.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
12.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



No.	Personalia	Uraian
	Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.	
14.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	
15.	Jabatan Fungsional pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.	
	Kelompok Kerja Pengelola Data, Informasi, dan Publikasi	
	Ketua: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	· Mengkompilasi data, informasi dan publikasi dari seluruh Kelompok Kerja; · Melakukan analisis, manajemen informasi dan komunikasi publik yang berkaitan dengan program rencana aksi; · Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data terkait PPK DAS Cilamaya;
	Anggota:	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.	· Membentuk Sistem Informasi Pusat Data PPK DAS Cilamaya;
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.	· Memberikan layanan informasi kegiatan PPK DAS Cilamaya;
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	· Melaporkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kelompok Kerja perencanaan.
D	Sekretariat Satgas Sekretaris Harian	· Memberikan dukungan teknis operasional Satgas PPK DAS Cilamaya;



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Personalia	Uraian
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	· Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan integrasi administrasi kegiatan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyelenggarakan administrasi dalam kerja sama Satgas PPK DAS Cilamaya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait; · Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, serta penyusunan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Satgas PPK DAS Cilamaya; · Memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam pelaksanaan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas Satgas PPK DAS Cilamaya kepada Koordinator; · Memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; · Merumuskan hasil monitoring dan evaluasi kepada Koordinator; dan · Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Koordinator.



No.	Personalia	Uraian
	Wakil Sekretaris Harian Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	- Memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam hal Sekretaris Harian berhalangan; - Membantu Sekretaris Harian dalam pemberian dukungan teknis operasional Satgas PPK DAS Cilamaya; - Membantu Sekretaris Harian dalam pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Satgas PPK DAS Cilamaya; - Membantu Sekretaris Harian dalam penyelenggaraan administrasi dalam kerja sama Satgas PPK DAS Cilamaya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak yang terkait; - Membantu Sekretaris Harian dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Sekretariat serta mengorganisasikan, mengadministrasikan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana kesekretariatan; - Memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam pelaksanaan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas satgas PPK DAS Cilamaya Sekretaris Harian; dan - Membantu Sekretaris Harian dalam perumusan hasil monitoring dan evaluasi.
	Ketatausahaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Melaksanakan kegiatan administrasi keanggotaan, serta mengorganisasikan, mengadministrasikan kepegawaian, keuangan, dan sarana Sekretariat Satgas PPK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Personalia	Uraian
		DAS Cilamaya; · Mengkompilasi proses administrasi penyusunan rencana dan program kerja Satgas PPK DAS Cilamaya dan prasarana Sekretariat Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan Satgas PPK DAS Cilamaya; · Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya; · Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya; dan · Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Harian dan/atau Wakil Sekretaris Harian.
	Fasilitator Pencegahan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	· Melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Pencegahan; · Melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Pencegahan; · Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Pencegahan; · Mengadministrasikan kerja sama Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang



E1D1F80BD4

No.	Personalia	Uraian
	Fasilitator Penanggulangan dan Pemulihan Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	· Pencegahan; · Melaksanakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan · Menyusun bahan-bahan laporan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Pencegahan. · Melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; · Melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; · Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; · Mengadministrasikan kerja sama Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; · Melaksanakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan · Menyusun bahan-bahan laporan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
	Fasilitator Penegakan Hukum	· Melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional



E1D1F80BD4

No.		Personalia	Uraian
		Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	- Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penegakan Hukum; - Melaksanakan pemberian pelayanan administrasi, pengumpulan dan penyajian data di bidang penegakan hukum; dan - Mengadministrasikan kerja sama Satgas PPK DAS Cilamaya bidang penegakan hukum. - Mengadministrasikan bahan-bahan laporan kegiatan Satgas PPK DAS Cilamaya Bidang Penegakan Hukum.
E	Komando Sektor	Koomandan Perwira Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Personel 1. Unsur Komando Daerah Militer III/Siliwangi. 2. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. 3. Unsur Aparatur Sipil Negara. 4. Unsur masyarakat di DAS Cilamaya.	Melaksanakan operasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan DAS Cilamaya sesuai rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan dan/atau arahan komandan Satgas PPK DAS Cilamaya.

4.2 WILAYAH KERJA

Pelibatan TNI dalam hal ini para komandan sektor bertujuan untuk membantu mempercepat pencapaian target kegiatan pada masing-masing programnya. Seluruh aktivitas baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, maupun Badan Usaha diketahui oleh Komandan Sektor sebagai pengawal pelaksanaan kegiatan di sektor masing-masing. Fokus tugas dan wewenang Dan sektor antara lain Sosialisasi dan Pembinaan terhadap warga sekitar, melakukan kegiatan untuk menghentikan pencemaran dan kerusakan Sungai Cilamaya, berwenang untuk meminta keterangan data/dokumen termasuk memeriksa pabrik, tempat usaha dan saluran pembuangannya. Adapun untuk pembagian sektor TNI dan juga lingkup tugasnya akan dibahas secara terpisah oleh sekretariat Satgas Cilamaya.



BAB V

RENCANA AKSI



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

BAB V. RENCANA AKSI

5.1 INTERVENSI PENANGANAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN

Meningkatnya keseimbangan antara upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan intervensi penanganan pada setiap sumber pencemar dan kerusakan dilakukan melalui serangkaian tahapan, meliputi:

1. Identifikasi sumber pencemar/kerusakan
2. Analisis beban pencemaran/kerusakan
3. Penentuan target penurunan beban pencemar/kerusakan
4. Penentuan intervensi penanganan, lokasi dan kebutuhan pendanaan
5. Pemetaan kelembagaan dan pelaksanaan monev.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, dan dalam rangka pencapaian Ultimate Goal, penanganan difokuskan pada 9 program sebagai berikut.

1. Penanganan Lahan Kritis
2. Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Penanganan Air Limbah Domestik
4. Pengelolaan Persampahan
5. Penanganan Limbah Peternakan
6. Penanganan Limbah Industri
7. Penegakan Hukum
8. Hubungan Masyarakat dan Edukasi
9. Pengelolaan Data, Informasi dan Publik

Permasalahan, Pembagian Kelompok Kerja, Program, Indikator Outcome Program, serta Indikasi Kegiatan pada Renaksi PPK DAS Cilamaya disajikan pada Tabel berikut ini.



Tabel 5.1 Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

NO	PERMASALAHAN	POKJA	PROGRAM	OUTCOME	INDIKASI KEGIATAN
	KONDISI SUNGAI CILAMAYA BAIK DAN MENGHITAM AKIBAT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAS	SELURUH POKJA	SELURUH PROGRAM	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) DAS Cilamaya	
1	Kerusakan Lahan dan potensi laju erosi yang tinggi	Pokja Penanganan Lahan Kritis	PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS	1. Prosentase Luasan Lahan Kritis yang Tertangani (%)	- Pembangunan Persemaian dan Penyediaan Bibit Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan - Penanaman dan Pengamanan Hutan
2	Pencemaran dari limbah peternakan ruminansia dan unggas yang tidak terolah masuk ke saluran drainase atau sungai	Pokja Penanganan Limbah Peternakan	PROGRAM PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN SKALA MIKRO DAN KECIL	1. Presentase Kelompok Peternak Ruminansia dan Unggas yang diintervensi (%)	- Penggunaan pupuk ramah lingkungan (substitusi pupuk kimia dengan pupuk organik) - Daur ulang limbah pertanian untuk pembuatan kompos - Pemanfaatan limbah pertanian untuk biogas
3	Beberapa industri belum memiliki izin pembuangan limbah cair dan IPAL, serta hasil pengolahan limbah belum memenuhi baku mutu	Pokja Penanganan Limbah Industri	PROGRAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI	1. Persentase industri yang memiliki IPAL dan berkinerja Baik (%) 2. Presentase industri yang taat dalam pengelolaan lingkungan melalui PROPER dan PROPERDA (%)	- Inventarisasi dan Evaluasi IPAL perusahaan - Pengawasan dan evaluasi ketaatan industri terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku terkait IPAL
4	Tingginya angka beban pencemar fecal coli akibat limbah penduduk Banyaknya timbulan sampah yang belum terkelola dan masuk ke sungai	Pokja Penanganan Limbah Domestik	PROGRAM PENANGANAN LIMBAH DOMESTIK PROGRAM PENANGANAN PERSAMPAHAN	1. Persentase KK yang terlayani akses sanitasi layak (KK) 1. Persentase timbulan sampah belum terlayani yang diintervensi (%)	- Sanimas - Pembuatan septic tank komunal - IPAL terpadu - Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS - Pengomposan sampah - Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai - pembangunan TPST, TPS3R, Bank Sampah - optimalisasi TPST, TPS3R, Bank sampah
5	Sedimentasi yang tinggi, penyempitan sungai, Daya tampung drainase tidak memadai, Alir guna lahan tak terkendali sehingga menghasilkan banjir Debit air pada musim kemarau kecil sehingga faktor pengencer beban pencemar pada sungai berkurang	Pokja Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Persentase pengurangan luas genangan (%) 1. Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	- Normalisasi sungai - Konservasi daerah hulu - Pemeliharaan sempadan sungai - Pemeliharaan sempadan sungai - pembangunan bendungan / bangunan penangkap air - konservasi daerah hulu - pemantauan titik muka air
6	Kegiatan Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan belum sempurna dan efektif serta kurangnya pengawasan	Pokja Penegakan Hukum	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM	1. Persentase pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan industri di sekitar DAS Cilamaya	- Pelatihan dan pengembangan kapasitas PPLH - Peningkatan pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui penegakan hukum (pidana atau perdata)
7	Permasalahan sosial - kurangnya komitmen dan kesadaran masyarakat	Pokja Humas dan Edukasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROGRAM EDUKASI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN AKADEMI PROGRAM EDUKASI LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KESEHATAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	1. Persentase keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan (%) 1. Persentase sekolah yang sudah sadar lingkungan 1. Persentase penyuluh kesehatan yang diberikan pembinaan lingkungan 1. Persentase pelayanan data dan informasi DAS Cilamaya yang diakses masyarakat (%) 2. persentase jumlah media informasi publikasi DAS Cilamaya yang dapat diakses masyarakat	- Sosialisasi PKA-PPA - Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan - Pembinaan sekolah adiwiyata - pembinaan penyuluh kesehatan - pengelolaan dan pelayanan data dan informasi DAS Cilamaya - Pembuatan command centre atau website atau media publikasi
8	Kurang optimalnya pengelolaan data, informasi, belum adanya media informasi DAS Cilamaya sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat	Pokja Data dan Informasi			

5.2 INTERVENSI PENANGANAN LAHAN KRITIS

Kondisi pengelolaan DAS dapat dilihat berdasarkan kondisi lahannya. Klasifikasi kondisi lahan berdasarkan tingkat kekritisannya, terbagi menjadi 5 katagori, yaitu lahan tidak kritis, agak kritis, potensial kritis, kritis, dan sangat kritis. Adapun lahan dengan klasifikasi kritis dan sangat kritis menjadi prioritas utama dalam penanganan lahan kritis.

Perencanaan penanganan lahan kritis pada 5 tahun pertama direncanakan pengurangan lahan kritis sebesar 600 Ha setiap tahunnya dari kondisi tahun sebelumnya, dengan asumsi pendekatan bahwa rata-rata kegiatan penanaman setiap tahunnya dilakukan pada lahan sekitar 500 s.d. 600 Ha. Tabel 5.3 mencantumkan kondisi luasan lahan kritis yang terjadi setiap tahunnya dengan upaya menanam 600 Ha lahan dengan pohon, sehingga terdapat pengurangan luasan lahan kritis yang ditangani sebagaimana dicantumkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Target Program Penanganan Lahan Kritis

Outcome	Satuan	2022 Baseline	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tertanganinya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga ci DAS Cilamaya	Ha			625	1250	1875	2500	3125	3750
	%			8,27	16,54	24,80	33,07	41,34	49,61

Beberapa indikasi kegiatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan secara vegetatif dan rehabilitasi lahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



E1D1F80BD4

dengan sipil teknis sebagaimana Tabel 5.3 yang dilakukan dari lingkup instansi yang menangani perhutanan, dan instansi yang menangani perkebunan. Untuk Matrik Kegiatan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Matriks Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya.

Tabel 5.3 Indikasi Kegiatan pada Program Penanganan Lahan Kritis

No.	Permasalahan	Program	Indikator Outcome	Satuan	Target (Ha)					Indikasi Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029			
1	Lahan Kritis DAS Cilamaya 12,41% dari total luasan DAS, dengan total lahan kritis DAS Cilamaya 7.559,25 Ha (dalam kawasan hutan seluas 5.567,69 Ha dan APL 1.991,56 Ha)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tertanganinya lahan kritis	Ha	225	225	225	225	225	Rehabilitasi Lahan secara Vegetatif di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas Kehutanan Provinsi Jabar	Sasaran lokasi : Areal Penggunaan Lain (APL)
2										Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas Kehutanan Provinsi Jabar	Sasaran lokasi : Areal Penggunaan Lain (APL)
				Ha	150	150	150	150	150	Pembuatan Dam Penahan (DPn)	Dinas Kehutanan Provinsi Jabar	1 unit DPn ~ 10 Ha DTA
				Ha	150	150	150	150	150	Pembuatan Gully Plug (GP)	Dinas Kehutanan Provinsi Jabar	1 unit GP ~ 5 Ha DTA
3		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luas penanganan lahan kritis perkebunan di DAS Cilamaya	Ha	100	100	100	100	100	Penanaman komoditas tanaman perkebunan pada lahan kritis di DAS Cilamaya	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	

Target	OPD	Indikasi Kegiatan	Indikator Output
Luas Kawasan Hutan	Kehutanan	1. Penanganan lahan kritis 2. Persemaian untuk menghasilkan bibit produktif 3. Pembangunan BKTA	1. Luas lahan kritis yang ditangani 2. Jumlah bibit yang ditanam 3. Jumlah BKTA
	Pertanian	1. Penanganan lahan kritis 2. Penanaman bibit tanaman buah 3. Pembuatan teras bangku	1. Luas lahan kritis yang ditangani 2. Jumlah bibit yang ditanam 3. Luas pembuatan teras bangku
	Perkebunan	1. Penanaman komoditas perkebunan 2. Penataan lahan	1. Luas penanaman komoditas perkebunan 2. Luas penataan lahan
Dalam Kawasan Hutan	Kehutanan BPDAS Perhutani PT. PN VIII	1. Penanganan lahan kritis 2. Persemaian untuk menghasilkan bibit produktif 3. Pembangunan BKTA	1. Luas lahan kritis yang ditangani 2. Jumlah bibit produktif 3. Jumlah BKTA

5.3 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan dokumen Kajian Perhitungan Daya Tampung Sungai 3 DAS dan 4 Waduk Prioritas (2008), sumber daya air di DAS Cilamaya berasal dari Sungai Cilamaya yang memiliki debit air rata-rata 14,21 m³/detik dan debit aliran mantap sebesar 6,02 m³/detik. Salah satu isu yang terkait dengan daya rusak air di Sungai Cilamaya adalah kejadian genangan/banjir. Berdasarkan peta RTRW Jawa Barat, pada wilayah DAS Cilamaya bagian hilir memiliki tingkat bahaya banjir yang sedang hingga tinggi. Penyebab terjadinya banjir di wilayah DAS Cilamaya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi di atas normal sehingga menghasilkan air limpasan yang melebihi daya dukung sistem drainase, perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali serta kondisi geologi dan morfologi lahan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pencemaran dan kerusakan telah terjadi di DAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Cilamaya dan terkonsentrasi di bagian hilir. Konsentrasi banjir berada di pesisir pantai utara Jawa Barat (Kabupaten Karawang), sub DAS Cipepetan dan sub DAS Kali Blanakan. Berdasarkan perkembangan dari berita saat ini, di daerah pesisir pantai Karawang juga sering terjadi banjir rob. Data luasan dan tingkat bahaya banjir di DAS Cilamaya dirinci pada **Tabel 5.4**.

Tabel 5.4 Kondisi Bahaya Banjir DAS Cilamaya Tahun 2018

Kecamatan	Bahaya Banjir	Luas (ha)	Kecamatan	Bahaya Banjir	Luas (ha)	Kecamatan	Bahaya Banjir	Luas (ha)
Kab. Karawang			Bungursari	Sedang	595,68	Pondoksalam/Wanayasa	Tidak Bahaya	1,76
Banyusari	Rendah	20,46	Bungursari	Tidak Bahaya	243,49	Total Luasan Banjir Kab. Purwakarta		25.421,26
Banyusari	Sedang	783,28	Bungursari	Tinggi	5,07	Kab. Subang		
Banyusari	Tidak Bahaya	0,63	Campaka	Rendah	3.237,22	Area Tidak Terdefinisi	Tinggi	8,26
Banyusari	Tinggi	2.609,64	Campaka	Sedang	927,07	Blanakan	Sedang	249,62
Cilamaya Kulon	Rendah	21,93	Campaka	Tidak Bahaya	1.231,28	Blanakan	Tidak Bahaya	19,79
Cilamaya Kulon	Sedang	1.136,15	Campaka	Tinggi	36,55	Blanakan	Tinggi	655,75
Cilamaya Kulon	Tidak Bahaya	1,21	Cibatu	Rendah	2.335,80	Blanakan		18,09
Cilamaya Kulon	Tinggi	1.514,59	Cibatu	Sedang	726,55	Cisem	Tinggi	334,98
Cilamaya Kulon		3,09	Cibatu	Tidak Bahaya	3.051,61	Cisem		215,40
Cilamaya Wetan	Rendah	13,54	Cibatu	Tinggi	14,67	Cipeundeuy	Rendah	881,35
Cilamaya Wetan	Sedang	1.581,88	Kiarapedes	Rendah	68,49	Cipeundeuy	Sedang	711,37
Cilamaya Wetan	Tidak Bahaya	27,29	Kiarapedes	Sedang	52,04	Cipeundeuy	Tidak Bahaya	939,48
Cilamaya Wetan	Tinggi	6.016,69	Kiarapedes	Tidak Bahaya	5.524,57	Cipeundeuy	Tinggi	47,72
Cilamaya Wetan		177,23	Kiarapedes	Tinggi	40,76	Dawuan	Tidak Bahaya	79,04
			Kiarapedes/Wanayasa	Tidak Bahaya	8,04	Kaliati	Rendah	105,00
			Kiarapedes	Rendah	259,12	Kaliati	Sedang	52,16
			Pasawahan	Sedang	205,13	Kaliati	Tidak Bahaya	1.098,67
			Pasawahan	Tidak Bahaya	1.339,08	Kaliati	Tinggi	2,47
			Pasawahan	Tinggi	80,55	Pabuaran	Rendah	19,51
			Pondoksalam	Rendah	127,72	Pabuaran	Sedang	206,53
			Pondoksalam	Sedang	56,17	Pabuaran	Tinggi	100,62
			Pondoksalam	Tidak Bahaya	1.119,27	Patokbeusi	Rendah	15,34
			Pondoksalam	Tinggi	1,26	Patokbeusi	Sedang	983,92
			Pondoksalam/Wanayasa	Tidak Bahaya	4,71	Patokbeusi	Tidak Bahaya	0,61
			Purwakarta	Rendah	234,75	Patokbeusi	Tinggi	292,31
			Purwakarta	Sedang	294,04	Serangpanjang	Rendah	231,70
			Purwakarta	Tidak Bahaya	173,00	Serangpanjang	Sedang	45,38
			Purwakarta	Tinggi	51,73	Serangpanjang	Tidak Bahaya	4.257,06
			Wanayasa	Rendah	28,29	Serangpanjang	Tinggi	18,56
			Wanayasa	Sedang	27,51	Total Luasan Banjir Kab. Subang		11.590,70
			Wanayasa	Tidak Bahaya	1.972,36	TOTAL DAS CILAMAYA		60.922,30
			Wanayasa	Tinggi	2,89			
			Wanayasa/Kiarapedes	Tidak Bahaya	97,84			
			Wanayasa	Tidak Bahaya	2,00			

Sumber: BAPPEDA Jawa Barat, 2018

Dari data kondisi bahaya banjir tahun 2018 telah dilakukan beberapa upaya oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS dan juga pemerintah daerah setempat baik provinsi maupun Kabupaten di DAS Cilamaya, sehingga berdasarkan data pendekatan yang dilakukan oleh BBWS tahun 2023, diketahui telah terjadi pengurangan areal genangan di DAS Cilamaya yang cukup signifikan, yaitu Luas Genangan Banjir berdasarkan data BBWS Citarum 2024 (Total 718,068 Ha), mencakup Kab. Karawang =500,538 Ha, Kab. Purwakarta. = 0 Ha, dan Kab. Subang = 217,53 Ha.

Namun dilakukan pendekatan pengurangan areal bahaya banjir sebesar 10% di tahun 2023. Untuk perencanaan penanganan bahaya banjir pada 5 tahun pertama direncanakan pengurangan luasan banjir sebesar 33,84% di akhir tahun 2034, sebagaimana dicantumkan dalam Tabel berikut ini, dengan pertimbangan beberapa tahun awal intervensi dalam rencana aksi ini masih diberlakukan kebijakan OPOR pada Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dalam pengendalian banjir di DAS Cilamaya.



Tabel 5.5 Target Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Outcome	Satuan	2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pengurang an Luas Banjir Karawang	Ha	21.234,81	28.865,00	28.000	27.000	23.000	20.000	17.000	14.000
Pengurang an Luas Banjir Purwakarta	Ha	3.916,79	3.916,79	3.750	3.600	3.300	3.000	2.700	2.200
Pengurang an Luas Banjir Subang	Ha	3.117,64	3.117,64	3.000	2.800	2.600	2.300	2.000	1.800
Pengurang an Luas Banjir Total DAS Cilamaya	Ha	28.269,24	35.899,43	34.750	33.400	28.900	25.300	21.700	18.000
Persentase pengurang an luasan Banjir	%			3,20	6,96	19,50	29,53	39,55	49,86

5.4 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH DOMESTIK

Lingkup wilayah penanganan air limbah domestik di DAS Cilamaya adalah seluruh wilayah DAS Cilamaya. Wilayah tersebut meliputi 3 kabupaten/kota, 22 kecamatan, dan 141 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 897.324 jiwa atau 241.642 KK. Kondisi masalah pengelolaan air limbah domestik dikelompokkan menjadi 2 kriteria besar, yaitu masyarakat masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan masyarakat yang sudah ODF (*Open Defecation Free*), yaitu kondisi ketika setiap individu/masyarakat sudah tidak ada yang BABS. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, suatu komunitas/masyarakat dikatakan telah ODF apabila:

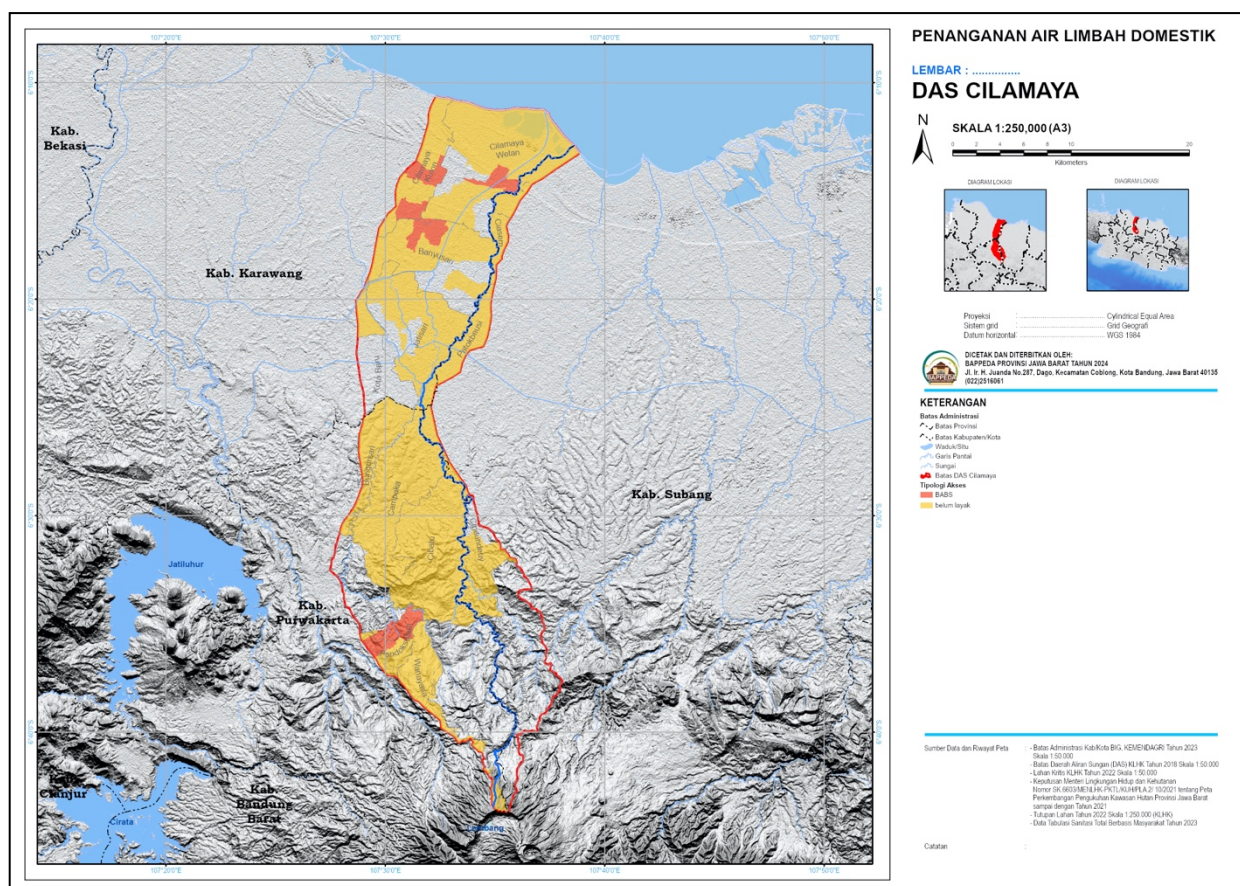
1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat (termasuk di sekolah);
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar;
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat;
4. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat;
5. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.



desa/kelurahan tersebut terakses pada sarana sanitasi yang sederhana dan pengolahan akhir tinjanya tidak berupa tangka septik,

4. Perilaku BABS, dimana masyarakat penduduk/KK di desa/kelurahan tersebut masih BAB di tempat-tempat terbuka (sungai, sawah, ladang, dll.)

Keempat kategori ini ditetapkan dalam upaya menentukan tipologi akses sanitasi di setiap desa/kelurahan untuk mengarahkan pendekatan intervensi yang tepat program dan tepat sasaran dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, di wilayah DAS Cilamaya. Secara spasial Tipologi pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah DAS Cilamaya, dapat diperlihatkan sebagai berikut:



Gambar 5.2 Peta Tipologi Akses Sanitasi Wilayah Das Cilamaya

Berdasarkan Peta tersebut, di wilayah DAS Cilamaya terdapat 24 desa/kelurahan yang seluruh penduduknya terakses ke sarana sanitasi layak mandiri, sementara itu terdapat 19 desa/kelurahan yang penduduknya selain terakses ke sarana sanitasi mandiri ada sebagian yang terakses ke sarana sanitasi layak bersama. Di luar itu, terdapat 92 desa/kelurahan yang sebagian masyarakatnya terakses pada sarana sanitasi yang belum layak, dan bahkan masih BABS sebanyak 6 desa.

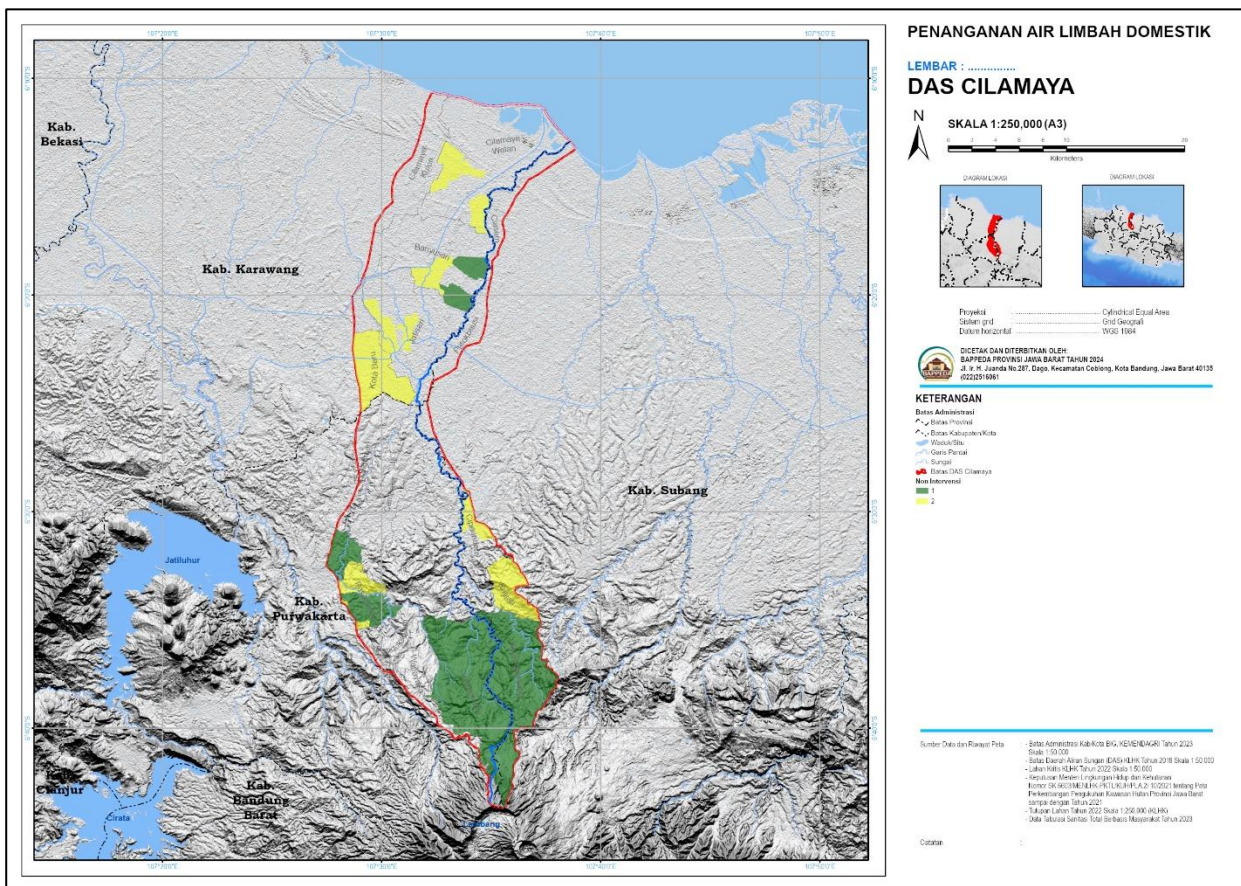


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Guna mengatasi permasalahan pencemaran yang bersumber dari air limbah domestik, dalam rencana aksi akan berfokus untuk melakukan intervensi berupa pembangunan sarana sanitasi, ke wilayah desa/kelurahan yang bertipologi desa/kelurahan dengan akses belum layak dan BABS. Bentuk sarana yang dibangun bertujuan untuk menambah sarana akses sanitasi layak dengan opsi teknologi berupa: Tangki Septik Individual 1KK, Tangki Septik Komunal 10KK, IPAL Komunal (Permukiman) skala 50KK, serta penambahan Sarana SR bagi IPAL Komunal terbangun yang kapasitasnya belum optimal.

Secara spasial berikut ini ditunjukkan wilayah DAS Cilamaya yang relative tidak perlu intervensi, karena sarana sanitasinya sudah termasuk kategori layak mandiri maupun layak Bersama Gambar 3. Kemudian wilayah DAS Cilamaya yang diintervensi dengan pembangunan sarana sanitasi layak ditunjukkan dalam Gambar 4. Selanjutnya untuk melihat seberapa besar intensitas/beban pembangunan harus dilakukan di wilayah yang diintervensi, ditunjukkan dalam Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Peta Wilayah DAS Cilamaya dengan Akses Sanitasi Layak



Pada Gambar 5.5 ini pula dapat terlihat jumlah KK yang perlu ditingkatkan akses sanitasinya menjadi layak di setiap desa/kelurahan yang diintervensi, berkisar antara terendah sebanyak 14 KK, dan yang tertinggi sebesar 1.724 KK. Total KK yang akan ditingkatkan akses sanitasinya menjadi layak sampai 2029 sebanyak 31.563 KK. Dalam periode 2025-2029 Renaksi DAS Cilamaya ini, diharapkan tersisa “gap” sebesar 27,237 KK untuk dituntaskan, dengan asumsi sebanyak 4.236 KK (2% jumlah penduduk) dapat terselesaikan pada tahun 2024. Implementasi intervensi pembangunan air limbah domestik dibiayai dengan anggaran dari berbagai sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah sebagai penugasan wajib konkuren, serta dana dari swasta (CSR) dan masyarakat yang ternyata kontribusinya sangat besar. Berdasar pada hasil kajian Kemenkes, kontribusi kinerja Pemerintah dengan masyarakat terhadap pembangunan sanitasi adalah 1 : 7. Berdasar data dari implementasi sanitasi di Citarum Harum dalam kurun 2020-2023 perbandingan tersebut hampir 1 : 9. Rendahnya kinerja pemerintah lebih disebabkan belum baiknya mekanisme dan system pelaporan kinerja.

Dalam Renaksi ini intervensi sanitasi melalui anggaran pemerintah diproyeksikan sebesar 30%. Dengan demikian dari target outcome, berupa penambahan masyarakat yang terakses pada sarana sanitasi layak, sebesar 27,237 KK akan diimplementasi melalui anggaran pemerintah sebesar 30% sebagai output, yang setara dengan 8.171 KK, sebagai kapasitas infrastruktur yang dibangun. Berikut Rencana Outcome dan output dalam Renaksi DAS Cilamaya 2025-2029 (Tabel 1). Apapun Rencana Outcome dan output dalam Renaksi DAS Cilamaya 2025-2029, untuk setiap kabupaten masing-masing ditunjukkan dalam Tabel 5.6.



Tabel 5.6 Rencana Target Outcome dan Output Pembangunan Sarana Sanitasi di Tiga Kabupaten Wilayah DAS Cilamaya

	BASE LINE	Perkiraan	REANAKSI DAS CILAMAYA					
TARGET	2023	2024*	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Outcome kumulatif (KK)	210.079	214.405	219.853	225.300	230.747	236.195	241.642	
Outcome per tahun (KK)		4.326	5.447	5.447	5.447	5.447	5.447	27.237
Penambahan Output per tahun (KK)		1.298	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634	8.171
SPALD-S 1 KK		156	196	196	196	196	196	981
SPALD-S 10 KK		311	392	392	392	392	392	1.961
IPAL Skala 50KK		779	981	981	981	981	981	4.903
SR IPAL Permukiman		52	65	65	65	65	65	327
Anggaran Output per Tahun		11.006	13.858	13.858	13.858	13.858	13.858	69.291
SPALD-S 1 KK		779	981	981	981	981	981	4.903
SPALD-S 10 KK		2.180	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	13.727
IPAL Skala 50KK		7.787	9.805	9.805	9.805	9.805	9.805	49.026
SR IPAL Permukiman		260	327	327	327	327	327	1.634

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TARGET	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Kabupaten Karawang	6	56	Outcome kumulatif (KK)	94.993	98.165	101.336	104.508	107.679	
			Outcome per tahun (KK)	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	15.857
			Penambahan Output per tahun (KK)	951	951	951	951	951	4.757
			SPALD-S 1 KK	114	114	114	114	114	571
			SPALD-S 10 KK	228	228	228	228	228	1.142
			IPAL Skala 50KK	571	571	571	571	571	2.854
			SR IPAL Permukiman	38	38	38	38	38	190
			Anggaran Output per Tahun	8.068	8.068	8.068	8.068	8.068	40.341
			SPALD-S 1 KK	571	571	571	571	571	2.854
			SPALD-S 10 KK	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	7.992
			IPAL Skala 50KK	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	28.543
			SR IPAL Permukiman	190	190	190	190	190	951
Kabupaten Purwakarta	5	39	Outcome kumulatif (KK)	81.553	83.438	85.324	87.209	89.094	426.618
			Outcome per tahun (KK)	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	9.426
			Penambahan Output per tahun (KK)	566	566	566	566	566	2.828
			SPALD-S 1 KK	68	68	68	68	68	339
			SPALD-S 10 KK	136	136	136	136	136	679
			IPAL Skala 50KK	339	339	339	339	339	1.697
			SR IPAL Permukiman	23	23	23	23	23	113
			Anggaran Output per Tahun	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796	23.980
			SPALD-S 1 KK	339	339	339	339	339	1.697
			SPALD-S 10 KK	950	950	950	950	950	4.751
			IPAL Skala 50KK	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	16.967
			SR IPAL Permukiman	113	113	113	113	113	566
Kabupaten Subang	5	14	Outcome (KK)	43.306	43.697	44.088	44.478	44.869	220.438
			Outcome per tahun (KK)	391	391	391	391	391	1.953
			Penambahan Output per tahun (KK)	117	117	117	117	117	586
			SPALD-S 1 KK	14	14	14	14	14	70
			SPALD-S 10 KK	28	28	28	28	28	141
			IPAL Skala 50KK	70	70	70	70	70	352
			SR IPAL Permukiman	5	5	5	5	5	23
			Anggaran Output per Tahun	994	994	994	994	994	4.969
			SPALD-S 1 KK	70	70	70	70	70	352
			SPALD-S 10 KK	197	197	197	197	197	984
			IPAL Skala 50KK	703	703	703	703	703	3.516
			SR IPAL Permukiman	23	23	23	23	23	117



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Tabel 5.7 Target Program Penanganan Limbah Domestik

Outcome	Satuan	Jumlah Penduduk	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah KK yang sudah memiliki akses sanitasi layak dan atau belum layak di Karawang	KK	96.958	500	1.000	3.500	6.000	8.500	11.000	14.500
Jumlah KK yang sudah memiliki akses sanitasi layak dan atau belum layak di Purwakarta	KK	70.712	200	800	2.000	3.500	5.000	7.500	10.500
Jumlah KK yang sudah memiliki akses sanitasi layak dan atau belum layak di Subang	KK	45.549	200	800	2.000	3.500	5.000	7.500	10.000
TOTAL	KK	213.219	900	2.600	7.500	13.000	18.500	26.000	35.000
Persentase KK Yang sudah memiliki akses Sanitasi Layak dan/atau belum layak*)	%	-	0,42	1,22	3,52	6,10	8,68	12,19	16,42

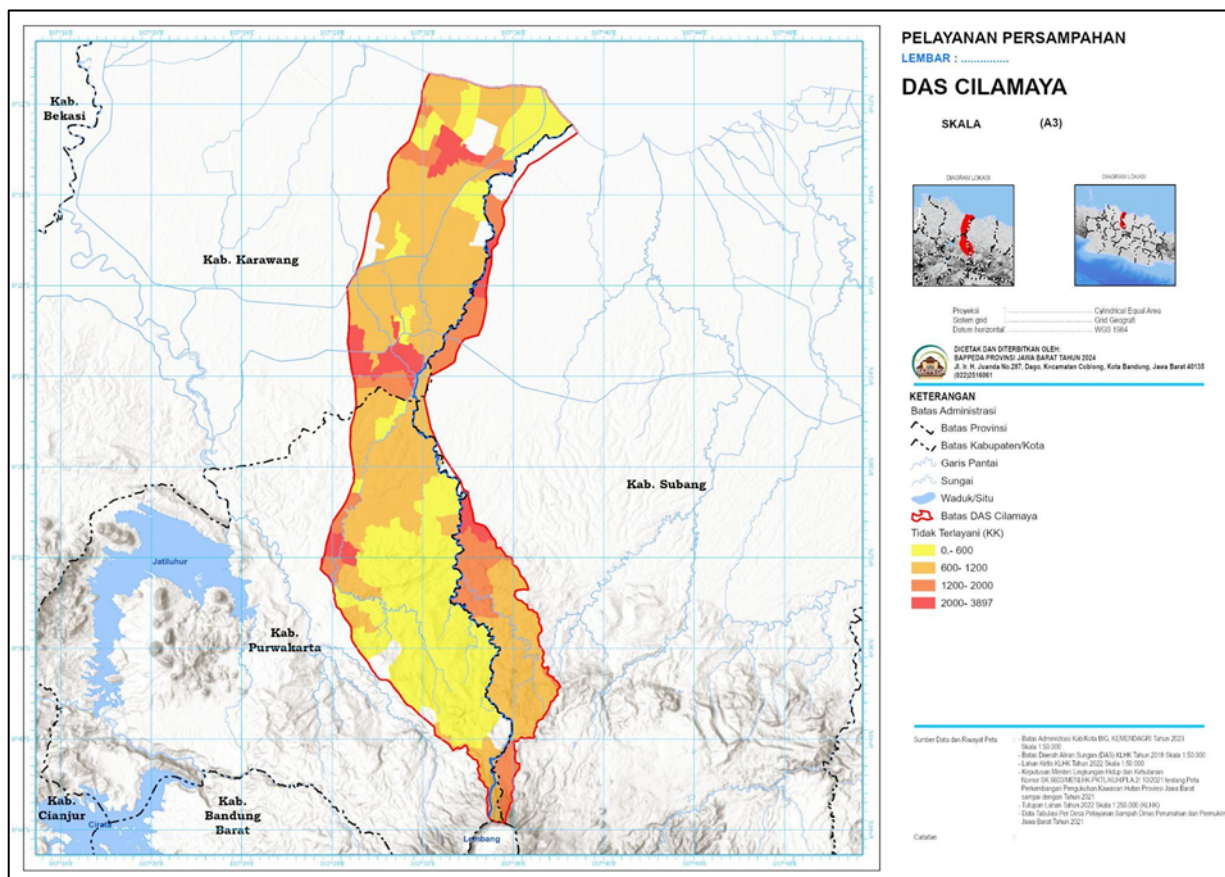
5.5 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN PERSAMPAHAN

Berdasarkan hasil pengolahan data timbulan sampah tahun 2020 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), KLHK, sebesar 554,30 ton/hari sampah bersumber dari 3 kabupaten/ kota. Kabupaten yang menghasilkan timbulan sampah terbesar di DAS Cilamaya adalah Kabupaten Subang dengan persentase 40,70% atau sebesar 225,5 ton/hari, lalu disusul dengan Kabupaten Karawang sebesar 38,32% atau 212,3 ton/hari, dan Kabupaten Purwakarta sebesar 20,97% atau 116,2 ton/hari. Secara spasial Tipologi pelayanan persampahan di wilayah DAS Cilamaya, disajikan sebagai berikut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



Gambar 5.6 Pelayanan Sampah di Wilayah DAS Cilamaya

Cakupan pelayanan di masing-masing kabupaten/kota akan berbeda tergantung pada karakteristik wilayah di masing-masing kabupaten/kota. Rincian persentase cakupan pelayanan, jumlah KK yang terlayani dan jumlah KK yang terlayani pada tahun eksisting (2020) disajikan pada Tabel 5.9 berikut:



Tabel 5.8 Cakupan Pelayanan Persampahan di Kabupaten/Kota DAS Cilamaya

Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Terlayani %*	Jumlah tidak terlayani		
			KK	Jiwa		Jiwa	KK	Jiwa
Kabupaten Karawang	Banyusari	Banyuasih	1.221	4884	42%	2052	708	2832
		Cicinde Selatan	1.697	6788		2851	985	3937
		Cicinde Utara	1.300	5200		2184	754	3016
		Gembongan	1.433	5732		2408	831	3324
		Gempol	1.879	7516		3157	1090	4359
		Gempolkolot	1.324	5296		2225	768	3071
		Jayamukti	1.903	7612		3198	1104	4414
		Kutaraharja	1.355	5420		2277	786	3143
		Mekarasih	1.341	5364		2253	778	3111
		Pamekaran	1.081	4324		1817	627	2507
		Talunjaya	986	3944		1657	572	2287
		Tanjung	1.678	6712		2820	973	3892
		Total	17.198	68.792		28.899	9.976	39.893
	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	1.629	6516		2737	945	3779
		Bayur Lor	1.173	4692		1971	681	2721
		Kiara	1.997	7988		3355	1159	4633
		Langensari	1.404	5616		2359	815	3257
		Muktijaya	1.487	5948		2499	863	3449
		Pasirjaya	2.252	9008		3784	1306	5224
		Pasirukem	991	3964		1665	575	2299
		Sukajaya	1.679	6716		2821	974	3895
		Sukamulya	2.219	8876		3728	1287	5148
		Total	14.831	59.324		24.919	8.605	34.405
	Cilamaya Wetan	Cikalong	1.210	4840		2033	702	2807
		Cikarang	1.067	4268		1793	619	2475
		Cilamaya	3.033	12132		5096	1759	7036
		Mekarmaya	1.053	4212		1770	611	2442
		Muara	874	3496		1469	507	2027
		Muarabaru	1.426	5704		2396	827	3308
		Rawagempol Kulon	1.441	5764		2421	836	3343
		Rawagempol Wetan	1.131	4524		1901	656	2623
		Sukakerta	1.824	7296		3065	1058	4231
		Sukatani	6.719	26876		11288	3897	15588
		Tegalsari	260	1040		437	151	603
		Tegalwaru	794	3176		1334	461	1842
		Total	20.832	83.328		35.003	12.084	48.325
	Jatisari	Balonggandu	3.670	14680		6166	2129	8514
		Barugbug	1.326	5304		2228	769	3076
		Cikalongsari	1.456	5824		2447	845	3377
		Cirejag	1.379	5516		2317	800	3199
		Jatibaru	1.643	6572		2761	953	3811
		Jatiragas	1.488	5952		2500	863	3452
		Jatisari	1.411	5644		2371	819	3273
		Jatiwangi	1.527	6108		2566	886	3542
		Kalijati	1.128	4512		1896	654	2616
		Mekarsari	975	3900		1638	566	2262
		Pacing	1.397	5588		2347	811	3241
		Situdam	6.219	24876		10448	3607	14428
		Sukamekar	1.081	4324		1817	627	2507
		Telarsari	1.359	5436		2284	788	3152



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Terlayani		Jumlah tidak terlayani	
			KK	jiwa	%*	Jiwa	KK	Jiwa
Kabupaten Purwakarta	Kotabaru	Total	26.059	104.236	47,00%	43.786	15.117	60.450
		Jomin Barat	2.375	9500		3990	1378	5510
		Jomin Timur	1.830	7320		3075	1062	4245
		Pangulah Baru	1.518	6072		2551	881	3521
		Pangulah Selatan	3.332	13328		5598	1933	7730
		Pangulah Utara	3.878	15512		6516	2249	8996
		Pucung	5.170	20680		8686	2999	11994
		Wancimekar	3.791	15164		6369	2199	8795
		Total	21.894	87.576		36.785	12.701	50.791
	Tirtamulya	Bojongsari	1.162	4648	47,00%	1953	674	2695
		Cipondoh	1.681	6724		2825	975	3899
		Kamurang	1.330	5320		2235	772	3085
		Parakanmulya	1.171	4684		1968	679	2716
		Total	5.344	21.376		8.981	3.100	12.395
	Total Kab. Karawang		106.158	424.632		178.373	61.583	246.259
	Bungursari	Bungursari	1.053	4212	47,00%	1980	558	2232
		Cibening	2.951	11804		5548	1564	6256
		Cibodas	1.695	6780		3187	899	3593
		Cibungur	1.149	4596		2161	609	2435
		Cikopo	1.944	7776		3655	1031	4121
		Ciwangi	2.568	10272		4828	1361	5444
		Karangmukti	1.015	4060		1909	538	2151
		Total	12.375	49.500		23.268	6.560	26.232
	Campaka	Benteng	890	3560	47,00%	1674	472	1886
		Campaka	1.192	4768		2241	632	2527
		Campakasari	1.498	5992		2817	794	3175
		Cijaya	1.184	4736		2226	628	2510
		Cijunti	1.387	5548		2608	735	2940
		Cikumpay	1.823	7292		3428	966	3864
		Cimahi	1.525	6100		2867	809	3233
		Cirende	670	2680		1260	355	1420
		Cisaat	1.152	4608		2166	611	2442
		Kertamukti	1.183	4732		2225	627	2507
		Total	12.504	50.016		23.512	6.629	26.504
	Cibatu	Cibatu	890	3560	47,00%	1674	472	1886
		Cibukamanah	675	2700		1269	358	1431
		Cikadu	698	2792		1313	370	1479
		Cilandak	1.356	5424		2550	719	2874
		Cipancur	519	2076		976	275	1100
		Ciparungsari	854	3416		1606	453	1810
		Cipinang	1.193	4772		2243	633	2529
		Cirangkong	1.012	4048		1903	537	2145
		Karyamekar	839	3356		1578	445	1778
		Wanawali	444	1776		835	236	941
		Total	8.480	33.920		15.947	4.498	17.973
	Kiarapedes	Cibeber	678	2712	47,00%	1275	360	1437
		Ciracas	762	3048		1433	404	1615
		Gardu	631	2524		1187	335	1337
		Kiarapedes	893	3572		1679	474	1893
		Margaluyu	735	2940		1382	390	1558
		Mekarjaya	803	3212		1510	426	1702
		Parakan Garokgek	984	3936		1850	522	2086
		Pusakamulya	1.342	5368		2523	712	2845
		Sumbersari	508	2032		956	269	1076
		Taringgul Landeuh	601	2404		1130	319	1274
		Total	7.937	31.748		14.925	4.211	16.823
	Pasawahan	Cihuni	828	3312	47,00%	1557	439	1755
		Margasari	625	2500		1175	332	1325



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Terlayani		Jumlah tidak terlayani	
			KK	jiwa	%*	Jiwa	KK	Jiwa
		Pasawahan	1.291	5164	17,42%	2428	684	2736
		Pasawahankidul	908	3632		1708	481	1924
		Selaawi	1.270	5080		2388	673	2692
		Warungkadu	1.018	4072		1914	540	2158
		Total	5.940	23.760		11.170	3.149	12.590
	Pondok Salam	Gurudug	765	3060		1439	406	1621
		Parakansalam	534	2136		1004	283	1132
		Salam Mulya	1.100	4400		2068	583	2332
		Salem	948	3792		1783	503	2009
		Situ	683	2732		1285	362	1447
		Total	4.030	16.120		7.579	2.137	8.541
	Purwakarta	Ciseureuh	4.021	16084		7560	2131	8524
		Citalang	3.426	13704		6441	1816	7263
		Munjuljaya	4.421	17684		8312	2343	9372
		Tegalmunjul	1.500	6000		2820	795	3180
		Total	13.368	53.472		25.133	7.085	28.339
	Wanayasa	Babakan	1.272	5088		2392	674	2696
		Legokhuni	825	3300		1551	438	1749
		Sukadami	797	3188		1499	423	1689
		Taringgul Tengah	1.116	4464		2099	592	2365
		Taringgul Tonggoh	1.088	4352		2046	577	2306
		Wanasari	1.145	4580		2153	607	2427
		Wanayasa	1.747	6988		3285	926	3703
		Total	7.990	31.960		15.025	4.237	16.935
	Total Kab. Purwakarta		72.624	290.496		136.559	38.506	153.937
Kabupaten Subang	Blanakan	Cilamaya Girang	2.684	10736	17,42%	1871	2217	8865
		Cilamaya Hilir	1.930	7720		1345	1594	6375
		Rawamekar	921	3684		642	761	3042
		Total	5.535	22.140		3.858	4.572	18.282
	Ciasem	Pinangsari	2.231	8924		1555	1843	7369
		Sukahaji	2.641	10564		1841	2181	8723
		Total	4.872	19.488		3.396	4.024	16.092
	Cipeundeuy	Cimayasari	1.965	7860		1370	1623	6490
		Cipeundeuy	2.934	11736		2045	2423	9691
		Lengkong	1.995	7980		1391	1648	6589
		Wantilan	2.358	9432		1644	1947	7788
		Total	9.252	37.008		6.450	7.641	30.558
	Dawuan	Jambelaer	2.006	8024		1398	1657	6626
		Total	2.006	8.024		1.398	1.657	6.626
	Kalijati	Banggalamulya	1.076	4304		750	889	3554
		Jalupang	1.360	5440		948	1123	4492
		Total	2.436	9.744		1.698	2.012	8.046
	Pabuaran	Balebandung Jaya	995	3980		694	822	3286
		Cihambulu	1.265	5060		882	1045	4178
		Karanghegar	2.415	9660		1683	1995	7977
		Total	4.675	18.700		3.259	3.862	15.441
	Patokbeusi	Jatiragas Hilir	1.998	7992		1393	1650	6599
		Tambakjati	3.390	13560		2363	2800	11197
		Tanjungrasa	1.608	6432		1121	1328	5311
		Tanjungrasa Kidul	1.583	6332		1104	1307	5228
		Total	8.579	34.316		5.981	7.085	28.335
	Serangpanjang	Cijengkol	1.673	6692		1166	1382	5526
		Cikujang	1.263	5052		881	1043	4171
		Cintamekar	1.004	4016		700	829	3316
		Cipancar	1.589	6356		1108	1312	5248
		Ponggang	1.402	5608		977	1158	4631
		Talagasari	1.263	5052		881	1043	4171
		Total	8.194	32.776		5.713	6.767	27.063



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Terlayani		Jumlah tidak terlayani	
			KK	jiwa	%*	Jiwa	KK	Jiwa
	Total Kab. Subang		45.549	182.196		31.753	37.620	150.443
Total Das Cilamaya			224.331	897.324		346.685	137.709	550.639

Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan data pada **Tabel diatas**, masih terdapat 137.709 KK di sekitar cakupan wilayah DAS Cilamaya yang belum mendapatkan pelayanan persampahan. Kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan tertinggi adalah Kabupaten Purwakarta dengan 47%, disusul oleh Kabupaten Karawang dengan 42%, dan Kabupaten Subang 17,42%. Sebanyak 137.709 KK jumlah penduduk yang belum terlayani infrastruktur persampahan tersebar di 142 desa/kelurahan.

Dari kondisi tersebut dilakukan pendekatan untuk dapat mengurangi timbulan sampah yang ada atau terdapat pengurangan jumlah KK yang belum terlayani infrastruktur persampahan melalui pembangunan TYP3R atau TPST, pemilahan, pengolahan sampah organik dan optimalisasi TPA eksisting. Sehingga direncanakan pengurangan 15% jumlah kk yang belum terlayani setiap tahunnya sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 5.9 Target Program Penanganan Persampahan

Outcome	Satuan	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah KK belum terlayani persampahan Karawang	KK	61.583	52.346	44.494	37.820	32.147	27.325	23.226	19.742
Jumlah KK belum terlayani persampahan Purwakarta	KK	38.506	32.730	27.821	23.647	20.100	17.085	14.523	12.344
Jumlah KK belum terlayani persampahan Subang	KK	37.620	33.858	32.165	30.557	29.029	27.578	26.199	24.889
Jumlah KK belum terlayani persampahan Total DAS Cilamaya	KK	137.709	118.934	104.479	92.024	81.276	71.988	63.947	56.975
Persentase pengurangan Jumlah KK belum terlayani persampahan	%	-	13,63	24,13	33,18	40,98	47,72	53,56	58,63



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

industri, sehingga diperlukan ada intervensi dari pemerintah untuk pembangunan IPAL. Berikut target Program Penanganan Limbah Industri.

Tabel 5.10 Target Program Penanganan Limbah Industri

Outcome	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Industri yang Telah Terbina Dan Terawasi, Tata Dalam Pengelolaan Lingkungan	Industri	39	45	51	58	65	72	80	87
	%	44,83	51,72	58,62	66,67	74,71	82,76	91,95	100

5.7 INTERVENSI PROGRAM PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN

Beberapa aktivitas warga di DAS Cilamaya diantaranya adalah beternak. Sehingga jumlah ternak di DAS cilamaya cukup banyak dengan berbagai jenis ternak. Pada Rancangan Renaksi ini, fokus jenis ternak yang akan diintervensi adalah jenis ruminansia Besar yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, dan Ruminansia kecil yaitu domba serta kambing. Parameter utama beban pencemar dari limbah peternakan ini adalah BOD, dimana ini merupakan salah satu beban pencemar utama yang akan menentukan Indeks Kualitas Air di DAS Cilamaya. Untuk itu penanganan limbah peternakan di DAS Cilamaya sebagaimana kajian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat akan dilakukan pada peternakan dengan radius 1 – 2 km dari sungai.

Beberapa wilayah intervensi di Kabupaten Purwakarta yaitu di 8 kecamatan antara lain Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondok Salam, Purwakarta dan kecamatan Wanayasa. Diantara ke delapan kecamatan terdapat 24 desa yang akan menjadi target intervensi. Di wilayah kabupaten Subang terdapat enam kecamatan yang akan menjadi wilayah intervensi yaitu Kecamatan. Balanakan, Ciasem, Cipendeuy, Pabuaran, Patokbeusi dan kecamatan Serangpanjang. Dari keenam kecamatan yang akan menjadi wilayah intervensi dikabupaten Subang terdapat sepuluh desa yang menjadi perhatian dari tim pokja peternakan. Selanjutnya, wilayah kabupaten Karwang yang hanya memiliki tiga wilayah kecamatan yang akan diintervensi yaitu kecamatan banyusari, Cilamaya Wetan dan Kecamatan Jatisari dan terdapat sebanyak enambelas desa yang siap untuk diintervensi kepada para peternak.





Persebaran ternak di wilayah DAS Cilamaya yaitu di tiga kabupaten yaitu Purwakarta, Subang dan Karawang masing masing memiliki jumlah yang berdekatan yaitu diangka 1.000 an, tetapi untuk jumlah ternak lebih banyak di komoditas ruminansia kecil yaitu domba dilanjut sapi potong. Beberapa peternakan sifatnya tidak perlu diintervensi karena sudah langsung diolah menjadi pupuk, namun terdapat juga seperti di Kabupaten Subang perusahaan peternakan yang sudah mempunyai IPAL namun membutuhkan pembinaan lebih intensif untuk memaksimalkan OP nya. Di Kabupaten Subang pun peternakan rakyat cukup banyak, sehingga pembinaan tadi sangat diperlukan. Sehingga diperlukannya monitoring dan evaluasi (monev) secara berkelanjutan di tiap-tiap perusahaan peternakan bahwa IPAL berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Persebaran ternak di tiga kabupaten di DAS Cilamaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Persebaran ternak di tiga kabupaten di DAS Cilamaya

NO	KABUPATEN	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KERBAU	DOMBA	KAMBING	TOTAL
1	Purwakarta	96	493	106	348	0	1.043
2	Subang	0	149	90	911	35	1.185
3	Karawang	22	14	0	1.100	35	1.171
JUMLAH		118	656	196	2.359	70	3.399

Pada rancangan renaksi ini 280 ekor ekor per tahun masih dikatakan cukup realistis, namun dapat dilakukan secara kontinu pada tahun ke 3 s.d. tahun ke 5, sedangkan tahun pertama dan kedua sifatnya baru pembinaan dan pelatihan, serta beberapa upaya fisik. Sifatnya intervensi kedepan dalam bentuk pembangunan UPPO (bangunan dan peralatan), serta Biogas. Sedangkan untuk Kascing belum dapat dioptimalkan di DAS Cilamaya karena belum dikaji pemasarannya/offtakernya. Rencana Penanganan Limbah peternakan terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5.12 Target Program Penanganan Limbah Peternakan

Outcome	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Ternak yang limbahnya terolah melalui BIOGAS atau UPPO	ekor	60	280	280	280	280	280
Jumlah Kumulatif Ternak yang limbahnya terolah melalui BIOGAS atau UPPO	ekor	60	380	750	1.120	1.490	1.680
Presentase Jumlah Ternak yang Limbahnya Terolah	%	1,77	11,18	22,07	32,95	43,84	54,72

5.8 INTERVENSI PROGRAM PENEGAKAN HUKUM

Kelompok Kerja Penegakan Hukum DAS Cilamaya melaksanakan Pembinaan, Pengawasan serta Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau/kegiatan yang berada di DAS Cilamaya. Salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengawasan. Mekanisme pengawasan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan ini merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan juga pelanggaran hukum. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sasarannya adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke Sungai Cilamaya tanpa pengolahan terlebih dahulu dan tidak menaati kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan menginspeksi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau insidental. Pengawasan reguler dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan insidental dilakukan apabila memenuhi indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi, adanya pengaduan dari Masyarakat. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup. Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menimbulkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh PPLH akan memberikan usulan rekomendasi dapat berupa penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, penegakan hukum pidana dan/atau pelimpahan kepada instansi pusat, pemerintah daerah provinsi lain, perangkat daerah provinsi terkait, atau pemerintah daerah kabupaten kota. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.



Sampai dengan Tahun 2023, DLH Provinsi Jabar bersama dengan DLH Kabupaten Kota telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan khususnya kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Tabel 5.13 Bentuk Penegakan Hukum yang telah dilakukan di DAS Cilamaya

Kabupaten	Jumlah Penegakan Hukum	Keterangan
Purwakarta	20 Perusahaan	6 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Jabar dan 1 perusahaan saluran <i>bypass</i>
		4 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Purwakarta (3 Rekomendasi SA dari DLH Jabar)
		1 Sanksi Administrasi Teguran Tertulis oleh DLH Kab. Purwakarta
		9 Perusahaan dalam progress penegakan hukum
Subang	5 Perusahaan	1 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Jabar dan 1 perusahaan saluran <i>bypass</i>
		4 Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Subang (3 Rekomendasi SA dari DLH Jabar)
Karawang	1 Perusahaan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah oleh DLH Kab. Karawang (Rekomendasi SA dari DLH Jabar)

Dalam hal penegakan hukum lingkungan akan sangat berkaitan dengan kegiatan program penanganan limbah industri, dimana jika dalam pembinaan dan pemantauannya ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maka akan segera dilakukan penegakan hukum melalui Pengawasan terlebih dahulu.

Berdasarkan jumlah industri yang ada di DAS Cilamaya saat ini berjumlah 87 industri, maka target outcome yang dimunculkan adalah persentase penataan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pada akhir 2029 adalah 100%, dengan harapan sudah jauh berkurang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Industri/kegiatan di DAS Cilamaya sebagaimana Tabel 5.14. Namun capaian kinerja dari program ini jika lebih rendah artinya sudah bernilai positif, bahwa pemberian sanksi kepada pelaku usaha/kegiatan sudah makin berkurang.



Tabel 5.14 Rencana Target Outcome Program Penegakan Hukum DAS Cilamaya

Outcome	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	Kegiatan	N/A	26	10	10	10	10	10	11
Jumlah Kumulatif Pelaku Usaha yang diawasi	Kegiatan	N/A	26	36	46	56	66	76	87
Presentase Penaatan Hukum	%		29,87	41,37	52,87	64,37	75,86	87,36	100

5.9 INTERVENSI PROGRAM EDUKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Masih kurangnya penegakan hukum dan edukasi dalam segala aspek, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan DAS Cilamaya. Saat ini di DAS Cilamaya, pencemaran air sungai disebabkan oleh banyaknya air limbah masuk ke dalam sungai yang berasal dari sumber pencemaran limbah industri, domestik, rumah sakit, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam upaya mencegah pencemaran tersebut.

Langkah intensif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan kampanye komunikasi kesehatan agar bisa mengkomunikasikan perilaku bersih dan sehat melalui penanaman PHBS kepada masyarakat sekitar Cilamaya, khususnya dikarenakan faktor pencemaran terbesar saat ini merupakan tingginya kandungan fecal coli yang dihasilkan dari perilaku masyarakat yang tidak sehat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran adalah melalui edukasi dan Hubungan Masyarakat yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat baik dari institusi Pendidikan, Institusi Kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri terhadap lingkungan. Langkah yang dilakukan dalam mengedukasi institusi Pendidikan dilakukan melalui strategi edukasi dalam bentuk perwujudan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skema 3R (Reduce, Reuse, dan Recycling), atau dengan memberikan penyuluhan terhadap kesehatan lingkungan, atau juga dengan menciptakan lingkungan sekitar yang lebih peduli lagi terhadap lingkungan seperti Program Kampung Iklim dan juga lingkungan Desa/Kelurahan yang berbudaya lingkungan seperti ecovillage yang saat ini digalakkan oleh DLH.



Dengan besarnya tingkat pencemaran khususnya pada segmen tengah sampai hilir aliran DAS Cilamaya sangat diperlukan kampanye yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat perihal Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) atau kampanye untuk menciptakan lingkungan sekitar yang lebih berbudaya lingkungan dan peka terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi akibat kerusakan DAS yang terjadi. Hingga pada akhirnya tercapai tujuan meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat melalui komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif. Pemberdayaan Masyarakat akan focus pada pelibatan Komunitas, Masyarakat desa dalam kegiatan penanganan pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya, sehingga dampaknya akan lebih cepat dan efektif langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga adanya program sekolah adiwiyata menjadikan program ini akan lebih efektif sehubungan pada DAS Cilamaya beberapa sekolah sudah mendapatkan status sekolah Adiwiyata sejak 2019.

Adapun target outcome dari program edukasi dan hubungan masyarakat ini adalah persentase peningkatan masyarakat yang teredukasi dan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan seperti tercantum dalam Tabel 5.15 dibawah ini.

Tabel 5.15 Target outcome Program Edukasi dan Hubungan Masyarakat

Output	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Pelajar atau Sekolah yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan	Sekolah			10	10	10	10	10
Jumlah Masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan	Orang			25	25	25	25	25
Jumlah Masyarakat/penyuluh kesehatan diberikan edukasi kesehatan	Orang			20	20	20	20	20

Outcome	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Masyarakat yang teredukasi dan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan	%		7,5	26	44,5	63	81,5	100

5.10 INTERVENSI PROGRAM PENGELOLAAN DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI

Pengelolaan data dan informasi akan menjadi kunci dalam menjalankan rencana aksi ini, dimana metadata kaitan DAS Cilamaya akan dapat lebih terpantau dan terupdate. Kondisi saat ini belum terdapat media kanal ataupun sistem pengelolaan data DAS Cilamaya, sehingga aktivitas maupun kondisi terkini dari DAS Cilamaya tidak bisa dijangkau dan diakses oleh masyarakat sekitar maupun Pemerintahan untuk langkah tindaklanjut yang perlu dilakukan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Dalam rencana aksi ini akan dibuat sistem informasi khusus DAS Cilamaya dalam berbagai media/kanal publikasi sehingga dapat lebih terpantau oleh masyarakat. Pada kenyataannya walaupun rencana aksi ini baru akan dilakukan pada kurun waktu 2025-2029 namun beberapa kegiatan sudah dilakukan di tahun 2024 oleh pemerintah baik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten. Hal ini yang kemudian perlu dipublikasikan untuk mengetahui kondisi update DAS Cilamaya agar tindakan yang akan ditempuh akan lebih efektif untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya.

Dalam hal ini, pemantauan kualitas air juga menjadi bagian dari program ini. Pemantauan kualitas air menunjukkan gambaran kondisi lingkungan terutama sumber air seperti sungai, waduk, situ dsb. Pemantauan kualitas air Sungai Cilamaya dilakukan oleh beberapa instansi baik pusat, daerah maupun BUMN. Untuk itu diperlukan pengintegrasian data hasil pemantauan di berbagai institusi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai Cilamaya yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Pemantauan dilakukan berdasarkan kewenangan dari masing-masing daerah dan kepentingan dari institusi tersebut.

Data-data yang dihasilkan dari aktivitas/kegiatan POKJA hendaknya dapat dilakukan analisa atau pengolahan oleh masing-masing POKJA, dan disampaikan kepada Pokja Data, Informasi dan Publikasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Data-data ini bisa berupa data penanaman pohon atau luasan lahan kritis yang berkurang dari POKJA lahan kritis, atau kondisi persampahan dari POKJA Persampahan, data industry yang telah ditindak akibat pelanggaran yang dilakukan dan data lainnya. Untuk data yang akan dipublikasikan setiap tahunnya minimal berjumlah 10 data yaitu data dari 9 program yang dilakukan dalam Renaksi PPK DAS Cilamaya dan data pemantauan kualitas air DAS Cilamaya yang telah diolah. Adapun jumlah media kanal yang akan digunakan dapat berupa Instagram, Youtube, dan Website, ataupun disinergikan dengan Command Centre Citarum yang saat ini sudah operasional.



Tabel 5.16 Target outcome Program Data, Informasi, dan Publikasi

Output	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah data yang terpublikasi	Data		10	10	10	10	10	10
Jumlah Kanal Media Cilamaya yang dikelola	Media		3	3	3	3	3	3

Outcome	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Presentase Pelayanan data dan informasi yang dapat diakses	%		100	100	100	100	100	100

Dalam mendukung ketercapaian outcome (program), tentu perlu ada dukungan sumber anggaran yang yang diharapkan berdampak selaras juga pada peningkatan kualitas Sungai Cilamaya. Maka dari itu dibentuklah matriks *Overall Work Plan* (OWP) yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yaitu tahun 2025 s.d 2029 dengan rincian sebagaimana Tabel berikut.



Tabel 5.17 Rincian Overall Work Plan (OWP) 2025-2029

1. Overall Work Plan 2025-2029

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	67.867	483.850	-	-	218.000	-	-	-	769.717
APBD Provinsi	19.525	5.036	251.007	536	1.676.835	14.069	4.374	1.456	1.270	1.974.108
APBD Kab/Kota	-	5.875	-	-	186.339	-	-	-	-	192.214
CSR	-	-	-	-	252	-	-	-	-	252
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	2.567	-	-	-	24	2.682	-	-	-	5.273
TOTAL (Rp Juta)	22.092	78.778	734.857	536	1.863.450	234.751	4.374	1.456	1.270	2.941.564

2. Overall Work Plan 2025-2029 per Program

Program	Anggaran (Rp Juta)
Lahan Kritis	22.092
Air Limbah Domestik	78.778
Sampah	734.857
Limbah Industri	536
Limbah Ternak	1.863.450
SDA	234.751
Gakum	4.374
Edukasi	1.456
Datin dan Humas	1.270
TOTAL	2.941.564

3. Overall Work Plan 2025

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	13.933	243.250	-	-	34.000	-	-	-	291.183
APBD Provinsi	3.627	1.486	32.166	72	-	1.099	875	201	254	39.780
APBD Kab/Kota	-	1.055	-	-	-	-	-	-	-	1.055
CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	459	-	-	-	-	365	-	-	-	823
TOTAL (Rp Juta)	4.086	16.475	275.416	72	-	35.464	875	201	254	332.841

4. Overall Work Plan 2026

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	13.933	60.600	-	-	136.000	-	-	-	210.533
APBD Provinsi	3.385	1.037	124.866	87	419.265	7.810	875	246	254	557.825
APBD Kab/Kota	-	1.167	-	-	46.587	-	-	-	-	47.754
CSR	-	-	-	-	63	-	-	-	-	63
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	600	-	-	-	6	458	-	-	-	1.064
TOTAL (Rp Juta)	3.985	16.138	185.466	87	465.921	144.268	875	246	254	817.239

5. Overall Work Plan 2027

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	13.333	60.000	-	-	46.000	-	-	-	119.333
APBD Provinsi	4.245	1.037	32.139	107	419.220	1.715	875	291	254	459.883
APBD Kab/Kota	-	1.168	-	-	46.587	-	-	-	-	47.756
CSR	-	-	-	-	63	-	-	-	-	63
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	515	-	-	-	6	564	-	-	-	1.084
TOTAL (Rp Juta)	4.245	15.538	92.139	107	465.873	461.279	875	291	254	1.028.119



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

6. Overall Work Plan 2028

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	13.333	60.000	-	-	1.000	-	-	-	74.333
APBD Provinsi	4.376	737	32.139	122	419.130	1.720	875	337	254	459.689
APBD Kab/Kota	-	1.242	-	-	46.577	-	-	-	-	47.819
CSR	-	-	-	-	63	-	-	-	-	63
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	500	-	-	-	6	620	-	-	-	1.126
TOTAL (Rp Juta)	4.876	15.313	92.139	122	465.776	3.340	875	337	254	583.031

7. Overall Work Plan 2029

Sumber Pendanaan	LK	ALD	Sampah	Industri	Ternak	SDA	Gakum	Edu	Datin	TOTAL (Rp Juta)
APBN	-	13.333	60.000	-	-	1.000	-	-	-	74.333
APBD Provinsi	3.892	737	29.697	149	419.220	1.725	875	382	254	456.931
APBD Kab/Kota	-	1.242	-	-	46.587	-	-	-	-	47.829
CSR	-	-	-	-	63	-	-	-	-	63
Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUMN	494	-	-	-	6	676	-	-	-	1.176
TOTAL (Rp Juta)	4.386	15.313	89.697	149	465.876	3.401	875	382	254	580.333

8. Target Outcome 2025-2029

Outcome	2025	2026	2027	2028	2029
Tertanganinya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga non hutan di DAS Ciliwung (Ha)	16,035	32,07	48,105	64,14	80.174,99
Penambahan KK terakses ke infrastruktur Sanitasi Layak (KK)	18.502,4	37,005	55,507	74,01	92,512
Presentase industri terbina dan memenuhi baku mutu (%)	16.092	32.184	48.276	64.368	80,46
Persentase pengurangan Tonase Sampah belum terlayani (%)	11.726	23.452	35.178	46.904	58,63
Persentase jumlah ternak yang limbahnya terolah (%)	11.142	22.284	33.426	44.568	55,71
Persentase Sisa Genangan Banjir (%)	8.356	16.712	25.068	33.424	41,78
Persentase Penataan Hukum terhadap pelaku usaha dan atau Kegiatan (%)	20	40	60	80	100
Persentase Peningkatan Masyarakat yang teredukasi dan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan (%)	20	40	60	80	100
Persentase Pelayanan data dan informasi yang dapat diakses (%)	20	40	60	80	100



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS
Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029
Tertangannya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Target										Sumber Dana											
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		(APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana										
		Vol	Biaya (Juta)					Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)														
TOTAL ANGGARAN																		463,45	4.086	484,08	3.985	520,02	4.760	497,24	4.876	477,12	4.386	22,092	
I.	Dalam Kawasan Hutan Negara	212.920	483,91	0	-	-	-	86,45	459	113,08	599,95	97,02	514,74	94,24	499,99	93,12	494,05												
A.	RHL secara Vegetatif																												
1	Pembuatan Bibit & Penanaman/Reboisasi	35.288	80,20	Purwakarta	Campaka	Cirende		-		28,95	153,59	12,35	65,52	23,70	125,74	15,20	80,64	BUMN	Perhutani										
		1.940	4,41	Purwakarta	Campaka	Kertamukti		-		4,41	23,40	-	-	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		36.054	81,94	Purwakarta	Cibatu	Cibukamanah		-		-	-	-	32,00	169,78	49,94	264,96	-	BUMN	Perhutani										
		7.550	17,16	Purwakarta	Cibatu	Karyamekar		-		17,16	91,04	-	-	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		17.134	38,94	Purwakarta	Cibatu	Wanawali		-		-	-	28,59	151,68	6,05	32,10	4,30	22,81	BUMN	Perhutani										
		2.156	4,90	Purwakarta	Kiarapedes	Garuda		-		4,90	26,00	-	-	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		3.084	7,01	Purwakarta	Kiarapedes	Karangpedas		-		7,01	37,19	-	-	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		22.088	50,20	Purwakarta	Kiarapedes	Margaluyu		40,20	213,28	-	-	-	-	-	10,00	53,06	-	BUMN	Perhutani										
		18.590	42,25	Purwakarta	Kiarapedes	Mekarjaya		35,25	187,02	-	-	7,00	37,14	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		4.932	11,21	Purwakarta	Kiarapedes	Taringgulandeh		-	-	11,21	59,47	-	-	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		1.672	3,80	Purwakarta	Pasawahan	Selaawi		-	-	-	-	3,80	20,16	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
		27.905	63,42	Subang	Cipeundeuy	Cimayasari		-	-	14,98	79,48	23,20	123,09	11,56	61,33	13,68	72,58	BUMN	Perhutani										
		4.061	9,23	Subang	Kalijati	Banggalamulya		-	-	1,73	9,18	-	-	7,50	39,79	-	-	BUMN	Perhutani										
		12.976	29,49	Subang	Serang Panjang	Ponggang		-	-	10,00	53,06	6,06	32,15	13,43	71,25	-	-	BUMN	Perhutani										
		17.490	39,75	Subang	Serang Panjang	Talagasari		11,00	58,36	12,73	67,54	16,02	84,99	-	-	-	-	BUMN	Perhutani										
II.	Luar Kawasan Hutan Negara																												
A.	RHL secara Vegetatif																												
1	Penanaman Hutan Rakyat	-	Ha	Purwakarta	Cibatu	Cirangkong		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		75,00	Ha			Wanawali		-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	1.125,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		100,00	Ha		Kiarapedes	Margaluyu		-	-	100,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha			Parakangarokgek		50,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Pasawahan	Pasawahan		-	-	-	-	-	-	50,00	750,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Pondoksalam	Gurudug		50,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		100,00	Ha		Wanayasa	Taringgul Tengah		-	-	-	-	100,00	1.500,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha			Legokhuni		-	-	-	-	50,00	750,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha	Subang	Dawuan	Jambelaer		-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	375,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Kalijati	Banggalamulya		-	-	-	-	-	-	50,00	750,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Serangpanjang	Ponggang		-	-	-	-	-	-	50,00	750,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha			Talagasari		-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	375,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
2	Pembuatan Persemaian	475,00	-	-	-	-	-	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	75,00	300,00	100,00	400,00												
		50,00	Ha	Purwakarta	Cibatu	Cirangkong		-	-	50,00	200,00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha			Wanawali		50,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		-	Ha		Kiarapedes	Margaluyu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha			Parakangarokgek		25,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha			Taringgul Landeuh		25,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha		Pasawahan	Pasawahan		-	-	-	-	25,00	100,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Pondoksalam	Gurudug		-	-	-	-	50,00	200,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Wanayasa	Taringgul Tengah		-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha			Legokhuni		-	-	-	-	-	-	25,00	100,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha	Subang	Cipeundeuy	Cimayasari		-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha			Lengkong		-	-	25,00	100,00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha		Dawuan	Jambelaer		-	-	25,00	100,00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		50,00	Ha		Kalijati	Banggalamulya		-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	200,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		25,00	Ha		Serangpanjang	Ponggang		-	-	-	-	25,00	100,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
3	Penanaman komoditas tanaman perkebunan pada lahan kritis di DAS Cilamaya	500,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-												
		500,00	Ha					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		APBD Provinsi	Dinas Perkebunan Prov Jabar										
B.	RHL secara Sipil Teknis																												
1	Pembuatan Dam Penahan (DPn)	4,00	Ha	Purwakarta	Wanayasa	Babakan		-	-	-	-	4	220,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		6,00	Ha			Taringgul Tengah		-	-	-	-	6	330,00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		6,00	Ha		Kiarapedes	Pusakamulya		-	-	-	-	-	-	6	330,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		8,00	Ha			Parakangarokgek		-	-	-	-	-	-	8	440,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		8,00	Ha			Cirakas		-	-	-	-	-	-	8	440,00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		8,00	Ha			Cibeber		-	-	-	-	-	-	-	-	8	440,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		6,00	Ha			Sumbersari		-	-	-	-	-	-	-	-	6	330,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		8,00	Ha		Kiarapedes			-	-	-	-	-	-	-	-	8	440,00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										
		6,00	Ha			Margaluyu		-	-	6	330,00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov Jabar										



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS
Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029
Tertanganinya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029		Sumber Dana	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	(APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	
		Vol	Biaya (Juta)																
TOTAL ANGGARAN								463.45	4.086	484.08	3.985	520.02	4.760	497.24	4.876	477.12	4.386	22.092	
		6.00	Ha			Mekarjaya		-	-	6	330.00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		4.00	Ha			Taringgul Landeuh		-	-	4	220.00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		6.00	Ha	Subang	Serangpanjang	Cipancar		6	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		8.00	Ha			Ponggang		8	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		6.00	Ha			Talagasari		6	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		8.00	Ha		Dawuan	Jambelker		-	-	-	-	8	440.00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
2	Pembuatan Gully Plug (GP)	12.00	Ha	Purwakarta	Wanayasa	Babakan		12	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		15.00	Ha			Taringgul Tengah		15	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		15.00	Ha		Kiarapedes	Pusakamulya		15	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		15.00	Ha			Parakangarokgek		15	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		20.00	Ha			Cirakas		-	-	-	-	-	-	20	220.00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		18.00	Ha			Cibeber		-	-	-	-	-	-	18	198.00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		18.00	Ha			Sumbersari		-	-	-	-	-	-	18	198.00	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		20.00	Ha			Kiarapedes		-	-	20	220.00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		20.00	Ha			Margaluyu		-	-	20	220.00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		15.00	Ha			Mekarjaya		-	-	15	165.00	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		12.00	Ha			Taringgul Landeuh		-	-	-	-	-	-	-	-	12	132.00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		20.00	Ha	Subang	Serangpanjang	Cipancar		-	-	-	-	20	220.00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		20.00	Ha			Ponggang		-	-	-	-	20	220.00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		15.00	Ha			Talagasari		-	-	-	-	15	165.00	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar
		25.00	Ha		Dawuan	Jambelker		-	-	-	-	-	-	-	-	25	275.00	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Prov. Jabar

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	19.525
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	2.567
TOTAL	22.092

Outcome	2025	2026	2027	2028	2029
Tertanganinya lahan kritis pada kawasan hutan dan juga non hutan di DAS					80.174,99

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	3.627
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	459
TOTAL	4.086

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	3.385
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	600
TOTAL	3.985

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	4.245
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	515
TOTAL	4.760

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	4.376
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	500
TOTAL	4.876

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029	Rp (Juta)
1 APBN	-
2 APBD Provinsi	3.892
3 APBD Kabupaten/Kota	-
4 CSR	-
5 Masyarakat	-
6 BUMN	4.386
TOTAL	4.386



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

PROGRAM PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

 Target Outcome 2029
 Penambahan KK terakses ke infrastruktur Sanitasi Layak : 92.512 KK

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR/PHLN)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)					Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)				
TOTAL ANGGARAN								1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	69,29	
I. PEMENUHAN READINESS CRITERIA																			
1	Inventarisasi dan Survey Pemenuhan Readiness Criteri	3	900	3 Kabupaten				1	300	1	300	1	300					APBD Provinsi	Disperkim Jabar
2	Pendampingan Penyusunan RKM	109	455	3 Kabupaten				9	450	25	1	25	1	25	1	25	1	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
II. PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)																			
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (Kapasitas 1 KK)																		
		280	2.800	Purwakarta	Pasawahan	Pasawahan Anyar		65	650	65	650	50	500	50	500	50	500	DAK/APBN	Dinas Tarkim Kab. Purwakarta
		280	2.800	Purwakarta	Pasawahan	Cihuni		65	650	65	650	50	500	50	500	50	500	DAK/APBN	Dinas Tarkim Kab. Purwakarta
		280	2.800	Subang				65	650	65	650	50	500	50	500	50	500	DAK/APBN	Dinas Tarkim Kab. Subang
		280	2.800	Karawang				65	650	65	650	50	500	50	500	50	500	DAK/APBN	Dinas Tarkim Kab. Karawang
		150.000	2.625	3 kabupaten				30	525	30	525	30	525	30	525	30	525	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
		50,610				-		4,964		6,371		9,761		13,092		16,422		Hibah/Dana Masyarakat/APBD Kabuapten	Masyarakat
	SPALD-S 1 KK	300	1.500	Kab. Karawang	5	45		60	300	60	300	60	300	60	300	60	300	APBN	Kemen PUPR
		271	1.355					54	271	54	271	54	271	54	271	54	271	APBD Kab/Kota	Dinas Keciptakayaan/Dinkes Kokab
	SPALD-S 1 KK	200	1.000	Kab. Purwakarta	5	39		40	200	40	200	40	200	40	200	40	200	APBN	Kemen PUPR
		139	695					28	139	28	139	28	139	28	139	28	139	APBD Kab/Kota	Dinas Keciptakayaan/Dinkes Kokab
	SPALD-S 1 KK	70	352	Kab. Subang	5	14		14	70	14	70	14	70	14	70	14	70	APBD Kab/Kota	Dinas Keciptakayaan/Dinkes Kokab
2	Pembangunan SPALD-S (Kapasitas 10 KK)																		
	SPALD-S 10 KK	900	6	Kab. Karawang	5	45		180	1	180	1	180	1	180	1	180	1	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab
		100	700					20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	APBD Provinsi	
		142	990					28	198	28	198	28	198	28	198	28	198	APBD Kab/Kota	
	SPALD-S 10 KK	500	3.500	Kab. Purwakarta	5	39		100	700	100	700	100	700	100	700	100	700	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab
		50	350					10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	APBD Provinsi	
		129	900					26	180	26	180	26	180	26	180	26	180	APBD Kab/Kota	
	SPALD-S 10 KK	141	984	Kab. Subang	5	14		28	197	28	197	28	197	28	197	28	197	APBD Kab/Kota	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab
3	Pengadaan Truk Jinja	15,000	6	3 kabupaten				3	1	3	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	APBD Provinsi	Disperkim Jabar/Dinas Tarkim Kabupaten
4	Pembangunan IPLT	2,000	-	Kab. Subang dan Kab. Purwakarta											2,000			APBD Provinsi	Disperkim Jabar/Dinas Tarkim Kabupaten
III. PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT (SPALD-T)																			
1	Pembangunan IPAL Permukiman Skala 50 KK																		
	IPAL Skala 50KK	2.854	28.543	Kab. Karawang	5	45		571	5.709	571	5.709	571	5.709	571	5.709	571	5.709	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab
	IPAL Skala 50KK	1.697	16.967	Kab. Purwakarta	5	39		339	3.393	339	3.393	339	3.393	339	3.393	339	3.393	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab
	IPAL Skala 50KK	352	3.516	Kab. Subang	5	14		70	703	70	703	70	703	70	703	70	703	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakayaan dan Dinkes 3 Kokab



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

 Target Outcome 2029
 Penambahan KK Terakses ke Infrastruktur Sanitasi Layak : 92.512
 KK

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR/PHLN)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol		Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)					
TOTAL ANGGARAN								1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	1,634	13,858	69,29	
2	Pembangunan SR IPAL Permukiman		-																
	SR IPAL Permukiman	190	951	Kab. Karawang	5	45		38	190	38	190	38	190	38	190	38	190	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakarya dan Dinkes Kokab
	SR IPAL Permukiman	113	566	Kab. Purwakarta	5	39		23	113	23	113	23	113	23	113	23	113	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakarya dan Dinkes Kokab
	SR IPAL Permukiman	23	117	Kab. Subang	5	14		5	23	5	23	5	23	5	23	5	23	APBN	Kemen PUPR/Disperkim Jabar/Dinkes Jabar/Dinas Keciptakarya dan Dinkes Kokab
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi IPAL Permukiman	1,000	599	3 Kabupaten						1,000	112	1,000	113	1,000	187	1,00	187	APBD Kab/Kota	Dinas Tarkim Kabupaten

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	67,867
3	APBD Provinsi	5,036
4	APBD Kabupaten/Kota	5,875
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		78,778

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	13,933
3	APBD Provinsi	1,486
4	APBD Kabupaten/Kota	1,055
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		2,541

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	13,933
3	APBD Provinsi	1,037
4	APBD Kabupaten/Kota	1,167
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		1,167

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	13,333
3	APBD Provinsi	1,037
4	APBD Kabupaten/Kota	1,168
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		2,206

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	13,333
3	APBD Provinsi	737
4	APBD Kabupaten/Kota	1,242
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		1,980



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	13.333
3	APBD Provinsi	737
4	APBD Kabupaten/Kota	1.242
5	CSR	
6	Masyarakat	
7	BUMN	-
TOTAL		1.980



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol		Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)					
TOTAL ANGGARAN								31.298	275.416	297	92.766	296	92.139	296	92.139	291	89.697	642.157	
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Daur Ulang Sampah																		
1	Pembangunan TPS 3R	131	78.600	Kab. Karawang	Banyusari Cilamaya Kulon Cilamaya Wetan Jatiasari Kotabaru Tirtamulya	58 desa		27	16.200	26	15.600	26	15.600	26	15.600	26	15.600	APBN/APBD	BPPW, Disperkim Jabar/DLH Kab
		129	78.000	Kab. Purwakarta	Bungursari Campaka Cibatu Kiarapedes Pasawahan Pondok Salam Purwakarta Wanayasa	59 desa		25	15.600	26	15.600	26	15.600	26	15.600	26	15.600	APBN/APBD	BPPW, Disperkim Jabar/DLH Kab
		66	48.000	Kab. Subang	Blanakan Rawamekar Cisem Cipeundeuy Dawuan Kalijati Pabuaran Patokbeusi Serangpanjang	25 desa		14	16.200	13	8.400	13	7.800	13	7.800	13	7.800	APBN/APBD	BPPW, Disperkim Jabar/DLH Kab
2	Pembangunan TPST	5	35.000	Kab. Karawang	5 kecamatan	5 desa		1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	APBN/APBD	BPPW, Disperkim
		5	35.000	Kab. Purwakarta	5 kecamatan	5 desa		1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000,00	APBN/APBD	BPPW, Disperkim Jabar/DLH Kab
		5	35.000	Kab. Subang	5 kecamatan	5 desa		1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000	APBN/APBD	BPPW, Disperkim Jabar/DLH Kab
3	Pembangunan Bank Sampah	5	1.500	Kab. Karawang	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
		5	1.500	Kab. Purwakarta	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
		5	1.500	Kab. Subang	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
4	Pembangunan Rumah Magot	5	1.500	Kab. Karawang	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
		5	1.500	Kab. Purwakarta	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
		5	1.500	Kab. Subang	5 kecamatan	5 desa		1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	APBD Provinsi	DLH Jabar
5	Pembangunan Sarana Pengolahan B3	-	0	Kab. Karawang															
		-	0	Kab. Purwakarta															
		-	0	Kab. Subang															
6	Pembangunan TPA Kabupaten Purwakarta		81.000	Kab Purwakarta				15000	81.000									APBN	BPPW Jawa Barat
7	Pembangunan TPST Pamanukan		93.250	Kab Subang	Pamanukan	Pamanukan		16000	93.250									APBN	BPPW Jawa Barat
			0																
8	Pengumpulan Sampah		0																
1	Pengadaan Motor Sampah	394	17.416	Kab. Karawang	Banyusari Cilamaya Kulon Cilamaya Wetan Jatiasari Kotabaru Tirtamulya	58 desa		79	3.491	79	3.491	79	3.491	79	3.491	78	3.452	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
		394	17.416	Kab. Purwakarta	BungursariCampaka	59 desa		79	3.491	79	3.491	79	3.491	79	3.491	78	3.452	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
		197	8.769	Kab. Subang	BlanakanRawamekar	25 desa		40	1.770	40	1.770	39	1.743	39	1.743	39	1.743	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
C	Pengangkutan Sampah																		



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029 :
Persentase pengurangan Tonase Sampah belum terlayani 58,63%

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)		
TOTAL ANGGARAN								31.298	275.416	297	92.766	296	92.139	296	92.139	291	89.697	642.157	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkutan ke TPA (Dumptruck 8m3)																		
		49	42.527	Kab. Karawang	Banyusari Cilamaya Kulon Cilamaya Wetan Jatisari Kotabaru Tirtamulya	58 desa		10	8.663	10	8.663	10	8.663	10	8.663	9	7.875	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
		49	42.527	Kab. Purwakarta	Bungursari Campaka Cibatu Kiarapedes Pasawahan Pondok Salam Purwakarta Wanayasa	59 desa		10	8.663	10	8.663	10	8.663	10	8.663	9	7.875	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
		24	20.652	Kab. Subang	Blanakan Rawamekar Clasem Cipeundeuy Dawuan Kalijati Pabuaran Patokbeusi Serangpanjang	25 desa		5	4.288	5	4.288	5	4.288	5	4.288	4	3.500	APBD Provinsi	Disperkim Jabar
D	Tata Kelola Pengelolaan Sampah																		
1	Sosialisasi dan Edukasi Pengolahan Sampah			Kab. Karawang															

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	483.850
3	APBD Provinsi	251.007
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		734.857

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	243.250
3	APBD Provinsi	32.166
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		32.166

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	60.600
3	APBD Provinsi	124.866
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		-



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	60.000
3	APBD Provinsi	32.139
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		32.139

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	60.000
3	APBD Provinsi	32.139
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		32.139

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	60.000
3	APBD Provinsi	29.697
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		29.697



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029 :

80,46%

No.	Uraian Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBP Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		2026		2027		2028		2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)		
TOTAL ANGGARAN								200	73	277	88	353	107	430	122	508	150	540	
1	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui kegiatan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER/ PROPERDA)			Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang													APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat	
	Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang terbina	82	513	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang			37	64	48	83	59	102,5	70	121,5	82	142	APBD Provinsi		
	Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi baku mutu	58		Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang			26		34		41		49		58				
2	Memantau realisasi investasi pelaku usaha	240	-	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang			80		120		160		200		240		APBD Provinsi	DPMTSP Provinsi Jawa Barat	
	Indikator: Jumlah terpantaunya dokumen terkait perizinan lingkungan																		
3	Pembinaan Pelaku Usaha menuju Pelaku Usaha hijau (green Industry)	82	-	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang			37		48		59		70		82		APBD Provinsi	DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat	
	Indikator: jumlah Pelaku Usaha yang terbina																		
4	Pembinaan rumah sakit ramah lingkungan	8	23	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang			2	8	4	4	6	4	8		8	7	APBD Provinsi	DINKES Provinsi Jawa Barat	
	Indikator: Jumlah rumah sakit yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan																		
5	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di DAS Cilamaya terkait Pengelolaan Air, Udara, dan Limbah B3	8	-	Kab. Subang			8		8		8		8		8		APBD Provinsi	DLH Kabupaten Subang	
	Indikator: Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbina																		
6	Pembinaan terhadap industri kecil di sekitar DAS Cilamaya	30	4,40	Kab. Karawang			10	0,88	15	0,88	20	0,88	25	0,88	30	0,88	APBD Kabupaten/Kota	DLH Kab. Karawang	
	Indikator: Jumlah industri kecil yang terbina				Jatisari														

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	536
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		536

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	72
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		72



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	87
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		87

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	107
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		107

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	122
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		122

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	149
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		149



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)								Sumber Dana (APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana		
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028				Target 2029	
		Vol	Biaya (Juta)					Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)				
TOTAL ANGGARAN								6	-	37	1.022.32	37	1.022.32	35	922.32	37	1.022.32	3.989.26	
I. Pemanfaatan Limbah Ternak menjadi Pupuk dan Biogas																			
1	Pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik	25	1.675.512	1.Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Ciasem 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari, Cilamaya Wetan					5	418.878	5	418.878	5	418.878	5	418.878	APBD Prov	DKPP Prov, Dinas ESDM Prov
											46.542		46.542		46.542		46.542	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)
2	Pembangunan Biogas	75	1.008	1.Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari				15	252	15	252	15	252	15	252	APBD Prov	DKPP Prov, Dinas ESDM Prov	
											63		63		63		63	CSR	CSR
3	Pembangunan unit vermi composting (kascing)	15	96,00	1.Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Ciasem 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari, Cilamaya Wetan				3	24	3	24	3	24	3	24	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)	
											6		6		6		6	BUMN	BUMN
II. Sosialisasi, Pembinaan dan Pendampingan																			
1	Pelatihan/Bimtek/Penyuluhan Pengolahan Pupuk Organik	20	-	1.Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Ciasem 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari, Cilamaya Wetan			2		4	33,57	4	33,57	4	33,57	4	33,57	APBD Prov	DKPP Prov, Dinas ESDM Prov
											3,73		3,73		3,73		3,73	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)		
TOTAL ANGGARAN								6	-	37	1.022,32	37	1.022,32	35	922,32	37	1.022,32	3.989,26	
2	Pelatihan/Bimtek/Penyuluhan Pengolahan Pakan Ternak	20	-	1. Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Clasem 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari, Cilamaya Wetan			2		4	33,57	4	33,57	4	33,57	4	33,57	APBD Prov	DKPP Prov, Dinas ESDM Prov
											3,73		3,73		3,73		3,73	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)
3	Pelatihan/Bimtek/Penyuluhan Tatalaksana Pemeliharaan Ternak dan Perkandangan	20	-	1. Subang 2. Purwakarta 3. Karawang	1. Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Serangpanjang, Blanakan, Clasem 2. Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiarapedes, Pasawahan, Pondoksalam, Purwakarta 3. Banyusari, Jatisari, Cilamaya Wetan			2		4	33,57	4	33,57	4	33,57	4	33,57	APBD Prov	DKPP Prov, Dinas ESDM Prov
											3,73		3,73		3,73		3,73	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)
III. Pemutakhiran dan Pengembangan Data Pengelolaan																			
1	Pemutakhiran dan Pengembangan Data Populasi Ternak di DAS Cilamaya	3	135	DKPP, Dinas Subang, Purwakarta, Karawang						1	45	1	45	-	-	1	45	APBD Prov	DKPP Prov
											5		5				5	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)
2	Inventarisasi Data Pengolah Limbah Peternakan	3	135	DKPP, Dinas Subang, Purwakarta, Karawang						1	45	1	45	-	-	1	45	APBD Prov	DKPP Prov
											5		5				5	APBD Kab/Kota	Dinas Kabupaten (Subang, Purwakarta, Karawang)



E1D1F80BD4

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	1.676.835
4	APBD Kabupaten/Kota	186.339
5	CSR	252
6	Masyarakat	-
7	BUMN	24
TOTAL		1.863.426

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	-
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		-

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	419.265
4	APBD Kabupaten/Kota	46.587
5	CSR	63
6	Masyarakat	-
7	BUMN	6
TOTAL		465.921

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	419.220
4	APBD Kabupaten/Kota	46.587
5	CSR	63
6	Masyarakat	-
7	BUMN	6
TOTAL		465.876

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	419.130
4	APBD Kabupaten/Kota	46.577
5	CSR	63
6	Masyarakat	-
7	BUMN	6
TOTAL		465.776

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	419.220
4	APBD Kabupaten/Kota	46.587
5	CSR	63
6	Masyarakat	-
7	BUMN	6
TOTAL		465.876



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	ANGGARAN (Rp)										Sumber Dana (APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)					Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)		
TOTAL ANGGARAN									35.464		144.268		48.279		3.340		3.401	234.751	
1	DED Pengendali Banjir Das Cilamaya (kalikalapa dan cikaranggelam)	1	3.000	Kab. Karawang				1	3.000									APBN	BBWS Citarum
2	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Kalikalapa	0,5625	45.000	Kab. Karawang					0,5625	45.000								APBN	BBWS Citarum
3	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cikaranggelam	1,75	35.000	Kab. Karawang					1,75	35.000								APBN	BBWS Citarum
4	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cilamaya	1,25	25.000	Kab. Karawang					1,25	25.000								APBN	BBWS Citarum
5	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Kalen Bawah	0,75	15.000	Kab. Karawang							0,75	15000						APBN	BBWS Citarum
6	Pembangunan Tanggul Kritis Sungai Cilamaya	20	90.000	Kab. Karawang				6.667	30.000	6.667	30.000	6.667	30.000					APBN	BBWS Citarum
7	Galian Tanah Situ Cibeber 3,80 ha, Kab. Purwakarta		511,28	Kabupaten Purwakarta	Kiarapedes	Desa Sumbersari		3,80 ha	102,26	3,80 ha	102,26	3,80 ha	102,26	3,80 ha	102,26	3,80 ha	102,26	APBD Provinsi	DSDA Jabar
8	Pemeliharaan Situ Cibodas 3,00 ha, Kabupaten Purwakarta (Galian Tanah, Pengangkatan Gulma Terapung)		1.219,77	Kabupaten Purwakarta	Bungursari	Desa Karangmukt		3,00 ha	243,95	3,00 ha	243,95	3,00 ha	243,95	3,00 ha	243,95	3,00 ha	243,95	APBD Provinsi	DSDA Jabar
9	Pemeliharaan Situ Cigangsa 3,90 ha Kabupaten Purwakarta (Galian Tanah)		465,63	Kabupaten Purwakarta	Campaka	Desa Campakasari		3,90 ha	93,13	3,90 ha	93,13	3,90 ha	93,13	3,90 ha	93,13	3,90 ha	93,13	APBD Provinsi	DSDA Jabar
10	Pemeliharaan Situ Cikamar 18,47 ha Kabupaten Purwakarta (Babadan Rumpul, Galian Tanah, Pengangkatan Gulma Terapung)		1.170,56	Kabupaten Purwakarta	Campaka	Desa Cijunti		18,67 ha	234,11	18,67 ha	234,11	18,67 ha	234,11	18,67 ha	234,11	18,67 ha	234,11	APBD Provinsi	DSDA Jabar
11	Pemeliharaan Situ Cisaat Kabupaten Purwakarta 4,70 ha (Galian Tanah)		175,30	Kabupaten Purwakarta	Campaka	Desa Cisaat		4,70 ha	35,06	4,70 ha	35,06	4,70 ha	35,06	4,70 ha	35,06	4,70 ha	35,06	APBD Provinsi	DSDA Jabar
12	Pemeliharaan Rutin Situ Kamojing 61,40 ha Kabupaten Karawang (Babadan Rumpul, Galian Tanah)		557,57	Kabupaten Purwakarta	Cikampek	Desa Kamojing		61,40 ha	111,51	61,40 ha	111,51	61,40 ha	111,51	61,40 ha	111,51	61,40 ha	111,51	APBD Provinsi	DSDA Jabar
13	Pengerukan Sedimen Bendung Barugbug		1.125	3 Kabupaten				1000 m3	75	2000 m3	150	4000 m3	250	4000	300	4000	350	BUMN	PJT II
14	Pemeliharaan Saluran Irigasi Di Barugbug		250	3 Kabupaten				2 km	50	2 km	50	2 km	50	2 km	50	2 km	50	BUMN	PJT II
15	Pembersihan Pintu Air Bendung Barugbug	5	650,50	Kab. Karawang	Jatisari	Barugbug		1 Tahun	123,70	1 Tahun	126,80	1 Tahun	130	1 Tahun	133,3	1 Tahun	136,7	BUMN	PJT II
16	Pemantauan kualitas air		544	Kab. Karawang Kab. Subang				4 Titik	103	4 Titik	105,80	4 Titik	109	4 Titik	112	4 Titik	114,6	BUMN	PJT II
17	Konservasi Vegetasi		113	3 Kabupaten				2500 pohon	13	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	BUMN	PJT II
B Mitigasi Bencana Hidrometeorologi																			
1	Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Resilience Center	80	8.100	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang				-	-	20 Desa	6.600	20 Desa	500	20 Desa	500	20 Desa	500	APBD Provinsi	BPBD Provinsi
2	Operasional Rutin Pengelolaan Hidrologi dan	2	5.000	Kab. Karawang				1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	APBN	BBWS Citarum
C Konservasi Air Tanah																			
1	Pembinaan dan Pemantauan Muka Air Tanah	100	1.000	Jawa Barat				20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	APBD Provinsi	Dinas ESDM Jabar
2	Pembangunan Sumur Resapan	48	400	Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta						12	100	12	100	12	100	12	100	APBD Provinsi	Dinas SDA Jabar
3	Sosialisasi Pengelolaan Air tanah	792	0	DAS Citarum				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas ESDM Jabar
4	Kajian Evaluasi Zona Konservasi Air tanah	8	0	DAS Citarum				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	Dinas ESDM Jabar
5	Sinkronisasi Data Nilai Perolehan Air tanah	1	469	DAS Citarum				1	79	1	90	1	95	1	100	1	105	APBD Provinsi	Dinas ESDM Jabar

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	218.000
3	APBD Provinsi	14.069
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	2.682
TOTAL		234.751

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	34.000
3	APBD Provinsi	1.099
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	365
TOTAL		1.464



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	136.000
3	APBD Provinsi	7.810
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	458
TOTAL		8.268

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	46.000
3	APBD Provinsi	1.715
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	564
TOTAL		2.279

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	1.000
3	APBD Provinsi	1.720
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	620
TOTAL		2.340

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	1.000
3	APBD Provinsi	1.725
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	676
TOTAL		2.401



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

No.	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Val	Biaya (Juta)					Val	Biaya (Juta)	Val	Biaya (Juta)	Val	Biaya (Juta)	Val	Biaya (Juta)				
TOTAL ANGGARAN									874.80		874.80		874.80		874.80		875	4.374	
1	Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan			Kabupaten Subang	Cibatu	Ciparungasri													
2	Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan/ Kegiatan	80	1.006	Kabupaten Purwakarta	Campaka	Cipinang		16	201.12	16	201.12	16	201.12	16	201.12	16	201.12	APBD Provinsi	DLH Jabar
3	Penegakan Hukum Sanitasi Administratif			Kabupaten Karawang	Karapados	Karyamekar													
	- Pemberian Sanitasi Administratif				Bungurari	Cilandak													
	- Pengawasan Sanitasi Administratif				Cipandeu	Cibatu													
5	Penegakan Hukum Perdata				Palakaeulit	Cijunli													
	- Verifikasi Sengketa Lingkungan					Cikumpay													
	- Mediasi					Campaka													
	- Evaluasi Hasil Sengketa					Kerlamukti													
6	Penegakan Hukum Pidana					Margaduyu													
7	Soliditas penegakan hukum lingkungan untuk pelaku usaha dan/kegiatan dan UMKM sebanyak 2 kali	500	608			Cibeuning		100	121.68	100	121.68	100	121.68	100	121.68	100	121.68	APBD Provinsi	DLH Jabar
8	Pengawasan Berbasis Masyarakat (Patrol/Sungai)	5	2.760			Ciwangi		1	552	1	552	1	552	1	552	1	552	APBD Provinsi	DLH Jabar
						Cipandeu													
						Karangmukti													
						Tanjungsari													

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	4.374
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		4.374

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	875
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		875

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	875
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		875

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	875
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		875

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	875
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		875

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	875
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		875



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROGRAM EDUKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029 :

tereduksi dan dilibatkan dalam pengelolaan

No	Indikasi Kegiatan	Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)										Sumber Dana (APBN/APBN Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR/)	Stakeholder Pelaksana
		Tahun 2025-2029						Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028		Target 2029			
		Vol	Biaya (Juta)	Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)		
TOTAL ANGGARAN								23	201	31	246	39	291	47	337	55	382	1.456	
1	Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim)	45	139	1. Kabupaten Purwakarta 2. Kabupaten Karawang 3. Kabupaten Subang	1. Pasawahan 2. Purwakarta 3. Pondoksalam 4. Kiarapedes 5. Serangpanjang 6. Dawuan	1. Selaawi 2. Salem 3. Margaluyu 4. Ciseureuh 5. Margasari 6. Panggang		5	17,38	7	22,58	9	27,69	11	32,91	13	38,12	APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat
2	Pembinaan masyarakat melalui Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan (ecovillage)	30	906	1. Kabupaten Purwakarta 2. Kabupaten Karawang 3. Kabupaten Subang	1. Kiarapedes 2. Cib	1. Pusakamulya 2. Barugbug 3. Klara 4. Bayur kidul		4	120,80	5	151	6	181,20	7	211,40	8	241,60	APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat
3	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75	221	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Subang	1. Kab Karawang (Tirtamulya) 2. Kab. Subang (Cipendeuy) 3. Kab. Purwakarta (Kiarapedes)	1. Kab Karawang (Desa Kertamulya) 2. Kab. Subang (Desa Cimayasari) 3. Kab. Purwakarta (Desa Kiarapedes)		5	34,20	10	39,20	15	44,20	20	49,20	25	54,20	APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat
4	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	15	162	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Subang	1. Kab Karawang (Tirtamulya) 2. Kab. Subang (Cipendeuy) 3. Kab. Purwakarta (Kiarapedes)	1. Kab Karawang (Desa Kertamulya) 2. Kab. Subang (Desa Cimayasari) 3. Kab. Purwakarta (Desa Kiarapedes)		3	22,32	3	27,32	3	32,32	3	37,32	3	42,32	APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat
5	Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di lokasi Masyarakat Hukum Adat	5	29	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Subang	1. MHA Ciseureuh (Kel. Mekarjaya) 2. MHA Salapan (Kel. Gempol)	1. Kec. Kiarapedes 2. Kec. Banyusari		1	5,85	1	5,87	1	5,75	1	5,74	1	5,84	APBD Provinsi	DLH Provinsi Jawa Barat

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	1.456
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		1.456

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	201
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		201



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	246
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		246

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	291
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		291

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	337
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		337

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	382
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		382



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PENGLOLAAN DATA, INFORMASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Rencana Aksi PPK DAS Cilamaya

Target Outcome 2029 :

dapat diakses 100%

No.		Indikasi Kegiatan		Target/Output		Lokasi			Dukungan Sektor TNI	Anggaran (Rp.)								Sumber Dana (APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota/BUMN/CSR)		Stakeholder Pelaksana		
				Tahun 2025-2029		Kab/Kota	Kec	Kel/Desa		Target 2025		Target 2026		Target 2027		Target 2028					Target 2029	
				Vol	Biaya (Juta)					Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)	Vol	Biaya (Juta)					
TOTAL ANGGARAN										44	254	44	254	44	254	44	254	44	254	1.270		
I. PENGELOLAAN COMMAND CENTER																						
1	Penyediaan Sistem Media Analytic	2	960	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					2	192	2	192	2	192	2	192	2	192	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	180	-	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					36	0.00	36	0.00	36	0.00	36	0.00	36	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
3	Pelayanan Informasi DAS Cilamaya	1	-	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
4	Pemanfaatan Dashboard untuk Monitoring dan Pengambilan Keputusan	1	-	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
II. PEMANTAUAN KUALITAS AIR																						
1	Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Olomalis dan Online (Onlima)	34	-	Kab. Bandung, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang														APBN	KLHK			
2	Pemantauan Kualitas Air Sungai Manual	1	-	Kab. Subang (Tilik Wanayasa)	Jl. Raya Wanayasa-Sagalahaerang Kp. Garas Cimalaya, Ds. Ponggong, Kec. Sagalaerang, Kab. Subang				1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	APBD Provinsi	DLH Jabar		
		1	-	Kab. Subang (Tilik Bendung Barugbug)	Kp. Barugbug, Ds. Barugbug, Kec. Jatisari, Kab. Karawang				1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	APBD Provinsi	DLH Jabar		
		1	-	Kab. Subang (Tilik Setelah BMP)	Pemantauan dan pemeliharaan DAS DAS Cimalaya Wetan, Kab. Karawang dengan Ds. Blanakan, Kab. Subang				1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	APBD Provinsi	DLH Jabar		
		1	-	Kab. Subang (Tilik Cimalaya-Blanakan)	Pemantauan dan pemeliharaan DAS DAS Cimalaya Wetan, Kab. Karawang dengan Ds. Blanakan, Kab. Subang				1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	1	2.6	APBD Provinsi	DLH Jabar		
III. PUBLIKASI																						
1	Produksi ILM Radio																					
	Diskominfo Jawa Barat	120	60	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
	Diskominfo Subang	120	-	Kab. Subang					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Subang		
	Diskominfo Purwakarta	120	-	Kab. Purwakarta					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Purwakarta		
	Diskominfo Karawang	120	-	Kab. Karawang					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Karawang		
2	Publikasi di Media Online	192	0	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					36	16.1	36	16.1	36	16.1	36	16.1	48	21.4	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
3	Publikasi di Media Cetak	5	0	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					1	34.5	1	34.5	1	34.5	1	34.5	1	34.5	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
4	Publikasi di Smart Digital Platform	5	250	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
5	Pengelolaan Media Sosial	3	-																			
	Instagram	120	-	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
		120	-	Kab. Subang					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Subang		
		120	0	Kab. Purwakarta					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Purwakarta		
		120	0	Kab. Karawang					24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	24	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Karawang		
	Youtube	60	0	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
		60	0	Kab. Subang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Subang		
		60	0	Kab. Karawang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Karawang		
	Website	60	0	1. Kab. Subang2. Kab. Purwakarta3. Kab. Karawang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APBD Provinsi	Diskominfo Jabar		
		60	0	Kab. Subang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Subang		
		60	0	Kab. Purwakarta					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Purwakarta		
		60	0	Kab. Karawang					12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Karawang		
6	ILM Media Luar Ruang (Baliho)	25	-	Kab. Karawang	Kec. Cilamaya Wetan	1. Desa Tegalarwu 2. Desa Mekarmaya 3. Desa Mekarjaya 4. Desa Cilamaya 5. Jembatan perbatasan subang			5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	APB Kabupaten	Diskominfo Karawang		
7	ILM Media Luar Ruang (Videotron)	15	0	Kab. Subang	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.2,				3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	APB Kabupaten	Diskominfo Subang		

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025 - 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	1.270
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		1.270

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2025		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	254
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		254



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2026		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	254
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		254

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2027		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	254
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		254

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2028		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	254
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		254

PROPORSI INDIKASI PENDANAAN 2029		Rp (Juta)
1	APBN	-
3	APBD Provinsi	254
4	APBD Kabupaten/Kota	-
5	CSR	-
6	Masyarakat	-
7	BUMN	-
TOTAL		254



BAB VI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, BERISI SKEMA PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN SERTA SKEMA EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

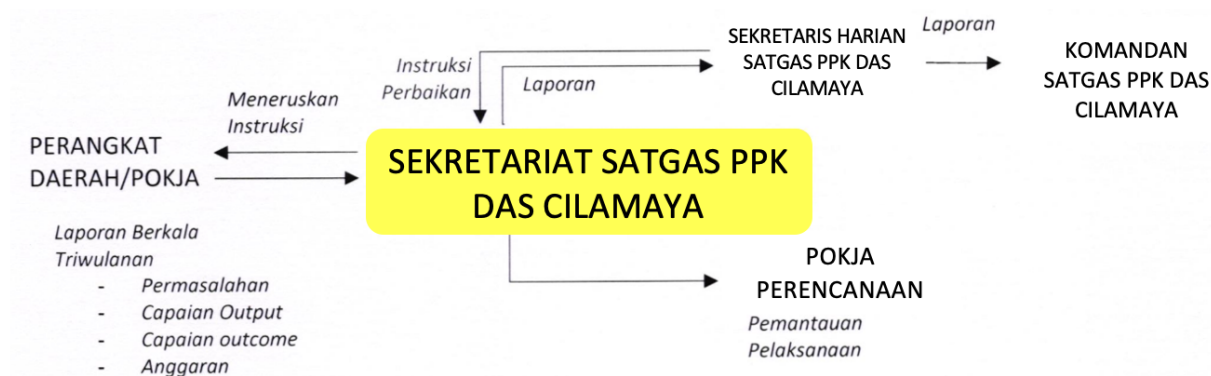
<https://sisebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

BAB VI. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI, BERISI SKEMA PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN SERTA SKEMA EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM

6.1 MONITORING

Monitoring atau pemantauan memberikan informasi mengenai suatu kegiatan atau program pada suatu waktu tertentu (dan dalam jangka waktu tertentu) dalam kaitan dengan sasaran dan hasil terkait. Monitoring bersifat menjelaskan data progress atau capaian dalam jangka waktu tertentu. Pada proses monitoring, dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk membandingkan kinerja capaian kegiatan terhadap target dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan pada implementasi kegiatan. Rancangan monitoring pada pelaksanaan program PPK DAS Cilamaya terdapat pada Gambar 6.1 yaitu pemantauan seluruh kegiatan pada program. Pada monitoring ini, Perangkat Daerah/POKJA melaporkan permasalahan, capaian output outcome dan penggunaan anggaran kepada Sekretaris Harian Komandan Satuan Tugas DAS Cilamaya dan Pokja Perencanaan melalui Sekretariat Satgas DAS Cilamaya. Kemudian Sekretaris Harian akan melaporkan capaian outcome untuk masing-masing program kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku Komandan Satgas DAS Cilamaya. Sekretaris Harian Satgas DAS Cilamaya dapat memberikan instruksi perbaikan pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah melalui Sekretariat Satgas DAS Cilamaya.



Gambar 6.1 Skema Pemantauan Capaian Kegiatan



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

Selain pemantauan capaian, terdapat pula wadah komunikasi untuk pengaduan permasalahan di lapangan (*Help Desk*) yang akan dibuat oleh Sekretariat Satgas. DANSEKTOR/TNI, Masyarakat, Perangkat Desa, LSM dan lainnya dapat membuat pengaduan kepada Command Center Sekretariat Satgas, yang saat ini masih bergabung dengan Command Center Citarum, atau melalui layanan ECIS (*Environmental Complaints Information System*) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang mana juga sebagai Sekretariat Satgas PPK DAS Cilamaya. Kemudian pengaduan tersebut diteruskan kepada bidang terkait seperti Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Kab/Kota, Pemerintah Pusat (Kementerian/lembaga) dan POLRI/BUMN/BUMD atau lainnya. Jawaban dalam penanggulangan masalah disampaikan kembali ke Command Center Sekretariat Satgas / ECIS untuk selanjutnya diteruskan kepada pembuat pengaduan.

6.2 EVALUASI

Evaluasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi baik kepada setiap kegiatan penanganan maupun terhadap keseluruhan program. Terdapat dua evaluasi yang akan dilaksanakan, yaitu evaluasi kegiatan setiap penanganan dan evaluasi program pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Cilamaya.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan data pemantauan bulanan. Sedangkan evaluasi program pelaksanaan PPK DAS Cilamaya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Tugas Fungsi dan Pokoknya yaitu melaksanakan pengendalian pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dilakukan per triwulanan dengan mengumpulkan dan melakukan desk evaluasi triwulanan kepada masing-masing Ketua POKJA untuk mengetahui progress setiap pokja dan mengevaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi untuk kemudian dicarikan segera solusi permasalahannya.

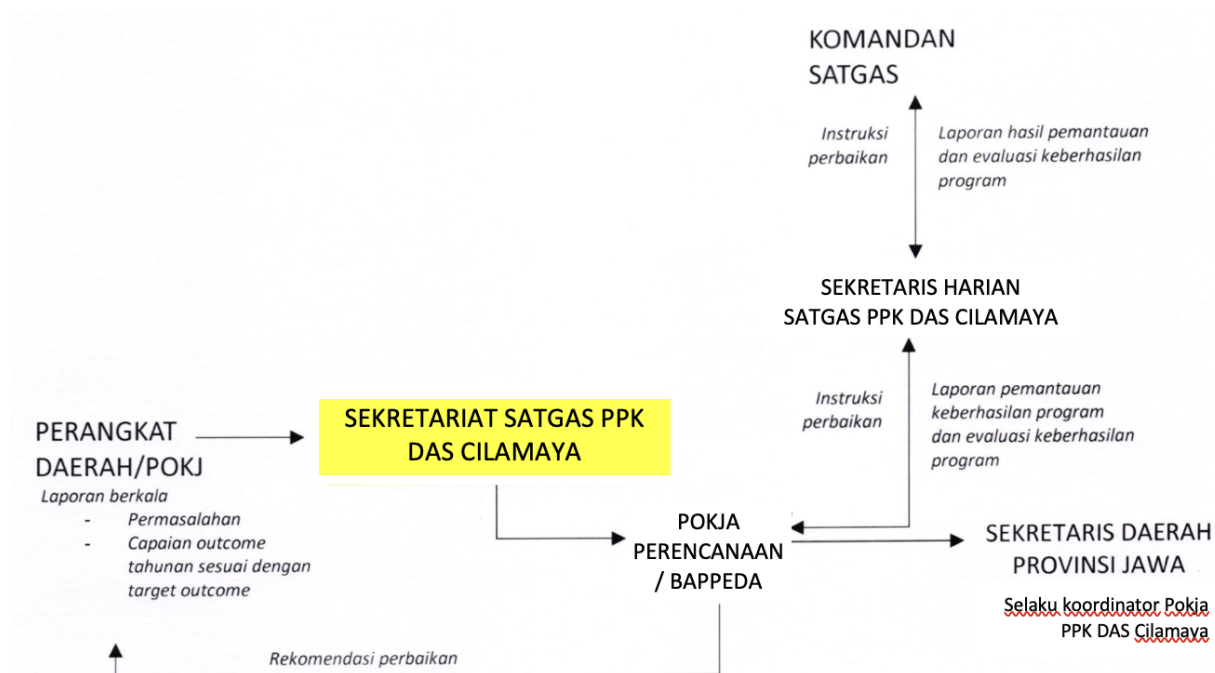
Evaluasi kegiatan setiap penanganan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Evaluasi hasil kegiatan dilaksanakan melalui analisis sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap indikator outcome. Analisis tersebut juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Evaluasi program PPK DAS Cilamaya dilaksanakan melalui analisis sejauh mana keberhasilan program pelaksanaan dengan mengidentifikasi capaian yang telah dimonitor pertahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut perlu disertai dengan identifikasi kendala pada

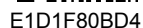


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>



Gambar 6.2 Skema Evaluasi Keberhasilan Program



BAB VII

PENUTUP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>

E1D1F80BD4

BAB VII. PENUTUP

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya harus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat pada umumnya, sehingga pengalokasian sumber daya (pendanaan, kelembagaan, regulasi, dan aktivitas) akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemangku kepentingan diluar pemerintah dapat menjadikan Rencana aksi ini sebagai referensi dalam melakukan kontribusi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Cilamaya.

Rencana Aksi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sehingga kolaborasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta antara pemerintah dan dunia usaha / badan usaha menjadi kunci sukses pencapaian peningkatan kualitas Sungai Cilamaya, termasuk didalamnya akademisi dan media serta masyarakat sebagai wujud *pentahelix*.

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN



E1D1F80BD4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1D1F80BD4>